

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 58 /PB/2013

TENTANG

PENGELOLAAN DATA *SUPPLIER* DAN DATA KONTRAK
DALAM SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 13 ayat (9), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (7), Pasal 17 ayat (4), dan Pasal 21 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2013 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pengelolaan Data *Supplier* dan Data Kontrak dalam Sistem Perbendaharaan dan dan Anggaran Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2013 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENGELOLAAN DATA *SUPPLIER* DAN DATA KONTRAK DALAM SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN yang meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul penerimaan, modul kas, dan modul akuntansi dan pelaporan.
3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Bendahara Umum Negara.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
5. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
6. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

1

8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
10. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan surat perintah pembayaran.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen yang dipersamakan.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
13. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital.
14. Konversi adalah proses pengubahan format data transaksi keuangan pada ADK menjadi data yang dapat diterima oleh SPAN melalui aplikasi konversi.
15. Supplier adalah pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN.
16. Data Supplier adalah informasi terkait dengan pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN yang memuat paling kurang informasi pokok, informasi lokasi, dan informasi rekening.
17. Nama Rekening adalah nama yang terdaftar dalam rekening koran bank untuk suatu nomor rekening tertentu.
18. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disebut NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
19. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.
20. Data Kontrak adalah informasi terkait dengan perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.
21. Kontrak tahun tunggal adalah kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) tahun anggaran.

M

22. Kontrak tahun jamak adalah kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atas beban anggaran.
23. Komitmen tahunan kontrak tahun jamak (*release multiyear*) adalah komitmen tahun tunggal sebagai bagian dari kontrak tahun jamak.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai pengelolaan data *supplier* dan data kontrak dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang meliputi:

1. Tipe, Struktur, dan Elemen Data *Supplier*;
2. Pencatatan dan Validasi Data *Supplier*;
3. Pengelolaan Data *Supplier*;
4. Jenis dan Elemen Data kontrak;
5. Pencatatan dan Validasi Data kontrak; dan
6. Pengelolaan Data kontrak.

BAB II

TIPE, STRUKTUR, DAN ELEMEN DATA *SUPPLIER*

Pasal 3

- (1) Tipe *supplier* dalam SPAN terdiri dari:
 - a. Satker yaitu penerima pembayaran untuk transaksi yang dibayarkan kepada bendahara pengeluaran Satker;
 - b. Penyedia barang dan jasa yaitu penerima pembayaran untuk transaksi atas pekerjaan berdasarkan kontrak atau dokumen perikatan lainnya yang dibayarkan kepada pihak ketiga;
 - c. Pegawai yaitu penerima pembayaran untuk transaksi belanja pegawai yang dibayarkan kepada satu atau beberapa penerima;
 - d. Penerima BABUN yang kemudian disebut BABUN, yaitu penerima pembayaran untuk transaksi terkait pengelolaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;
 - e. Penerima transfer daerah yaitu yang kemudian disebut Transfer Daerah adalah penerima pembayaran untuk transaksi belanja transfer daerah yang dibayarkan kepada satu atau beberapa penerima.
 - f. Penerima penerusan pinjaman yang kemudian disebut Penerusan Pinjaman yaitu penerima pembayaran untuk transaksi terkait penerusan pinjaman, pembayaran konsorsium dan bantuan sosial yang dibayarkan kepada satu atau beberapa penerima.

- g. Lain-lain yaitu penerima pembayaran untuk transaksi terkait pengembalian belanja, pengembalian pendapatan dan tipe lainnya yang tidak termasuk dalam tipe sebelumnya.
- (2) Rincian kode dan nama tipe *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

- (1) Tipe *supplier* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai struktur yang terdiri dari:
- a. Informasi Pokok, yang memuat elemen data utama diantaranya nama *supplier*, NPWP, nomor *supplier*, dan kode Satker;
 - b. Informasi Lokasi, yang memuat elemen data utama diantaranya nama *site*, kode negara, kode KPPN, alamat, kota, provinsi, kode pos, dan kode tipe *supplier*;
 - c. Informasi Rekening, yang memuat elemen data utama diantaranya kode negara asal bank, kode bank, nama bank, kode SWIFT dan/atau IBAN, nama cabang bank, nama pemilik rekening, dan nomor rekening;
 - d. Dalam hal terdapat keperluan atas informasi yang lebih rinci terkait tipe *supplier* tertentu, pada Informasi Rekening diberikan Informasi Tambahan yang memuat elemen data utama diantaranya nama Pegawai/Pemda/Penerusan Pinjaman, NPWP, NIP, lokasi, dan alamat.
- (2) Setiap Informasi Pokok dapat berisi satu atau beberapa Informasi Lokasi.
- (3) Setiap Informasi Lokasi dapat berisi satu atau beberapa Informasi Rekening.
- (4) Rincian elemen data *supplier* dan contoh pengisiannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Dalam hal *supplier* terkait transaksi konsorsium, contoh pengisian elemen data *supplier* adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB III

PENCATATAN DAN VALIDASI DATA *SUPPLIER*

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran, KPPN melakukan pencatatan data *supplier* ke dalam *database* SPAN.

4

- (2) Pencatatan data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. data *supplier* hasil inventarisasi oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
 - b. data *supplier* hasil pendaftaran oleh Satker.

Pasal 6

Pencatatan data *supplier* berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan inventarisasi seluruh data *supplier* berdasarkan tipe *supplier* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), kecuali tipe penyedia barang dan jasa, dan tipe penerusan pinjaman.
- b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan hasil inventarisasi data *supplier* sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Satker untuk mendapatkan pengesahan.
- c. PPK melakukan verifikasi terhadap data hasil inventarisasi data *supplier* sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, PPK melakukan:
 1. pengesahan data *supplier* yang dianggap benar dan menyampaikannya ke KPPN; atau
 2. perbaikan data *supplier* apabila ditemukan kesalahan dan menyampaikan data *supplier* yang benar ke KPPN setelah terlebih dahulu dilakukan pengesahan.
- e. Data *supplier* sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi data awal pada *database* SPAN.

Pasal 7

- (1) Pencatatan data *supplier* berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. data *supplier* dari hasil perekaman pada aplikasi SPM, untuk Satker yang tidak mendapat akses ke aplikasi SPAN; atau
 - b. data *supplier* dari hasil perekaman pada aplikasi SPAN, untuk Satker yang mendapat akses ke aplikasi SPAN.
- (2) Data *supplier* yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. data *supplier* yang belum dicatat dalam SPAN; dan/atau
 - b. penambahan elemen data informasi lokasi dan/atau informasi rekening pada data *supplier* yang telah dicatat dalam SPAN.

- (3) Dalam rangka pendaftaran data *supplier*, PPK melakukan:
 - a. administrasi dokumen pendukung data *supplier* yang meliputi referensi bank, fotokopi Kartu NPWP, dan/atau fotokopi akta pendirian badan usaha;
 - b. verifikasi atas kebenaran dokumen pendukung data *supplier*.

Pasal 8

- (1) Satker yang tidak mendapat akses langsung ke aplikasi SPAN melakukan pendaftaran data *supplier* yang belum dicatat dalam SPAN dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. PPK melakukan perekaman data *supplier* yang telah benar berdasarkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a pada aplikasi SPM.
 - b. PPK menyampaikan hasil perekaman data *supplier* sebagaimana dimaksud pada huruf a ke KPPN pada saat penyampaian ADK Kontrak atau ADK SPM.
 - c. Berdasarkan ADK Kontrak atau ADK SPM sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPPN melakukan:
 1. konversi ADK Kontrak atau ADK SPM melalui aplikasi konversi untuk menghasilkan ADK *supplier*;
 2. unggah ADK *supplier* ke dalam aplikasi SPAN; dan
 3. validasi terhadap ADK *supplier* dalam rangka:
 - a) pemenuhan isian data *supplier* sesuai ketentuan validasi aplikasi SPAN; dan
 - b) menghindari duplikasi data.
- (2) Satker yang mendapat akses langsung ke aplikasi SPAN melakukan pendaftaran data *supplier* dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Staf PPK melakukan:
 1. perekaman data *supplier* ke dalam aplikasi SPAN berdasarkan:
 - a) dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a; dan
 - b) ketentuan pengisian elemen data *supplier* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
 2. pengajuan pendaftaran data *supplier* kepada PPK;
 - b. PPK melakukan:
 1. pengecekan dan penelitian atas pengajuan pendaftaran data *supplier* yang diterima dari staf PPK;
 2. pengujian antara data *supplier* yang diajukan dan dokumen pendukung;
 3. penolakan apabila data *supplier* yang diajukan tidak sesuai dengan dokumen pendukung;

sesuai dengan dokumen pendukung;

4. penerusan pendaftaran data *supplier* ke KPPN apabila data *supplier* yang diajukan telah sesuai dengan dokumen pendukung.
 - c. Berdasarkan pendaftaran data *supplier* yang diterima dari PPK, KPPN melakukan validasi dalam rangka pemenuhan isian data *supplier* sesuai ketentuan validasi.
- (3) Berdasarkan hasil validasi data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) KPPN melakukan:
 - a. persetujuan dan menerbitkan Laporan Pendaftaran *Supplier* yang memuat NRS apabila data *supplier* telah memenuhi ketentuan validasi; atau
 - b. penolakan dan menerbitkan Laporan Penolakan Informasi *Supplier* apabila data *supplier* tidak memenuhi ketentuan validasi.
 - (4) KPPN menyampaikan Laporan Pendaftaran *Supplier* atau Laporan Penolakan Informasi *Supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Satker melalui:
 - a. e-mail dan/atau notifikasi secara otomatis; atau
 - b. sarana lainnya dalam hal pengiriman melalui e-mail tidak berhasil.
 - (5) Laporan Pendaftaran *Supplier* dan Laporan Penolakan Informasi *Supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format yang ditetapkan dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - (6) Laporan Pendaftaran *Supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampirkan pada saat pengajuan SPM ke KPPN oleh Satker.

Pasal 9

- (1) Data *supplier* yang telah dicatat dalam database SPAN dapat dilakukan penambahan elemen data *supplier*.
- (2) Penambahan elemen data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penambahan elemen data informasi lokasi; dan/atau
 - b. penambahan elemen data informasi rekening.
- (3) Penambahan elemen data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pendaftaran data *supplier* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Pendaftaran data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilampiri dengan surat permintaan penambahan data *supplier* dan Laporan Pendaftaran *Supplier* terakhir.
- (5) Format surat permintaan penambahan data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 10

Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan *user manual* sebagai panduan dalam rangka pendaftaran *supplier* yang melibatkan penggunaan aplikasi SPAN.

BAB IV

PENGELOLAAN DATA *SUPPLIER*

Pasal 11

Data *supplier* yang telah dicatat dalam *database* SPAN dapat dilakukan:

- a. perubahan (*update*);
- b. penonaktifan (*deaktivasi*); atau
- c. penggabungan (*merge*).

Pasal 12

- (1) Proses perubahan data *supplier* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui:
 - a. mekanisme pendaftaran data *supplier* dengan elemen data yang benar oleh Satker ke KPPN; atau
 - b. mekanisme perubahan data *supplier* oleh *user* khusus pada KPPN.
- (2) Mekanisme perubahan data *supplier* melalui pendaftaran data *supplier* dilakukan sesuai prosedur pendaftaran data *supplier* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Atas perubahan data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPN menonaktifkan elemen data *supplier* yang dianggap tidak valid.
- (4) Mekanisme perubahan data *supplier* dengan *user* khusus pada KPPN dilakukan dengan mengacu pada *user manual* aplikasi SPAN.
- (5) Perubahan data *supplier* melalui *user* khusus pada KPPN dilakukan berdasarkan surat permintaan perubahan data *supplier* yang disampaikan oleh Satker.
- (6) Surat permintaan perubahan data *supplier* dibuat sesuai format yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (7) Rincian elemen data *supplier* pada SPAN yang dilakukan perubahan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (8) Setelah melakukan perubahan data *supplier*, KPPN membuat Laporan Perubahan Informasi *Supplier* sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (9) Untuk perubahan yang dilakukan dengan *user* khusus KPPN, KPPN membuat Laporan Informasi *Supplier* setelah perubahan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (10) KPPN menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) ke Satker.

Pasal 13

- (1) Proses penonaktifan data *supplier* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. surat permintaan penonaktifan data *supplier* dari Satker; atau
 - b. laporan audit *supplier* yang dihasilkan oleh sistem aplikasi.
- (2) Surat permintaan penonaktifan data *supplier* yang disampaikan oleh Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat permintaan penonaktifan data *supplier* tipe pegawai; atau
 - b. surat permintaan penonaktifan data *supplier* selain tipe pegawai.
- (3) Surat permintaan penonaktifan data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan dalam hal terdapat informasi rekening pegawai yang tidak lagi digunakan untuk pembayaran.
- (4) Surat permintaan penonaktifan data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format dalam Lampiran XI dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) KPPN melakukan *review* atas kesesuaian surat permintaan penonaktifan dengan data *supplier* yang telah tercatat pada SPAN.
- (6) Berdasarkan surat permintaan penonaktifan data *supplier* dan hasil *review*, KPPN melakukan:
 - a. penonaktifan data *supplier* menggunakan *user* khusus pada aplikasi SPAN dan menerbitkan informasi penonaktifan data *supplier*;
 - b. penolakan penonaktifan data *supplier* dan menerbitkan informasi penolakan apabila KPPN menolak permintaan penonaktifan data *supplier*, atau

1

- c. penerusan surat permintaan penonaktifan data *supplier* kepada unit khusus yang mengelola data *supplier* apabila penonaktifan data *supplier* terkait dengan informasi pokok.
- (7) Mekanisme penonaktifan data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dilakukan dengan mengacu pada *user* manual aplikasi SPAN.
- (8) Khusus untuk penonaktifan data *supplier* tipe pegawai, Laporan Informasi *Supplier* memuat informasi rekening pegawai yang tidak aktif.
- (9) KPPN menyampaikan Laporan Informasi *Supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Satker yang antara lain dipergunakan dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP).
- (10) Laporan Informasi *Supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 14

- (1) Penggabungan data *supplier* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c diperlukan dalam hal terdapat kemungkinan duplikasi pencatatan informasi pokok *supplier* yang telah dilakukan pembayaran.
- (2) Penggabungan data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit khusus yang mengelola data *supplier*.
- (3) Proses penggabungan data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat permintaan penggabungan data *supplier* dari Satker yang disampaikan melalui KPPN.
- (4) Dalam hal penggabungan data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Laporan Audit *Supplier*, proses penggabungan data *supplier* dapat dilakukan tanpa surat permintaan dari Satker.
- (5) Format surat permintaan penggabungan data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini
- (6) Mekanisme penggabungan data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengacu pada *user* manual aplikasi SPAN.
- (7) Informasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digabungkan pada informasi *supplier* yang dianggap benar sesuai permintaan Satker.

- (8) Setelah melakukan penggabungan data *supplier*, unit khusus membuat dan menyampaikan laporan penggabungan *supplier* ke Satker melalui KPPN sesuai Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 15

- (1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pengelolaan data *supplier* yang antara lain meliputi:
 - a. Koordinasi antar KPPN terkait pencatatan dan penggunaan data *supplier* dalam rangka penerbitan SP2D;
 - b. Aktivitas yang diperlukan dalam rangka pemeliharaan dan perubahan data.
- (2) Pengelolaan data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit khusus yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Unit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas antara lain:
 - a. melakukan analisis terhadap kemungkinan duplikasi data berdasarkan Laporan Audit *Supplier*.
 - b. melakukan tindakan penggabungan terhadap data *supplier* yang mengalami duplikasi.
 - c. melakukan tindakan penelitian dan persetujuan terhadap pengajuan penonaktifan informasi pokok *supplier*.
 - d. melakukan analisis dan tindakan pemeliharaan data lainnya terhadap data *supplier*.
- (4) Unit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kewenangan antara lain:
 - a. memberikan rekomendasi tindakan kepada KPPN atau Satker berdasarkan hasil analisis atas data *supplier*;
 - b. melakukan konfirmasi kepada KPPN maupun unit lain dalam hal terdapat data yang dianggap memerlukan klarifikasi; dan/atau
 - c. menghubungi pihak terkait dalam hal ditemukan penyalahgunaan/indikasi penyalahgunaan data *supplier*.

BAB V

JENIS DAN ELEMEN DATA KONTRAK

Pasal 16

- (1) Jenis data kontrak yang dicatat dalam Aplikasi SPAN meliputi:
 - a. Data Kontrak Tahun Tunggal;
 - b. Data Kontrak Tahun Jamak.
- (2) Data kontrak tahun tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai struktur data yang terdiri dari:
 - a. Informasi Umum;
 - b. Informasi Khusus ;
 - c. Informasi Pembebanan.
- (3) Data kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya memuat Informasi Umum.
- (4) Informasi Khusus dan Informasi Pembebanan atas data kontrak tahun jamak dicatat pada saat pendaftaran data komitmen tahunan kontrak tahun jamak ke KPPN.

Pasal 17

- (1) Informasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, memuat elemen data yang antara lain meliputi nomor kontrak, mata uang dalam kontrak, tanggal kontrak, nama pekerjaan, dan pihak penyedia barang/jasa yang melakukan perikatan dan berhak memperoleh pembayaran (data *supplier*).
- (2) Informasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, memuat elemen data yang antara lain meliputi cara penarikan, rencana angsuran/pembayaran, serta rencana potongan uang muka dan retensi (jika ada).
- (3) Informasi Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, memuat elemen data BAS yang menjadi dasar pembebanan dan pencadangan pagu DIPA.
- (4) Data *Supplier* yang terdapat pada Informasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat elemen data nama *supplier*, NPWP, tipe *supplier*, nama bank, dan nomor rekening yang digunakan sebagai tujuan pembayaran.
- (5) Informasi Khusus dan Informasi Pembebanan dalam komitmen tahunan kontrak tahun jamak memiliki elemen data yang sama dengan Informasi Khusus dan Informasi Pembebanan pada data kontrak tahun tunggal sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3).

M

- (6) Struktur data kontrak dapat memuat elemen data yang terdiri dari:
 - a. satu atau beberapa cara penarikan;
 - b. satu atau beberapa rencana angsuran/pembayaran ;
 - c. satu atau beberapa BAS.
- (7) Contoh isian struktur data kontrak yang memuat satu/beberapa cara penarikan dan satu/beberapa rencana angsuran/pembayaran adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (8) Rincian struktur dan elemen data kontrak beserta contoh pengisian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 18

- (1) Rencana angsuran/pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (6) huruf b, paling kurang memuat jadwal dan nilai rencana pembayaran sebagai berikut:
 - a. untuk kontrak dengan sumber dana rupiah murni, dicantumkan sebesar nilai kontrak sebelum potongan;
 - b. untuk nilai kontrak atau bagian dari nilai kontrak yang dibiayai dengan sumber dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), dicantumkan sebesar nilai kontrak dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari porsi PHLN.
- (2) Contoh pencantuman nilai rencana pembayaran terkait sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI

PENCATATAN DAN VALIDASI DATA KONTRAK

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran yang bersifat kontraktual, Satker wajib mendaftarkan data kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada KPPN selaku Kuasa BUN untuk dicatat dalam database SPAN.
- (2) Data kontrak yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data atas tanda bukti perjanjian berupa kontrak yang terdiri dari SPK atau surat perjanjian untuk transaksi yang akan dibayarkan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

1

- (3) Data kontrak yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. data kontrak yang belum pernah dicatat dalam SPAN; dan
 - b. perubahan atas data kontrak yang telah tercatat dalam SPAN.
- (4) Perubahan data kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. perubahan elemen data kontrak berdasarkan addendum kontrak menurut ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; atau
 - b. perubahan atas elemen data kontrak yang menurut ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah tidak memerlukan addendum kontrak.

Pasal 20

- (1) Pendaftaran data kontrak dilakukan dengan mengacu pada 1 (satu) nomor kontrak tertentu.
- (2) Dalam hal suatu kontrak menggunakan beberapa jenis mata uang, pendaftaran dilakukan untuk masing-masing jenis mata uang.
- (3) Dalam hal suatu kontrak dibayarkan melalui beberapa kantor bayar, pendaftaran dilakukan untuk masing-masing kantor bayar.

Pasal 21

Dalam rangka pendaftaran data kontrak:

- a. untuk Satker yang tidak mendapat akses ke aplikasi SPAN, melakukan perekaman data kontrak ke dalam aplikasi SPM dan menyampaikan ADK hasil perekaman data kontrak ke KPPN; atau
- b. untuk Satker yang mendapat akses ke aplikasi SPAN, melakukan perekaman data kontrak secara langsung ke dalam aplikasi SPAN.

Pasal 22

Berdasarkan ADK data kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, KPPN melakukan pencatatan dalam database SPAN dengan tahapan:

- a. melakukan konversi data melalui aplikasi konversi untuk menghasilkan ADK kontrak hasil konversi;
- b. melakukan unggah ADK kontrak hasil konversi sebagaimana dimaksud pada huruf a kedalam aplikasi SPAN;

- c. melakukan validasi terhadap ADK kontrak hasil konversi yang diunggah ke dalam aplikasi SPAN sebagaimana dimaksud pada huruf b, terkait kelengkapan data kontrak;
- d. Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, KPPN melakukan:
 1. pengujian ketersediaan dana dan pencadangan dana sebesar nilai kontrak yang didaftarkan serta menerbitkan Nomor Register Kontrak (NRK) melalui aplikasi SPAN apabila data kontrak telah memenuhi ketentuan validasi; atau
 2. penolakan dan menerbitkan informasi penolakan data kontrak melalui aplikasi SPAN apabila data kontrak tidak memenuhi ketentuan validasi.

Pasal 23

- (1) Perekaman data kontrak ke dalam aplikasi SPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilakukan dengan tahapan:
 - a. Staf PPK melakukan:
 1. perekaman data kontrak ;
 2. validasi kelengkapan data dan ketersediaan dana; dan
 3. meneruskan data kontrak yang sudah direkam kepada PPK.
 - b. PPK melakukan:
 1. *review* kelengkapan dan kebenaran isian data kontrak yang sudah direkam oleh Staf PPK;
 2. persetujuan dan meneruskan ke KPPN apabila data kontrak telah lengkap dan benar;
 3. penolakan dan memerintahkan Staf PPK untuk melakukan koreksi perekaman apabila data kontrak tidak lengkap atau tidak benar.
- (2) Berdasarkan data kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN melakukan pencatatan ke dalam database SPAN dengan tahapan:
 - a. melakukan *review* atas kelengkapan elemen data kontrak yang diteruskan oleh PPK.
 - b. melakukan persetujuan data kontrak dan pencadangan dana dengan menerbitkan NRK apabila data kontrak telah lengkap;
 - c. melakukan penolakan data kontrak dan menerbitkan informasi penolakan apabila data kontrak tidak lengkap.

Pasal 24

KPPN menyampaikan informasi NRK atau informasi penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dan Pasal 23 ayat (2) kepada Satker melalui:

- a. *e-mail* dan/atau notifikasi secara otomatis; atau
- b. sarana lainnya dalam hal pengiriman melalui *e-mail* tidak berhasil.

Pasal 25

- (1) Kontrak yang mempunyai beberapa penerima pembayaran diperlakukan mekanisme pencatatan kontrak secara konsorsium.
- (2) Pencatatan kontrak secara konsorsium hanya dapat dilakukan jika diketahui bagian dari nilai kontrak yang menjadi hak masing-masing penerima pembayaran.
- (3) Pencatatan data kontrak dan pencadangan dana dilakukan untuk masing-masing bagian dari nilai kontrak yang menjadi hak penerima pembayaran.
- (4) Untuk kepentingan pencatatan, pada nomor kontrak yang dicatat secara konsorsium ditambahkan informasi nama masing-masing penerima pembayaran.
- (5) Kartu pengawasan kontrak yang dicatat secara konsorsium dibuat untuk masing-masing penerima pembayaran.
- (6) Contoh pencatatan kontrak secara konsorsium adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 26

- (1) Dalam hal kontrak mengatur pemberian uang muka, data kontrak mencantumkan nilai uang muka yang dapat diberikan sesuai dengan yang ditetapkan oleh PPK beserta rencana pelunasannya.
- (2) Nilai uang muka yang tercantum dalam data kontrak merupakan nilai maksimum uang muka yang dapat diberikan.
- (3) Nilai rencana pelunasan uang muka berupa potongan atas nilai pembayaran dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pelunasan secara proporsional sesuai persentase nilai angsuran/pembayaran yang ditagihkan terhadap total nilai kontrak;
 - b. pelunasan secara sekaligus pada rencana angsuran/pembayaran tertentu; atau

1

- c. pelunasan pada beberapa rencana angsuran/pembayaran yang tidak mengacu pada persentase nilai pembayaran yang ditagihkan terhadap total nilai pembayaran.
- (4) Nilai rencana angsuran/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat secara *bruto* sebelum dikurangi pelunasan uang muka.
 - (5) Dalam hal Direktorat Jenderal Perbendaharaan belum dapat menyediakan aplikasi yang dapat mengakomodir pencatatan angsuran/pembayaran secara *bruto*, pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara *netto*.
 - (6) Rencana pelunasan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat informasional dan tidak mengikat.
 - (7) Dalam hal telah terjadi pembayaran uang muka, nilai uang muka dan rencana pelunasan yang telah dicatat dalam SPAN tidak dapat diubah menjadi lebih kecil dari nilai uang muka yang telah dibayarkan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal kontrak memerlukan pemeliharaan, data kontrak mencantumkan persentase dari nilai kontrak yang diperlakukan sebagai retensi dan rencana pembayaran retensi setelah selesai masa pemeliharaan.
- (2) Nilai potongan terhadap nilai pembayaran dalam rangka retensi pemeliharaan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pemotongan secara proporsional dari total nilai retensi sesuai persentase nilai angsuran/pembayaran yang ditagihkan terhadap total nilai kontrak;
 - b. pemotongan sebesar total nilai retensi pada rencana angsuran/pembayaran tertentu;
 - c. pemotongan sebesar total nilai retensi pada beberapa rencana angsuran/pembayaran yang tidak mengacu pada persentase nilai pembayaran yang ditagihkan terhadap total nilai pembayaran.
- (3) Nilai rencana angsuran/pembayaran yang dicatatkan adalah sebesar *netto* setelah dikurangi nilai potongan retensi.

BAB VII

PENGELOLAAN DATA KONTRAK

Pasal 28

Pengelolaan data kontrak yang telah tercatat dalam SPAN meliputi:

- a. Perubahan data kontrak;
 - b. Pembatalan data kontrak;
 - c. Penutupan data kontrak.
- 1

Pasal 29

- (1) Perubahan data kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:
 - a. perubahan elemen data kontrak berdasarkan addendum kontrak sesuai ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; atau
 - b. perubahan atas elemen data kontrak yang menurut ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah tidak memerlukan addendum kontrak.
- (2) Dalam hal perubahan data kontrak tidak merubah struktur data kontrak dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. untuk Satker yang tidak mendapat akses langsung ke aplikasi SPAN, dilakukan perekaman perubahan data kontrak ke dalam aplikasi SPM dan menyampaikan ADK hasil perekaman ke KPPN;
 - b. untuk Satker yang memiliki akses langsung ke aplikasi SPAN, dilakukan perekaman perubahan data kontrak secara langsung ke dalam aplikasi SPAN.
- (3) Dalam hal perubahan data kontrak mengakibatkan perubahan struktur data kontrak, dilakukan melalui perekaman secara langsung dengan menggunakan *user* khusus pada Aplikasi SPAN.
- (4) Perubahan data kontrak yang mengakibatkan perubahan struktur data kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. perubahan yang mengakibatkan bertambah atau berkurangnya jenis cara penarikan; dan
 - b. perubahan yang mengakibatkan bertambah atau berkurangnya frekuensi rencana angsuran/pembayaran.
- (5) Perubahan data kontrak dengan *user* khusus sebagaimana dimaksud ayat (3) hanya bisa dilakukan atas dasar surat permintaan perubahan data kontrak dari PPK.
- (6) Surat permintaan perubahan data kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 30

- (1) Pembatalan data kontrak dilakukan berdasarkan surat permintaan dari PPK terhadap sisa kontrak yang belum dibayarkan.

1

- (2) PPK mengajukan surat permintaan pembatalan data kontrak ke KPPN dalam hal:
 - a. terdapat keputusan kontrak oleh PPK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - b. diperlukan pembatalan dalam rangka perubahan data kontrak yang menyebabkan perubahan struktur data kontrak yang telah tercatat pada SPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4); atau
 - c. terjadi revisi DIPA sehingga diperlukan pembatalan pencadangan dana.
- (3) Surat permintaan pembatalan data kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) KPPN melakukan *review* atas kesesuaian surat permintaan pembatalan data kontrak dengan data kontrak yang telah tercatat pada SPAN.
- (5) Berdasarkan surat permintaan pembatalan data kontrak dan hasil *review*, KPPN melakukan:
 - a. pembatalan data kontrak dengan menggunakan *user* khusus yang telah disediakan pada aplikasi SPAN dan menerbitkan informasi pembatalan kontrak; atau
 - b. penolakan dan menerbitkan informasi penolakan pembatalan data kontrak.
- (6) Informasi pembatalan data kontrak atau informasi penolakan pembatalan data kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Satker.
- (7) Dalam rangka pengelolaan cadangan pagu DIPA terkait berakhirnya tahun anggaran, KPPN dapat melakukan pembatalan data kontrak tanpa permintaan dari PPK.

Pasal 31

- (1) KPPN melakukan penutupan data kontrak tahunan dan data komitmen tahunan kontrak tahun jamak pada akhir tahun anggaran.
- (2) Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menetapkan penutupan data kontrak selain pada waktu sebagaimana diatur pada ayat (1) dengan Surat Keputusan.

Pasal 32

- (1) KPPN mencetak Kartu Pengawasan Kontrak yang memuat data kontrak dan pembayaran pelunasan kontrak melalui aplikasi SPAN.

- (2) Kartu Pengawasan Kontrak dibuat untuk:
 - a. data kontrak tahunan;
 - b. data kontrak tahun jamak dan komitmen tahunan kontrak tahun jamak yang terkait;
- (3) Format Kartu Pengawasan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Format Kartu Pengawasan Kontrak yang dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk seluruh data kontrak yang dicatat dalam SPAN termasuk kontrak yang dicatat secara konsorsium.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2013

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


d MARWANTO HARJOWIRYONO

d

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
 NOMOR PER-58/PB/2013 TENTANG PENGELOLAAN DATA
 SUPPLIER DAN DATA KONTRAK DALAM SISTEM
 PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

RINCIAN KODE DAN NAMA TIPE SUPPLIER DALAM APLIKASI SPAN

KODE TIPE SUPPLIER	NAMA TIPE SUPPLIER	JENIS TRANSAKSI
1	SATKER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transaksi yang dibayarkan langsung kepada bendahara pengeluaran satuan kerja. ▪ Transaksi terkait pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme UP dan pengesahan.
2	PENYEDIA BARANG DAN JASA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transaksi atas pekerjaan berdasarkan kontrak atau dokumen perikatan lainnya yang dibayarkan kepada pihak ketiga. ▪ Transaksi belanja non kontraktual yang dibayarkan dengan mekanisme langsung. Contohnya pembayaran belanja langganan daya dan jasa yang dibayarkan dengan mekanisme langsung.
3	PEGAWAI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transaksi Belanja Pegawai yang dibayarkan kepada satu atau beberapa penerima, yang merupakan pegawai dari Satuan Kerja yang mengajukan tagihan.
4	BABUN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transaksi terkait pengelolaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN), kecuali yang dikelompokkan ke dalam tipe 5 dan tipe 6.
5	TRANSFER DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transaksi belanja transfer daerah yang dibayarkan kepada satu atau beberapa penerima.
6	PENERUSAN PINJAMAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transaksi terkait penerusan pinjaman, pembayaran konsorsium, dan bantuan sosial. ▪ Transaksi konsorsium yang dimaksud adalah pembayaran yang ditujukan langsung kepada masing-masing anggota. ▪ Pembayaran secara langsung kepada penerima yang bukan pegawai dari Satuan Kerja yang mengajukan tagihan (dengan menggunakan rekening selain yang dipakai untuk pembayaran gaji/honor/lembur sebagaimana dalam tipe 3).
7	LAIN-LAIN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transaksi terkait pengembalian belanja, pengembalian pendapatan dan tipe lainnya yang tidak termasuk dalam tipe sebelumnya.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


 1 MARWANTO HARJOWIRYONO 

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
 NOMOR PER- 58 /PB/2013 TENTANG PENGELOLAAN DATA
 SUPPLIER DAN DATA KONTRAK DALAM SISTEM
 PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

RINCIAN ELEMEN DATA SUPPLIER

1. SUPPLIER SATUAN KERJA

NO	NAMA KOLOM	DATA YANG DIISIKAN	CONTOH PENGISIAN
INFORMASI POKOK			
1	nama supplier*	Nama satker	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
2	NPWP*	NPWP bendahara pengeluaran satker	000118828075000
3	no supplier	Tidak diisi (Akan terisi otomatis oleh sistem)	1,2,3 dst
4	kode satker*	Kode satker	527010
INFORMASI LOKASI			
5	nama site*	Kombinasi kode tipe supplier_kode pos (Terisi otomatis oleh sistem)	i_10270
6	kode negara*	Kode negara alamat penerima pembayaran	ID
7	kode kppn*	Kode Kantor Bayar (Terisi otomatis oleh sistem)	019, 140, dll
8	alamat1*	Alamat dari data pada "nama supplier"	Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
9	alamat2	Kolom tambahan jika panjang karakter alamat1 belum mencukupi	Gedung Prijadi 3
10	Kota	Nama kota dari alamat supplier	Jakarta Pusat
11	Propinsi	Nama provinsi dari alamat supplier	DKI Jakarta
12	Email	email milik "nama supplier" pada informasi pokok supplier	kanpus@perbendaharaan.go.id
13	no telpon	nomor telepon milik nama supplier pada informasi pokok supplier	02178945612
14	kode pos*	Kode pos alamat supplier	10270
15	kode tipe supplier*	tipe supplier SPAN sesuai jenis transaksi yang dilakukan	1
INFORMASI REKENING			
16	kode negara asal bank *	Kode negara bank dimana rekening terdaftar	ID
17	kode bank*(hanya jika kode negara asal bank adalah Indonesia)	Kode bank sesuai dengan standar BI	520002000990
18	nama bank*	Nama bank sesuai dengan standar BI	BANK RAKYAT INDONESIA

NO	NAMA KOLOM	DATA YANG DIISIKAN	CONTOH PENGISIAN
19	kode swift*(hanya jika kode negara bank selain Indonesia)	Diisikan jika ada (khusus bank luar negeri)	
20	nama cabang bank*	Diisikan "INDONESIA" untuk bank di Indonesia; atau diisikan nama cabang bank (teks bebas) untuk bank di luar Indonesia	INDONESIA
21	alamat bank	alamat dari bank dimana rekening supplier berada	Jalan Wahidin II Lapangan Banteng Jakarta Pusat
22	nama pemilik rekening*	Nama rekening sebagaimana dicatat oleh bank pada buku tabungan/rekening Koran	BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
23	no rekening*	nomor rekening yang menjadi tujuan pembayaran, tanpa tanda baca dan/atau spasi (titik, strip)	00123456789
24	IBAN	Diisikan jika ada (khusus bank luar negeri)	
25	mata uang*	mata uang rekening yang menjadi tujuan pembayaran	IDR
26	detail nama cabang bank	nama cabang bank	CABANG WAHIDIN
INFORMASI TAMBAHAN REKENING			
27	nama pegawai/pemda/penerusan pinjaman	Tidak perlu diisi	
28	NPWP	Tidak perlu diisi	
29	NIP	Tidak perlu diisi	
30	lokasi	Tidak perlu diisi	
31	alamat1	Tidak perlu diisi	
32	alamat2	Tidak perlu diisi	
33	kota	Tidak perlu diisi	
34	propinsi	Tidak perlu diisi	
35	kode pos	Tidak perlu diisi	
36	kode negara	Tidak perlu diisi	

*=harus diisi

2. SUPPLIER PENYEDIA BARANG DAN JASA

NO	NAMA KOLOM	DATA YANG DIISIKAN	CONTOH PENGISIAN
INFORMASI POKOK			
1	Nama supplier*	Nama penerima pembayaran/ pihak ketiga	CV LINTANG PERKASA
2	NPWP*	NPWP penerima pembayaran	010016293051000
3	no supplier	Tidak diisi (Akan terisi otomatis oleh sistem)	1,2,3 dst
4	kode satker	Tidak perlu diisi	

NO	NAMA KOLOM	DATA YANG DIISIKAN	CONTOH PENGISIAN
INFORMASI LOKASI			
5	nama site*	Kombinasi kode tipe supplier_kode pos (Terisi otomatis oleh sistem)	2_10270
6	kode negara*	Kode negara alamat penerima pembayaran	ID
7	kode kppn*	Kode Kantor Bayar (Terisi otomatis oleh sistem)	019, 140, dll
8	alamat1*	Alamat dari data pada "nama supplier"	Jalan Trunojoyo Blok M 1/101 Kebayoran Baru
9	alamat2	Kolom tambahan jika panjang karakter alamat1 belum mencukupi	
10	Kota	Nama kota dari alamat supplier	Jakarta Selatan
11	Propinsi	Nama provinsi dari alamat supplier	DKI Jakarta
12	Email	email milik "nama supplier" pada informasi pokok supplier	lintangpks@gmail.com
13	no telpon	nomor telepon milik nama supplier pada informasi pokok supplier	02198745456
14	kode pos*	Kode pos alamat supplier	12160
15	kode tipe supplier*	tipe supplier SPAN sesuai jenis transaksi yang dilakukan	2
INFORMASI REKENING			
16	kode negara asal bank *	Kode negara bank dimana rekening terdaftar	ID
17	kode bank*(hanya jika kode negara asal bank adalah Indonesia)	Kode bank sesuai dengan standar BI	523019000990
18	nama bank*	Nama bank sesuai dengan standar BI	BANK PANIN
19	kode swift*(hanya jika kode negara bank selain Indonesia)	Diisikan jika ada (khusus bank luar negeri)	
20	nama cabang bank*	Diisikan "INDONESIA" untuk bank di Indonesia; atau diisikan nama cabang bank (teks bebas) untuk bank di luar Indonesia	INDONESIA
21	alamat bank	alamat dari bank dimana rekening supplier berada	Kebayoran Baru
22	nama pemilik rekening*	Nama rekening sebagaimana dicatat oleh bank pada buku tabungan/rekening Koran	CV LINTANG PERKASA

7

NO	NAMA KOLOM	DATA YANG DIISI	CONTOH PENGISIAN
23	no rekening*	nomor rekening yang menjadi tujuan pembayaran, tanpa tanda baca dan/atau spasi (titik, strip)	00123456789
24	IBAN	Diisikan jika ada (khusus bank luar negeri)	
25	mata uang*	mata uang rekening yang menjadi tujuan pembayaran	IDR
26	detail nama cabang bank	nama cabang bank	Cabang Kebayoran Baru
INFORMASI TAMBAHAN REKENING			
27	nama pegawai/pemda/penerusan pinjaman	Tidak perlu diisi	
28	NPWP	Tidak perlu diisi	
29	NIP	Tidak perlu diisi	
30	lokasi	Tidak perlu diisi	
31	alamat1	Tidak perlu diisi	
32	alamat2	Tidak perlu diisi	
33	kota	Tidak perlu diisi	
34	propinsi	Tidak perlu diisi	
35	kode pos	Tidak perlu diisi	
36	kode negara	Tidak perlu diisi	

*= harus diisi

3. SUPPLIER PEGAWAI

NO	NAMA KOLOM	DATA YANG DIISI	CONTOH PENGISIAN
INFORMASI POKOK			
1	nama supplier*	Nama satker	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
2	NPWP*	NPWP bendahara pengeluaran satker	000118828075000
3	no supplier	Tidak diisi (Akan terisi otomatis oleh sistem)	1,2,3 dst
4	kode satker*	Kode satker	527010
INFORMASI LOKASI			
5	nama site*	Kombinasi kode tipe supplier_kode pos (Terisi otomatis oleh sistem)	3_10270
6	kode negara*	Kode negara alamat penerima pembayaran	ID
7	kode kppn*	Kode Kantor Bayar (Terisi otomatis oleh sistem)	019, 140, dll
8	alamat1*	Alamat dari data pada "nama supplier"	Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
9	alamat2	Kolom tambahan jika panjang karakter alamat1 belum mencukupi	Gedung Prijadi 3
10	Kota	Nama kota dari alamat supplier	Jakarta Pusat
11	Propinsi	Nama provinsi dari alamat supplier	DKI Jakarta

d

NO	NAMA KOLOM	DATA YANG DIISIKAN	CONTOH PENGISIAN
12	Email	email milik “nama supplier” pada informasi pokok supplier	kanpus@perbendaharaan.go.id
13	no telpon	nomor telepon milik nama supplier pada informasi pokok supplier	02178945612
14	kode pos*	Kode pos alamat supplier	10270
15	kode tipe supplier*	tipe supplier SPAN sesuai jenis transaksi yang dilakukan	3
INFORMASI REKENING			
16	kode negara asal bank *	Kode negara bank dimana rekening terdaftar	ID
17	kode bank*(hanya jika kode negara asal bank adalah Indonesia)	Kode bank sesuai dengan standar BI	520002000990
18	nama bank*	Nama bank sesuai dengan standar BI	BANK RAKYAT INDONESIA
19	kode swift*(hanya jika kode negara bank selain Indonesia)	Diisikan jika ada (khusus bank luar negeri)	
20	nama cabang bank*	Diisikan “INDONESIA” untuk bank di Indonesia; atau diisikan nama cabang bank (teks bebas) untuk bank di luar Indonesia	INDONESIA
21	alamat bank	alamat dari bank dimana rekening supplier berada	Jalan Wahidin II Lapangan Banteng Jakarta Pusat
22	nama pemilik rekening*	Nama rekening sebagaimana dicatat oleh bank pada buku tabungan/rekening Koran	ARYA SUBUR S
23	no rekening*	nomor rekening yang menjadi tujuan pembayaran, tanpa tanda baca dan/atau spasi (titik, strip)	00123456789
24	IBAN	Diisikan jika ada (khusus bank luar negeri)	
25	mata uang*	mata uang rekening yang menjadi tujuan pembayaran	IDR
26	detail nama cabang bank	nama cabang bank	CABANG WAHIDIN
INFORMASI TAMBAHAN REKENING			
27	nama pegawai/pemda/penerusan pinjaman*	Nama pegawai	ARYA SUBUR S
28	NPWP*	NPWP pegawai	023659874051236
29	NIP*	NIP pegawai	198006092010121001
30	lokasi	Tidak perlu diisi	
31	alamat1	Tidak perlu diisi	
32	alamat2	Tidak perlu diisi	
33	kota	Tidak perlu diisi	

1

NO	NAMA KOLOM	DATA YANG DIISIKAN	CONTOH PENGISIAN
34	propinsi	Tidak perlu diisi	
35	kode pos	Tidak perlu diisi	
36	kode negara	Tidak perlu diisi	

*= harus diisi

4. SUPPLIER BABUN

NO	NAMA KOLOM	DATA YANG DIISIKAN	CONTOH PENGISIAN
INFORMASI POKOK			
1	nama supplier*	Nama penerima pembayaran/ pihak ketiga	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT
2	NPWP*	NPWP penerima pembayaran	000000000051000
3	no supplier	Tidak diisi (Akan terisi otomatis oleh sistem)	1,2,3 dst
4	kode satker	Tidak perlu diisi	
INFORMASI LOKASI			
5	nama site*	Kombinasi kode tipe supplier_kode pos (Terisi otomatis oleh sistem)	4_10270
6	kode negara*	Kode negara alamat penerima pembayaran	FR
7	kode kppn*	Kode Kantor Bayar (Terisi otomatis oleh sistem)	140
8	alamat1*	Alamat dari data pada "nama supplier"	5 RUE ROLAND BARTHES75598 PARIS CEDEX 12
9	alamat2	Kolom tambahan jika panjang karakter alamat1 belum mencukupi	
10	Kota	Nama kota dari alamat supplier	
11	Propinsi	Nama provinsi dari alamat supplier	
12	Email	email milik "nama supplier" pada informasi pokok supplier	
13	no telpon	nomor telepon milik nama supplier pada informasi pokok supplier	+33153443131
14	kode pos*	Kode pos alamat supplier	75598
15	kode tipe supplier*	tipe supplier SPAN sesuai jenis transaksi yang dilakukan	4
INFORMASI BANK			
16	kode negara asal bank *	Kode negara bank dimana rekening terdaftar	FR
17	kode bank*(hanya jika kode negara asal bank adalah Indonesia)	Kode bank sesuai dengan standar BI	
18	nama bank*	Nama bank sesuai dengan standar BI	CALYON PARIS

NO	NAMA KOLOM	DATA YANG DIISIKAN	CONTOH PENGISIAN
19	kode swift*(hanya jika kode negara bank selain Indonesia)	Diisikan jika ada (khusus bank luar negeri)	BSUIFRPP
20	nama cabang bank*	Diisikan "INDONESIA" untuk bank di Indonesia; atau diisikan nama cabang bank (teks bebas) untuk bank di luar Indonesia	PARIS
21	alamat bank	alamat dari bank dimana rekening supplier berada	
22	nama pemilik rekening*	Nama rekening sebagaimana dicatat oleh bank pada buku tabungan/rekening Koran	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT
23	no rekening*	nomor rekening yang menjadi tujuan pembayaran	0022656028147
24	IBAN	Diisikan jika ada (khusus bank luar negeri)	FR7631489000100022656028 147
25	mata uang*	mata uang rekening yang menjadi tujuan pembayaran	USD
26	detail nama cabang bank	nama cabang bank	
INFORMASI TAMBAHAN REKENING			
27	nama pegawai/pemda/penerusan pinjaman	Tidak perlu diisi	
28	NPWP	Tidak perlu diisi	
29	NIP	Tidak perlu diisi	
30	lokasi	Tidak perlu diisi	
31	alamat1	Tidak perlu diisi	
32	alamat2	Tidak perlu diisi	
33	kota	Tidak perlu diisi	
34	propinsi	Tidak perlu diisi	
35	kode pos	Tidak perlu diisi	
36	kode negara	Tidak perlu diisi	

*= harus diisi

5. SUPPLIER TRANSFER DAERAH

NO	NAMA KOLOM	DATA YANG DIISIKAN	CONTOH PENGISIAN
INFORMASI POKOK			
1	nama supplier*	Nama satker transfer daerah	TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
2	NPWP*	NPWP satker transfer daerah	000000000052000
3	no supplier	Tidak diisi (Akan terisi otomatis oleh sistem)	1,2,3 dst
4	kode satker*	Tidak perlu diisi	
INFORMASI LOKASI			
5	nama site*	Kombinasi kode tipe supplier_kode pos (Terisi otomatis oleh sistem)	5_00000

A

NO	NAMA KOLOM	DATA YANG DIISIKAN	CONTOH PENGISIAN
6	kode negara*	Kode negara alamat penerima pembayaran	ID
7	kode kppn*	Kode Kantor Bayar (Terisi otomatis oleh sistem)	019
8	alamat1*	Alamat dari data pada "nama supplier"	JAKARTA
9	alamat2	Kolom tambahan jika panjang karakter alamat1 belum mencukupi	
10	Kota	Nama kota dari alamat supplier	
11	Propinsi	Nama provinsi dari alamat supplier	
12	Email	email milik "nama supplier" pada informasi pokok supplier	
13	no telpon	nomor telepon milik nama supplier pada informasi pokok supplier	
14	kode pos*	Kode pos alamat supplier	00000
15	kode tipe supplier*	tipe supplier SPAN sesuai jenis transaksi yang dilakukan	5
INFORMASI REKENING			
16	kode negara asal bank *	Kode negara bank dimana rekening terdaftar	ID
17	kode bank*(hanya jika kode negara asal bank adalah Indonesia)	Kode bank sesuai dengan standar BI	520009000990
18	nama bank*	Nama bank sesuai dengan standar BI	BANK NEGARA INDONESIA
19	kode swift*(hanya jika kode negara bank selain Indonesia)	Diisikan jika ada (khusus bank luar negeri)	
20	nama cabang bank*	Diisikan "INDONESIA" untuk bank di Indonesia; atau diisikan nama cabang bank (teks bebas) untuk bank di luar Indonesia	INDONESIA
21	alamat bank	alamat dari bank dimana rekening supplier berada	
22	nama pemilik rekening*	Nama rekening sebagaimana dicatat oleh bank pada buku tabungan/rekening Koran	REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN KEP. ANAMBAS
23	no rekening*	nomor rekening yang menjadi tujuan pembayaran (tanpa tanda baca/spasi)	00695698562301
24	IBAN	Diisikan jika ada (khusus bank luar negeri)	

M

NO	NAMA KOLOM	DATA YANG DIISI	CONTOH PENGISIAN
25	mata uang*	mata uang rekening yang menjadi tujuan pembayaran	IDR
26	detail nama cabang bank	nama cabang bank	CAPEM TAREMPA NATUNA
INFORMASI TAMBAHAN REKENING			
27	nama pegawai/pemda/penerusan pinjaman*	Nama Pemerintah Daerah	KAB. ANAMBAS
28	NPWP*	NPWP Pemerintah daerah	023650235023659
29	NIP	Tidak perlu diisi	
30	Lokasi*	Kode lokasi Pemda	3205
31	alamat1	Tidak perlu diisi	
32	alamat2	Tidak perlu diisi	
33	kota	Tidak perlu diisi	
34	propinsi	Tidak perlu diisi	
35	kode pos	Tidak perlu diisi	
36	kode negara	Tidak perlu diisi	

*=harus diisi

6. SUPPLIER PENERUSAN PINJAMAN

NO	NAMA KOLOM	DATA YANG DIISI	CONTOH PENGISIAN
INFORMASI POKOK			
1	nama supplier*	Nama Pengguna Dana (transaksi penerusan pinjaman)/nama konsorsium (transaksi konsorsium)/nama program bantuan sosial (transaksi bantuan sosial)	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO)
2	NPWP*	NPWP Pengguna Dana (transaksi penerusan pinjaman)/ NPWP konsorsium (transaksi konsorsium)	10000511051000
3	no supplier	Tidak diisi (Akan terisi otomatis oleh sistem)	1,2,3 dst
4	kode satker	Tidak perlu diisi	
INFORMASI LOKASI			
5	nama site*	Kombinasi kode tipe supplier_kode pos (Terisi otomatis oleh sistem)	6_10270
6	kode negara*	Kode negara alamat penerima pembayaran	ID
7	kode kppn*	Kode Kantor Bayar (Terisi otomatis oleh sistem)	019, 140, dll
8	alamat1*	Alamat dari data pada "nama supplier"	Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20
9	alamat2	Kolom tambahan jika panjang karakter alamat1 belum mencukupi	
10	Kota	Nama kota dari alamat supplier	Jakarta Barat
11	Propinsi	Nama provinsi dari alamat supplier	DKI Jakarta
12	Email	email milik "nama supplier" pada informasi pokok supplier	email@pgn.co.id
13	no telpon	nomor telepon milik nama supplier pada informasi pokok supplier	02156987423

NO	NAMA KOLOM	DATA YANG DIISIKAN	CONTOH PENGISIAN
14	kode pos*	Kode pos alamat supplier	11140
15	kode tipe supplier*	tipe supplier SPAN sesuai jenis transaksi yang dilakukan	6
INFORMASI REKENING			
16	kode negara asal bank *	kode negara sesuai referensi negara (2 digit)	JP
17	kode bank*(hanya jika kode negara asal bank adalah Indonesia)	Kode negara bank dimana rekening terdaftar	
18	nama bank*	nama bank sesuai dengan referensi kode bank	BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD.
19	kode swift*(hanya jika kode negara bank selain Indonesia)	Diisikan jika ada (khusus bank luar negeri)	BOTKJPJTNGY
20	nama cabang bank*	Isikan cabang bank	NAGOYA BRANCH
21	alamat bank	alamat dari bank dimana rekening pihak ketiga berada	
22	nama rekening* pemilik	nama rekening sebagaimana dicatat oleh bank milik pihak ketiga/penerima penerusan pinjaman	JAPAN OIL ENGINEERING CO. LTD.
23	no rekening*	nomor rekening yang menjadi tujuan pembayaran, tanpa tanda baca dan/atau spasi (titik, strip)	00123456789
24	IBAN	Diisikan jika ada (khusus bank luar negeri)	
25	mata uang*	mata uang rekening yang menjadi tujuan pembayaran	JPY
26	detail nama cabang bank	nama cabang bank	
INFORMASI TAMBAHAN REKENING			
27	nama pegawai/pemda/penerusan pinjaman*	Nama pihak ketiga penerima penerusan pinjaman	JAPAN OIL ENGINEERING CO. LTD.
28	NPWP*	NPWP pihak ketiga penerima penerusan pinjaman	025894512053269
29	NIP	Tidak perlu diisi	
30	lokasi	Tidak perlu diisi	
31	alamat1*	Alamat dari data pada "nama supplier"	NAGOYA
32	alamat2	Kolom tambahan jika panjang karakter alamat1 belum mencukupi	
33	Kota*	Nama kota dari alamat penerima penerusan pinjaman	NAGOYA
34	propinsi	Nama provinsi dari alamat penerima penerusan pinjaman	
35	kode pos	Kode pos alamat penerima penerusan pinjaman	00000
36	kode negara*	Kode negara alamat penerima penerusan pinjaman	JP

*= harus diisi

1

7. SUPPLIER LAIN-LAIN

NO	NAMA KOLOM	DATA YANG DIISIKAN	CONTOH PENGISIAN
INFORMASI POKOK			
1	nama supplier*	Nama penerima pembayaran/pihak ketiga	PT KARUNIA BAHARI
2	NPWP*	NPWP penerima pembayaran	01456326123051236
3	no supplier	Tidak diisi (Akan terisi otomatis oleh sistem)	1,2,3 dst
4	kode satker	Tidak perlu diisi	
INFORMASI LOKASI			
5	nama site*	Kombinasi kode tipe supplier_kode pos (Terisi otomatis oleh sistem)	7_10270
6	kode negara*	Kode negara alamat penerima pembayaran	ID
7	kode kppn*	Kode Kantor Bayar (Terisi otomatis oleh sistem)	019, 140, dll
8	alamat1*	Alamat dari data pada "nama supplier"	JL. RE Martadinata Nomor 5 B Ancol
9	alamat2	Kolom tambahan jika panjang karakter alamat1 belum mencukupi	
10	Kota	Nama kota dari alamat supplier	Jakarta Utara
11	Propinsi	Nama provinsi dari alamat supplier	DKI Jakarta
12	Email	email milik "nama supplier" pada informasi pokok supplier	surat@kbh.co.id
13	no telpon	nomor telepon milik nama supplier pada informasi pokok supplier	02198765123
14	kode pos*	Kode pos alamat supplier	13656
15	kode tipe supplier*	tipe supplier SPAN sesuai jenis transaksi yang dilakukan	7
INFORMASI REKENING			
16	kode negara asal bank *	Kode negara bank dimana rekening terdaftar	ID
17	kode bank*(hanya jika kode negara asal bank adalah Indonesia)	Kode bank sesuai dengan standar BI	525111000990
18	nama bank*	Nama bank sesuai dengan standar BI	BPD DKI SYARIAH
19	kode swift*(hanya jika kode negara bank selain Indonesia)	Diisikan jika ada (khusus bank luar negeri)	
20	nama cabang bank*	Diisikan "INDONESIA" untuk bank di Indonesia; atau diisikan nama cabang bank (teks bebas) untuk bank di luar Indonesia	INDONESIA
21	alamat bank	alamat dari bank dimana rekening supplier berada	Jalan Martadinata 56 Jakarta Utara
22	nama rekening* pemilik	Nama rekening sebagaimana dicatat oleh bank pada buku tabungan/rekening koran	PT KARUNIA BAHARI

1

NO	NAMA KOLOM	DATA YANG DIISIKAN	CONTOH PENGISIAN
23	no rekening*	nomor rekening yang menjadi tujuan pembayaran, tanpa tanda baca dan/atau spasi (titik, strip)	00123456789
24	IBAN	Diisikan jika ada (khusus bank luar negeri)	
25	mata uang*	mata uang rekening yang menjadi tujuan pembayaran	IDR
26	detail nama cabang bank	nama cabang bank	CABANG ANCOL 1
INFORMASI TAMBAHAN REKENING			
27	nama pegawai/pemda/penerusan pinjaman	Tidak perlu diisi	
28	NPWP	Tidak perlu diisi	
29	NIP	Tidak perlu diisi	
30	lokasi	Tidak perlu diisi	
31	alamat1	Tidak perlu diisi	
32	alamat2	Tidak perlu diisi	
33	kota	Tidak perlu diisi	
34	propinsi	Tidak perlu diisi	
35	kode pos	Tidak perlu diisi	
36	kode negara	Tidak perlu diisi	

*= harus diisi

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO

1

LAMPIRAN III

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
 NOMOR PER- 58/PB/2013 TENTANG PENGELOLAAN DATA
 SUPPLIER DAN DATA KONTRAK DALAM SISTEM
 PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

CONTOH PENGISIAN ELEMEN DATA SUPPLIER UNTUK TRANSAKSI KONSORSIUM

Dicontohkan terdapat sebuah kontrak dengan dua perusahaan yang akan melakukan pekerjaan. Kedua perusahaan tersebut tidak membentuk suatu konsorsium/perusahaan patungan, tidak juga menunjuk salah satu sebagai penerima pembayaran, akan tetapi menginginkan pembayaran tetap ke masing-masing perusahaan.

Maka satuan kerja mendaftarkan *supplier* untuk kontrak tersebut dalam suatu ADK dimana terdapat dua *supplier* dengan informasi pokok dan informasi alamat yang sama. Perbedaannya terletak pada informasi rekening, dimana penerima pertama adalah informasi rekening perusahaan pertama, sedangkan informasi rekening penerima kedua adalah informasi rekening perusahaan kedua. Contoh pengisian data *supplier* konsorsium tersebut adalah sebagai berikut:

Penerima 1

NAMA KOLOM	KETERANGAN PENGISIAN	CONTOH ISIAN
nama <i>supplier</i> *	Diisikan "KONSORSIUM/Nomor Kontrak"	KONSORSIUM/KONT-123/SATKER/2013
NPWP*	NPWP Dummy	00000000052000
no <i>supplier</i>	Tidak diisi (terisi otomatis oleh sistem)	
kode satker	Tidak perlu diisi	
nama site*	kombinasi kode tipe <i>supplier</i> kode pos (terisi otomatis oleh sistem)	6_12345
kode negara*	kode negara sesuai referensi negara (2 digit)	ID
kode kppn*	3 digit kode KPPN sesuai Referensi Kode KPPN (terisi otomatis oleh sistem)	088
alamat1*	Diisikan alamat dari <i>supplier</i> pada <i>header supplier</i>	JAKARTA
alamat2	Kolom tambahan jika panjang karakter alamat1 belum mencukupi	
Kota	Nama kota dari alamat <i>supplier</i>	
Propinsi	Nama provinsi dari alamat <i>supplier</i>	DKI JAKARTA
Email	email milik nama <i>supplier</i> pada <i>header supplier</i>	
no telpon	nomor telepon milik nama <i>supplier</i> pada <i>header supplier</i>	
kode pos*	Kode pos alamat <i>supplier</i>	12345
kode tipe <i>supplier</i> *	Gunakan tipe <i>supplier</i> untuk konsorsium	6
kode negara asal bank *	kode negara sesuai referensi negara (2 digit)	ID
kode bank*(hanya jika kode negara asal bank adalah Indonesia)	kode bank sesuai dengan referensi kode bank	520008000990

NAMA KOLOM	KETERANGAN PENGISIAN	CONTOH ISIAN
nama bank*	nama bank sesuai dengan referensi kode bank	BANK MANDIRI
kode swift*(hanya jika kode negara bank <u>selain</u> Indonesia)	Diisikan untuk bank di luar Indonesia	
nama cabang bank*	INDONESIA (bank dalam Indonesia), <i>Freetext</i> (bank luar Indonesia)	INDONESIA
alamat bank	alamat dari bank dimana rekening <i>supplier</i> berada	Jalan Salemba Raya 73C
nama pemilik rekening*	nama rekening penerima pertama	PT SINAR BUANA
no rekening*	nomor rekening yang menjadi tujuan pembayaran	123456789
IBAN	Diisikan untuk bank di luar Indonesia	
mata uang*	mata uang rekening yang menjadi tujuan pembayaran	IDR
detail nama cabang bank	nama cabang bank	Cabang Salemba
nama pegawai/pemda/penerusan pinjaman*	Nama penerima pertama	PT SINAR BUANA
NPWP*	NPWP penerima pertama	02369852653210
NIP		
Lokasi		
alamat1*	alamat1 penerima pertama	Jalan Kramat Lontar 2
alamat2	alamat2 penerima pertama	
Kota*	Kota penerima pertama	Jakarta Pusat
Propinsi	Propinsi penerima pertama	DKI Jakarta
kode pos	kode pos penerima pertama	10278
kode negara*	Kode negara alamat penerima pertama	ID

*=harus diisi

Penerima 2

NAMA KOLOM	KETERANGAN PENGISIAN	CONTOH ISIAN
nama <i>supplier</i> *	Diisikan "KONSORSIUM/Nomor Kontrak"	KONSORSIUM/KONT-123/SATKER/2013
NPWP*	NPWP Dummy	000000000052000
no <i>supplier</i>	Tidak diisi (terisi otomatis oleh sistem)	
kode satker	Tidak perlu diisi	
nama site*	kombinasi kode tipe <i>supplier</i> kode pos (terisi otomatis oleh sistem)	6_12345
kode negara*	kode negara sesuai referensi negara (2 digit)	ID
kode kppn*	3 digit kode KPPN sesuai Referensi Kode KPPN (terisi otomatis oleh sistem)	088

1


NAMA KOLOM	KETERANGAN PENGISIAN	CONTOH ISIAN
alamat1*	Diisikan alamat dari <i>supplier</i> pada header <i>supplier</i>	JAKARTA
alamat2	Kolom tambahan jika panjang karakter alamat1 belum mencukupi	
Kota	Nama kota dari alamat <i>supplier</i>	
Propinsi	Nama provinsi dari alamat <i>supplier</i>	DKI JAKARTA
Email	email milik nama <i>supplier</i> pada header <i>supplier</i>	
no telpon	nomor telepon milik nama <i>supplier</i> pada header <i>supplier</i>	
kode pos*	Kode pos alamat <i>supplier</i>	12345
kode tipe <i>supplier</i> *	Gunakan tipe <i>supplier</i> untuk konsorsium	6
kode negara asal bank *	kode negara sesuai referensi negara (2 digit)	ID
kode bank*(hanya jika kode negara asal bank adalah Indonesia)	kode bank sesuai dengan referensi kode bank	523426000990
nama bank*	nama bank sesuai dengan referensi kode bank	BANK MEGA
kode swift*(hanya jika kode negara bank <u>selain</u> Indonesia)	Diisikan untuk bank di luar Indonesia	
nama cabang bank*	INDONESIA (bank dalam Indonesia), <i>Freetext</i> (bank luar Indonesia)	INDONESIA
alamat bank	alamat dari bank dimana rekening <i>supplier</i> berada	Jalan Suprpto 12
nama pemilik rekening*	nama rekening penerima kedua	PT KARYA GEMILANG
no rekening*	nomor rekening yang menjadi tujuan pembayaran	987654321
IBAN	Diisikan untuk bank di luar Indonesia	
mata uang*	mata uang rekening yang menjadi tujuan pembayaran	IDR
detail nama cabang bank	nama cabang bank	Cabang ITC Cempaka Mas
nama pegawai/pemda/penerusan pinjaman*	Nama penerima kedua	PT KARYA GEMILANG
NPWP*	NPWP penerima kedua	023659815053216
NIP		
Lokasi		
alamat1*	alamat1 penerima kedua	Jalan Kwitang Raya Blok VII No 2
alamat2	alamat2 penerima kedua	
Kota*	Kota penerima kedua	Jakarta Pusat
propinsi	Propinsi penerima kedua	DKI Jakarta

1

NAMA KOLOM	KETERANGAN PENGISIAN	CONTOH ISIAN
kode pos	kode pos penerima kedua	10275
kode negara*	Kode negara alamat penerima kedua	ID

*=harus diisi

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO

1

LAPORAN PENDAFTARAN SUPPLIER



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

1

Informasi Laporan	
Didaftarkan Oleh	: 2
Dilaporkan Oleh	: 3
Tanggal dan Jam	: 4

LAPORAN PENDAFTARAN SUPPLIER	KPPN	5
		6

SUPPLIER HEADER

SPAN No. Supplier : 7
 SPAN Nama Supplier : 8
 Nama Supplier : 9
 NPWP : 10

SUPPLIER SITE

Nama Site : 11
 Alamat1 : 12
 Alamat2 : 13
 Kota : 14
 Provinsi : 15
 Negara : 16
 Nomor Telepon : 17
 Email : 18
 Kode Pos : 19
 Tipe : 20

BANK ACCOUNT

No.	Kode Bank	No. Rekening	Nama Bank	Nama Cabang	Kode SWIFT	Pemilik Rekening	Mata Uang	Negara
21	22	23	24	25	26	27	28	29

ADDITIONAL BANK INFORMATION

No.	Nama	NPWP	NIP	Lokasi	Alamat	Kabupaten/Kota	Provinsi	Kode Pos	Negara
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

A



KETERANGAN ISIAN
LAPORAN PENDAFTARAN *SUPPLIER*

NO	KETERANGAN ISIAN
(1)	Berisi Identitas Instansi
(2)	Berisi pengguna (<i>user</i>) yang mendaftarkan data <i>supplier</i>
(3)	Berisi pengguna (<i>user</i>) yang melaporkan data <i>supplier</i>
(4)	Berisi tanggal dan jam penayangan laporan
(5)	Berisi kode KPPN tempat pembayaran
(6)	Berisi nama KPPN tempat pembayaran
(7)	Berisi Nomor Register <i>Supplier</i> (NRS) yang dikeluarkan oleh SPAN
(8)	Berisi Nama <i>Supplier</i> SPAN yang merupakan kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP
(9)	Berisi Nama <i>supplier</i>
(10)	Berisi NPWP <i>supplier</i>
(11)	Berisi Nama informasi alamat <i>supplier</i> yang terdiri dari tipe <i>supplier</i> dan kode pos
(12)	Berisi Alamat dari <i>supplier</i>
(13)	Berisi Kolom tambahan jika kolom alamat 1 belum mencukupi
(14)	Berisi Kota dari alamat <i>supplier</i>
(15)	Berisi Provinsi dari alamat <i>supplier</i>
(16)	Berisi Negara dari <i>supplier</i>
(17)	Berisi Nomor telepon <i>supplier</i>
(18)	Berisi Alamat email <i>supplier</i>
(19)	Berisi Kode pos <i>supplier</i>
(20)	Berisi Jenis tipe <i>supplier</i> SPAN
(21)	Berisi Nomor urut daftar rekening yang terkait dengan informasi pokok dan alamat <i>supplier</i>
(22)	Berisi Kode bank pada rekening tujuan pembayaran sesuai standar Bank Indonesia (untuk bank di Indonesia) atau tidak diisi (untuk bank di luar Indonesia)
(23)	Berisi Nomor rekening tujuan pembayaran
(24)	Berisi Nama bank pada rekening tujuan pembayaran sesuai standar Bank Indonesia (untuk bank di Indonesia) atau tidak diisi (untuk bank di luar Indonesia)
(25)	Berisi Nama Cabang Bank ("INDONESIA" untuk bank di Indonesia atau nama cabang (teks bebas) untuk bank di luar Indonesia)
(26)	Berisi kode cabang bank di luar Indonesia
(27)	Berisi Nama rekening sesuai buku tabungan atau rekening koran yang dikeluarkan oleh bank
(28)	Berisi kode mata uang rekening bank
(29)	Berisi negara dimana bank tersebut berada
(30)	Berisi nomor urut informasi tambahan rekening
(31)	Berisi nama pegawai (transaksi gaji) atau nama pemda (transaksi transfer daerah) atau nama pihak ketiga (transaksi penerusan pinjaman/konsorsium/bantuan sosial/pihak ketiga banyak penerima)
(32)	Berisi NPWP dari isian nomor (31)
(33)	Berisi Nomor Induk Pegawai (jika nomor (31) adalah nama pegawai untuk transaksi gaji)
(34)	Berisi informasi lokasi pemerintah daerah (jika nomor (31) adalah nama pemda untuk transaksi transfer daerah)

M

NO	KETERANGAN ISIAN
(35)	Berisi Alamat dari isian nomor (31)
(36)	Berisi Kabupaten/kota dari isian nomor (31)
(37)	Berisi Provinsi dari isian nomor (31)
(38)	Berisi Kode pos dari isian nomor (31)
(39)	Berisi Negara dari isian nomor (31)

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO 

1

LAPORAN PENOLAKAN INFORMASI SUPPLIER



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 1

Informasi Laporan	
Dilaporkan Oleh :	2
Tanggal Laporan :	3

LAPORAN PENOLAKAN INFORMASI SUPPLIER	KPPN	4
		5

IKHTISAR LAPORAN

Nama File :	6
Jenis Kegiatan :	7
Didaftarkan Oleh :	8
Ditolak Oleh :	9
Tanggal dan Jam Penolakan :	10
Alasan Penolakan :	11

SUPPLIER HEADER

No. Supplier :	12
SPAN Nama Supplier :	13
Nama Supplier :	14
NPWP :	15
Tanggal Non-Aktif :	16
Valid :	17

SUPPLIER SITE

Nama Site :	18
Alamat1 :	19
Alamat2 :	20
Kota :	21
Provinsi :	22
Negara :	23
No Telepon :	24
Email :	25
Kode Pos :	26
Tipe Supplier :	27
Tanggal Non Aktif :	28
Valid :	29

BANK ACCOUNT

No.	No Rekening	Kode Bank	Nama Bank	Nama Cabang	Kode SWIFT	Pemilik Rekening	Mata Uang	Negara	Valid
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

ADDITIONAL BANK INFORMATION

No.	Nama	NPWP	NIP	Lokasi	Alamat1	Alamat2	Kabupaten Kota	Provinsi	Kode Pos	Negara Attri	Tanggal Non Aktif
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

VALIDASI GAGAL

Level	Baris ADK	Kolom	Error
52	53	54	55

7

KETERANGAN ISIAN
LAPORAN PENOLAKAN INFORMASI *SUPPLIER*

NO	KETERANGAN ISIAN
(1)	Berisi Identitas Instansi
(2)	Berisi pengguna (<i>user</i>) yang melaporkan penolakan data <i>supplier</i>
(3)	Berisi tanggal laporan
(4)	Berisi kode KPPN tempat pembayaran
(5)	Berisi nama KPPN tempat pembayaran
(6)	Berisi nama file <i>supplier</i> yang diunggah ke dalam aplikasi SPAN
(7)	Berisi jenis kegiatan terkait informasi <i>supplier</i> (<i>supplier register, supplier update, dll</i>)
(8)	Berisi pengguna (<i>user</i>) yang mendaftarkan data informasi <i>supplier</i>
(9)	Berisi pengguna (<i>user</i>) yang menolak data informasi <i>supplier</i>
(10)	Berisi tanggal dan jam penolakan informasi <i>supplier</i>
(11)	Berisi alasan penolakan informasi <i>supplier</i>
(12)	Berisi Nomor Register <i>Supplier</i> (NRS)
(13)	Berisi nama <i>supplier</i> SPAN yang merupakan kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP
(14)	Berisi nama <i>supplier</i>
(15)	Berisi NPWP <i>supplier</i>
(16)	Berisi tanggal non aktif informasi pokok <i>supplier</i> (<i>supplier header</i>)
(17)	Berisi keterangan validitas informasi pokok <i>supplier</i> (valid/tidak valid)
(18)	Berisi nama informasi alamat <i>supplier</i> yang terdiri dari tipe <i>supplier</i> dan kode pos
(19)	Berisi Alamat dari <i>supplier</i>
(20)	Berisi kolom tambahan jika kolom alamat 1 belum mencukupi
(21)	Berisi kota dari alamat <i>supplier</i>
(22)	Berisi provinsi dari alamat <i>supplier</i>
(23)	Berisi negara dari <i>supplier</i>
(24)	Berisi nomor telepon <i>supplier</i>
(25)	Berisi alamat email <i>supplier</i>
(26)	Berisi kode pos <i>supplier</i>
(27)	Berisi jenis tipe <i>supplier</i> SPAN
(28)	Berisi tanggal non aktif informasi alamat <i>supplier</i> (<i>supplier site</i>)
(29)	Berisi keterangan validitas informasi alamat <i>supplier</i> (valid/tidak valid)
(30)	Berisi nomor urut daftar rekening yang terkait dengan informasi pokok dan alamat <i>supplier</i>
(31)	Berisi nomor rekening tujuan pembayaran
(32)	Berisi kode bank pada rekening tujuan pembayaran sesuai standar Bank Indonesia (untuk bank di Indonesia) atau tidak diisi (untuk bank di luar Indonesia)
(33)	Berisi nama bank pada rekening tujuan pembayaran sesuai standar Bank Indonesia (untuk bank di Indonesia) atau tidak diisi (untuk bank di luar Indonesia)
(34)	Berisi Nama Cabang Bank ("INDONESIA" untuk bank di Indonesia atau nama cabang (teks bebas) untuk bank di luar Indonesia)
(35)	Berisi kode cabang bank di luar Indonesia

NO	KETERANGAN ISIAN
(36)	Berisi Nama rekening sesuai buku tabungan atau rekening koran yang dikeluarkan oleh bank
(37)	Berisi kode mata uang rekening bank
(38)	Berisi negara dimana bank tersebut berada
(39)	Berisi keterangan validitas informasi rekening supplier (valid/tidak valid)
(40)	Berisi nomor urut informasi tambahan rekening
(41)	Berisi nama pegawai (transaksi gaji) atau nama pemda (transaksi transfer daerah) atau nama pihak ketiga (transaksi penerusan pinjaman/konsorsium/bantuan sosial/pihak ketiga banyak penerima)
(42)	Berisi NPWP dari isian nomor (41)
(43)	Berisi Nomor Induk Pegawai (jika nomor (41) adalah nama pegawai untuk transaksi gaji)
(44)	Berisi informasi lokasi pemerintah daerah (jika nomor (41) adalah nama pemda untuk transaksi transfer daerah)
(45)	Berisi alamat dari isian nomor (41)
(46)	Berisi kolom tambahan jika kolom alamat 1 belum mencukupi
(47)	Berisi kabupaten/kota dari isian nomor (41)
(48)	Berisi provinsi dari isian nomor (41)
(49)	Berisi kode pos dari isian nomor (41)
(50)	Berisi negara dari isian nomor (41)
(51)	Berisi tanggal non aktif informasi rekening <i>supplier</i> (bank account)
(52)	Berisi level informasi <i>supplier</i> (<i>supplier</i> /alamat/bank)
(53)	Berisi urutan baris pada ADK
(54)	Berisi nama kolom informasi <i>supplier</i> yang ditolak
(55)	Berisi keterangan/pesan <i>error</i> terkait informasi <i>supplier</i> yang ditolak

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


M MARWANTO HARJOWIRYONG A

M

FORMAT SURAT PERMINTAAN PENAMBAHAN DATA SUPPLIER

FORMAT SURAT PERMINTAAN PENAMBAHAN DATA SUPPLIER	
<KOP SURAT>..... (1)	
Nomor : (2) (5)
Hal : (3)	
Lampiran : (4)	
Yth. (6)	
..... (7)	
1. Dengan memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- /PB/2013 tentang Pengelolaan Data <i>Supplier</i> dan Data Kontrak Dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, dengan ini kami mengajukan permintaan penambahan informasi lokasi dan/atau informasi rekening pada supplier*): <ul style="list-style-type: none"> a. Nama <i>Supplier</i> : (8) b. Nomor Register <i>Supplier</i> : (9) c. NPWP : (10) 2. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan laporan pendaftaran <i>supplier</i> terakhir untuk melengkapi permintaan dimaksud. 3. Apabila di kemudian hari terdapat konsekuensi atas data yang kami sampaikan, maka kami menyatakan siap menanggung segala akibat dan tanggung jawab yang ditimbulkan oleh data yang kami sampaikan. 4. Demikian atas kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.	
Pejabat Pembuat Komitmen,	
(11)	
..... (12)	
..... (13)	
*) Pilih salah satu atau kedua-duanya	

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN PENAMBAHAN DATA *SUPPLIER*

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan kop instansi berkenaan.
(2)	Diisi dengan nomor surat.
(3)	Diisi dengan hal surat.
(4)	Diisi dengan jumlah lampiran berkenaan.
(5)	Diisi dengan tanggal pembuatan surat.
(6)	Diisi dengan Kepala KPPN tempat satuan kerja melakukan pembayaran.
(7)	Diisi dengan alamat KPPN berkenaan.
(8)	Diisi dengan nama <i>supplier</i> berkenaan.
(9)	Diisi dengan nomor register <i>supplier</i> berkenaan.
(10)	Diisi dengan NPWP <i>supplier</i> berkenaan.
(11)	Diisi dengan tandatangan Pejabat Pembuat Komitmen.
(12)	Diisi dengan Nama Lengkap Pejabat Pembuat Komitmen.
(13)	Diisi dengan NIP Pejabat Pembuat Komitmen.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


M MARWANTO HARJOWIRYONO A

FORMAT SURAT PERMINTAAN PERUBAHAN DATA SUPPLIER

FORMAT SURAT PERMINTAAN
 PERUBAHAN DATA SUPPLIER

<KOP SURAT>..... (1)

Nomor : (2) (5)
 Hal : (3)
 Lampiran : (4)

Yth. (6)
 (7)

1. Dengan memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
 /PB/2013 tentang Pengelolaan Data *Supplier* dan Data Kontrak Dalam Sistem
 Perbendaharaan dan Anggaran Negara, dengan ini kami mengajukan permintaan
 perubahan data *supplier*.

- a. Nama *Supplier* : (8)
- b. Nomor Register *Supplier* : (9)

2. Substansi perubahan data *supplier* dimaksud adalah sebagai berikut:

Data <i>Supplier</i> sebelum perubahan	Data <i>Supplier</i> setelah perubahan
Alamat: (10)	Alamat: (12)
Nama Pemilik Rekening : (11)	Nama Pemilik Rekening : (13)
.....dan lain-lain.dan lain-lain.

3. Sebagai bahan pertimbangan permintaan dimaksud, berikut kami lampirkan:

- a. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- b. Fotokopi Buku Rekening Bank untuk melengkapi; atau
- c. 14)

4. Apabila di kemudian hari terdapat konsekuensi atas data yang kami sampaikan,
 maka kami menyatakan siap menanggung segala akibat dan tanggung jawab yang
 ditimbulkan oleh data yang kami sampaikan.

5. Demikian atas kerjasama Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Pejabat Pembuat Komitmen,
 (15)

..... (16)
 (17)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN PERUBAHAN DATA *SUPPLIER*

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan kop instansi berkenaan.
(2)	Diisi dengan nomor surat.
(3)	Diisi dengan hal surat. (perubahan alamat <i>supplier</i> dan/atau nama pemilik rekening).
(4)	Diisi dengan jumlah lampiran berkenaan. (Lampiran berupa surat keterangan domisili <i>supplier</i> dan/atau fotokopi buku rekening <i>supplier</i>).
(5)	Diisi dengan tanggal pembuatan surat.
(6)	Diisi dengan Kepala KPPN tempat satuan kerja melakukan pembayaran.
(7)	Diisi dengan alamat KPPN berkenaan.
(8)	Diisi dengan nama <i>supplier</i> berkenaan.
(9)	Diisi dengan nomor register <i>supplier</i> berkenaan.
(10)	Diisi dengan alamat <i>supplier</i> sebelum perubahan data.
(11)	Diisi dengan nama pemilik rekening <i>supplier</i> sebelum perubahan data.
(12)	Diisi dengan alamat <i>supplier</i> setelah perubahan data.
(13)	Diisi dengan nama pemilik rekening <i>supplier</i> setelah perubahan data.
(14)	Diisi dengan nama lampiran sesuai perubahan data <i>supplier</i> berkenaan.
(15)	Diisi dengan tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen.
(16)	Diisi dengan nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen.
(17)	Diisi dengan NIP Pejabat Pembuat Komitmen.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO 

1

LAMPIRAN VIII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
 NOMOR PER- 58 /PB/2013 TENTANG PENGELOLAAN DATA
 SUPPLIER DAN DATA KONTRAK DALAM SISTEM
 PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

PERUBAHAN ELEMEN DATA SUPPLIER

NO	NAMA KOLOM	CARA MELAKUKAN PERUBAHAN
1.	Nama <i>Supplier</i>	Pendaftaran data baru dan penonaktifan data lama
2.	NPWP	Pendaftaran data baru dan penonaktifan data lama
3.	No <i>Supplier</i>	Tidak dapat diubah
4.	Kode Satker	Pendaftaran data baru dan penonaktifan data lama
5.	Nama Site	Pendaftaran data baru dan penonaktifan data lama
6.	Kode Negara	Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i>
7.	Kode Kppn	Tidak dapat diubah
8.	Alamat1	Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i>
9.	Alamat2	Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i>
10.	Kota	Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i>
11.	Propinsi	Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i>
12.	Email	Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i>
13.	No Telepon	Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i>
14.	Kode Pos	Pendaftaran data baru dan penonaktifan data lama
15.	Kode Tipe <i>Supplier</i>	Pendaftaran data baru dan penonaktifan data lama
16.	Kode Negara Asal Bank	Tidak dapat diubah
17.	Kode Bank	Pendaftaran data baru dan penonaktifan data lama
18.	Nama Bank	Tidak dapat diubah (untuk negara bank adalah Indonesia); Perubahan dengan <i>User Khusus Direktorat PKN</i> (khusus negara bank selain Indonesia)
19.	Kode Swift	Perubahan dengan <i>User Khusus Direktorat PKN</i> (khusus negara bank selain Indonesia)
20.	Nama Cabang Bank	Tidak dapat diubah (untuk negara bank adalah Indonesia); Perubahan dengan <i>User Khusus Direktorat PKN</i> (khusus negara bank selain Indonesia)
21.	Alamat Bank	Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i>
22.	Nama Pemilik Rekening	Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i>
23.	No Rekening	Tidak dapat diubah
24.	IBAN	Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i>
25.	Mata Uang	Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i>
26.	Detail nama cabang bank	Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i>
27.	Nama pegawai/ Pemda/penerusan pinjaman	Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i>
28.	NPWP	Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i>
29.	NIP	Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i>

M

NO	NAMA KOLOM	CARA MELAKUKAN PERUBAHAN
30.	Lokasi	Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i>
31.	Alamat1	Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i>
32.	Alamat2	Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i>
33.	Kota	Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i>
34.	Provinsi	Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i>
35.	Kode Pos	Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i>
36.	Kode Negara	Perubahan dengan <i>User Khusus KPPN</i>

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO 

LAMPIRAN IX

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-58/PB/2013 TENTANG PENGELOLAAN DATA SUPPLIER DAN DATA KONTRAK DALAM SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

LAPORAN PERUBAHAN INFORMASI SUPPLIER



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 1

Informasi Laporan	
Didaftarkan Oleh	2
Dilaporkan Oleh	3
Tanggal dan Jam	4

LAPORAN PERUBAHAN INFORMASI SUPPLIER	KPPN	5
		6

SUPPLIER HEADER			
Data Awal		Perubahan	
SPAN No Supplier	7	SPAN No Supplier	11
SPAN Nama Supplier	8	SPAN Nama Supplier	12
Nama Supplier	9	Nama Supplier	13
NPWP	10	NPWP	14

SUPPLIER SITE			
Data Awal		Perubahan	
Nama Site	15	Nama Site	25
Alamat1	16	Alamat1	26
Alamat2	17	Alamat2	27
Kota	18	Kota	28
Provinsi	19	Provinsi	29
Negara	20	Negara	30
Nomor Telepon	21	Nomor Telepon	31
Email	22	Email	32
Kode Pos	23	Kode Pos	33
Tipe	24	Tipe	34

BANK ACCOUNT			
Data Awal		Perubahan	
Kode Bank	35	Kode Bank	53
No. Rekening	36	No. Rekening	54
Nama Bank	37	Nama Bank	55
Nama Cabang	38	Nama Cabang	56
Kode Swift	39	Kode Swift	57
Pemilik Rekening	40	Pemilik Rekening	58
Mata Uang	41	Mata Uang	59
Negara	42	Negara	60
Nama	43	Nama	61
NPWP	44	NPWP	62
NIP	45	NIP	63
Lokasi	46	Lokasi	64
Alamat1	47	Alamat1	65
Alamat2	48	Alamat2	66
Kabupaten/Kota	49	Kabupaten/Kota	67
Provinsi	50	Provinsi	68
Kode Pos	51	Kode Pos	69
Negara	52	Negara	70

1

KETERANGAN ISIAN
LAPORAN PERUBAHAN INFORMASI SUPPLIER

NO	KETERANGAN ISIAN
(1)	Berisi Identitas Instansi
(2)	Berisi pengguna (<i>user</i>) yang mendaftarkan data <i>supplier</i>
(3)	Berisi pengguna (<i>user</i>) yang melaporkan data <i>supplier</i>
(4)	Berisi tanggal dan jam penayangan laporan
(5)	Berisi kode KPPN tempat pembayaran
(6)	Berisi nama KPPN tempat pembayaran
(7)	Berisi Nomor Register <i>Supplier</i> (NRS)
(8)	Berisi Nama <i>Supplier</i> SPAN yang merupakan kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP
(9)	Berisi Nama <i>supplier</i>
(10)	Berisi NPWP <i>supplier</i>
(11)	Berisi Nomor Register <i>Supplier</i> (NRS)
(12)	Berisi Nama <i>Supplier</i> SPAN yang merupakan kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP
(13)	Berisi Nama <i>supplier</i>
(14)	Berisi NPWP <i>supplier</i>
(15)	Berisi Nama informasi alamat <i>supplier</i> yang terdiri dari tipe <i>supplier</i> dan kode pos
(16)	Berisi Alamat dari <i>supplier</i>
(17)	Berisi Kolom tambahan jika kolom alamat 1 belum mencukupi
(18)	Berisi Kota dari alamat <i>supplier</i>
(19)	Berisi Provinsi dari alamat <i>supplier</i>
(20)	Berisi Negara dari <i>supplier</i>
(21)	Berisi Nomor telepon <i>supplier</i>
(22)	Berisi Alamat email <i>supplier</i>
(23)	Berisi Kode Pos <i>supplier</i>
(24)	Berisi Jenis tipe <i>supplier</i> SPAN
(25)	Berisi Nama informasi alamat <i>supplier</i> yang terdiri dari tipe <i>supplier</i> dan kode pos
(26)	Berisi Alamat dari <i>supplier</i> (perubahan)
(27)	Berisi Kolom tambahan jika kolom alamat 1 belum mencukupi (perubahan)
(28)	Berisi Kota dari alamat <i>supplier</i> (perubahan)
(29)	Berisi Provinsi dari alamat <i>supplier</i> (perubahan)
(30)	Berisi Negara dari <i>supplier</i> (perubahan)
(31)	Berisi Nomor telepon <i>supplier</i> (perubahan)
(32)	Berisi Alamat email <i>supplier</i> (perubahan)
(33)	Berisi Kode pos <i>supplier</i>
(34)	Berisi Jenis tipe <i>supplier</i> SPAN
(35)	Berisi Kode Bank sesuai Standar Bank Indonesia
(36)	Berisi Nomor rekening tujuan pembayaran
(37)	Berisi Nama bank pada rekening tujuan pembayaran sesuai standar Bank Indonesia (untuk bank di Indonesia) atau tidak diisi (untuk bank di luar Indonesia)
(38)	Berisi Nama Cabang Bank ("INDONESIA" untuk bank di Indonesia atau nama cabang (teks bebas) untuk bank di luar Indonesia)
(39)	Berisi kode cabang bank di luar Indonesia

M

NO	KETERANGAN ISIAN
(40)	Berisi Nama rekening sesuai buku tabungan atau rekening koran yang dikeluarkan oleh bank
(41)	Berisi kode mata uang rekening bank
(42)	Berisi negara dimana bank tersebut berada
(43)	Berisi nama pegawai (transaksi gaji) atau nama pemda (transaksi transfer daerah) atau nama pihak ketiga (transaksi penerusan pinjaman/konsorsium/bantuan sosial/pihak ketiga banyak penerima)
(44)	Berisi NPWP dari isian nomor (43)
(45)	Berisi Nomor Induk Pegawai (jika nomor (43) adalah nama pegawai untuk transaksi gaji)
(46)	Berisi informasi lokasi pemerintah daerah (jika nomor (43) adalah nama pemda untuk transaksi transfer daerah)
(47)	Berisi Alamat dari isian nomor (43)
(48)	Berisi Alamat dari isian nomor (43) jika kolom alamat 1 belum mencukupi
(49)	Berisi Kabupaten/kota dari isian nomor (43)
(50)	Berisi Provinsi dari isian nomor (43)
(51)	Berisi Kode pos dari isian nomor (43)
(52)	Berisi Negara dari isian nomor (43)
(53)	Berisi Kode Bank sesuai Standar Bank Indonesia
(54)	Berisi Nomor rekening tujuan pembayaran
(55)	Berisi Nama bank pada rekening tujuan pembayaran sesuai standar Bank Indonesia (untuk bank di Indonesia) atau tidak diisi (untuk bank di luar Indonesia)
(56)	Berisi Nama Cabang Bank ("INDONESIA" untuk bank di Indonesia atau nama cabang (teks bebas) untuk bank di luar Indonesia)
(57)	Berisi kode cabang bank di luar Indonesia
(58)	Berisi Nama rekening sesuai buku tabungan atau rekening koran yang dikeluarkan oleh bank (perubahan)
(59)	Berisi kode mata uang rekening bank (perubahan)
(60)	Berisi negara dimana bank tersebut berada (perubahan)
(61)	Berisi nama pegawai (transaksi gaji) atau nama pemda (transaksi transfer daerah) atau nama pihak ketiga (transaksi penerusan pinjaman/konsorsium/bantuan sosial/pihak ketiga banyak penerima) (perubahan)
(62)	Berisi NPWP dari isian nomor (43) (perubahan)
(63)	Berisi Nomor Induk Pegawai (jika nomor (43) adalah nama pegawai untuk transaksi gaji) (perubahan)
(64)	Berisi informasi lokasi pemerintah daerah (jika nomor (43) adalah nama pemda untuk transaksi transfer daerah) (perubahan)
(65)	Berisi Alamat dari isian nomor (43) (perubahan)
(66)	Berisi Alamat dari isian nomor (43) jika kolom alamat 1 belum mencukupi (perubahan)

M

NO	KETERANGAN ISIAN
(67)	Berisi Kabupaten/kota dari isian nomor (43) (perubahan)
(68)	Berisi Provinsi dari isian nomor (43) (perubahan)
(69)	Berisi Kode Pos dari isian nomor (43) (perubahan)
(70)	Berisi Kode Negara dari isian nomor (43) (perubahan)

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


1 MARWANTO HARJOWIRYONO 

KETERANGAN ISIAN
LAPORAN INFORMASI *SUPPLIER*
SETELAH PERUBAHAN DENGAN *USER* KHUSUS KPPN

NO	KETERANGAN ISIAN
(1)	Berisi Identitas Instansi
(2)	Berisi pengguna (<i>user</i>) yang melaporkan data <i>supplier</i>
(3)	Berisi tanggal dan jam penayangan laporan
(4)	Berisi kode KPPN tempat pembayaran
(5)	Berisi nama KPPN tempat pembayaran
(6)	Berisi Nomor Register <i>Supplier</i> yang dikeluarkan oleh SPAN
(7)	Berisi Nama <i>Supplier</i> SPAN yang merupakan kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP
(8)	Berisi Nama <i>supplier</i>
(9)	Berisi NPWP <i>supplier</i>
(10)	Berisi Tanggal tidak aktif dari informasi pokok <i>supplier</i> (Tidak Terisi)
(11)	Berisi Nama informasi alamat <i>supplier</i> yang terdiri dari tipe <i>supplier</i> dan kode pos
(12)	Berisi Alamat dari <i>supplier</i>
(13)	Berisi Kolom tambahan jika kolom alamat 1 belum mencukupi
(14)	Berisi Kota dari alamat <i>supplier</i>
(15)	Berisi Provinsi dari alamat <i>supplier</i>
(16)	Berisi Negara dari <i>supplier</i>
(17)	Berisi Nomor telepon <i>supplier</i>
(18)	Berisi Alamat email <i>supplier</i>
(19)	Berisi Kode pos <i>supplier</i>
(20)	Berisi Jenis tipe <i>supplier</i> SPAN
(21)	Berisi Tanggal tidak aktif dari informasi alamat <i>supplier</i> (Tidak Terisi)
(22)	Berisi Nomor urut daftar rekening yang terkait dengan informasi pokok dan alamat <i>supplier</i>
(23)	Berisi Kode bank pada rekening tujuan pembayaran sesuai standar Bank Indonesia (untuk bank di Indonesia) atau tidak diisi (untuk bank di luar Indonesia)
(24)	Berisi Nomor rekening tujuan pembayaran
(25)	Berisi Nama bank pada rekening tujuan pembayaran sesuai standar Bank Indonesia (untuk bank di Indonesia) atau tidak diisi (untuk bank di luar Indonesia)
(26)	Berisi Nama Cabang Bank ("INDONESIA" untuk bank di Indonesia atau nama cabang (teks bebas) untuk bank di luar Indonesia)
(27)	Berisi kode cabang bank di luar Indonesia
(28)	Berisi Nama rekening sesuai buku tabungan atau rekening koran yang dikeluarkan oleh bank
(29)	Berisi kode mata uang rekening bank

NO	KETERANGAN ISIAN
(30)	Berisi negara dimana bank tersebut berada
(31)	Berisi nomor urut informasi tambahan rekening
(32)	Berisi nama pegawai (transaksi gaji) atau nama pemda (transaksi transfer daerah) atau nama pihak ketiga (transaksi penerusan pinjaman/konsorsium/bantuan sosial/pihak ketiga banyak penerima)
(33)	Berisi NPWP dari isian nomor (32)
(34)	Berisi Nomor Induk Pegawai (jika nomor (32) adalah nama pegawai untuk transaksi gaji)
(35)	Berisi informasi lokasi pemerintah daerah (jika nomor (32) adalah nama pemda untuk transaksi transfer daerah)
(36)	Berisi Alamat dari isian nomor (32)
(37)	Berisi Kabupaten/kota dari isian nomor (32)
(38)	Berisi Provinsi dari isian nomor (32)
(39)	Berisi Kode pos dari isian nomor (32)
(40)	Berisi Negara dari isian nomor (32)
(41)	Berisi Tanggal tidak aktif dari informasi rekening (Tidak Terisi)

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


1 MARWANTO HARJOWIRYONO 

FORMAT SURAT PERMINTAAN PENONAKTIFAN SUPPLIER
 TIPE PEGAWAI

<KOP SURAT>..... (1)

Nomor : (2) (5)
 Hal : (3)
 Lampiran : (4)

Yth. (6)
 (7)

1. Dengan memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-/PB/2013 tentang Pengelolaan Data *Supplier* dan Data Kontrak Dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, dengan ini kami mengajukan permintaan **penonaktifan informasi rekening** pegawai dari *supplier*.
 - a. Nama *Supplier* : (8)
 - b. Nomor Register *Supplier* : (9)

2. Identitas rekening pegawai yang dinonaktifkan adalah sebagai berikut:

No	Data Pegawai Yang Dinonaktifkan			
	Nama	NIP	Nama Bank	Nomor rekening
..... (10) (11) (12) (13) (14)



3. Alasan permintaan penonaktifan informasi rekening pegawai tersebut adalah(15)
4. Apabila di kemudian hari terdapat konsekuensi atas data yang kami sampaikan, maka kami menyatakan siap menanggung segala akibat dan tanggung jawab yang ditimbulkan oleh data yang kami sampaikan.
5. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Pejabat Pembuat Komitmen,
 (16)
 (17)
 (18)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN PENONAKTIFAN *SUPPLIER* TIPE PEGAWAI

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan kop instansi berkenaan.
(2)	Diisi dengan nomor surat.
(3)	Diisi dengan hal surat.
(4)	Diisi dengan jumlah lampiran berkenaan.
(5)	Diisi dengan tanggal pembuatan surat.
(6)	Diisi dengan Kepala KPPN tempat satuan kerja melakukan pembayaran.
(7)	Diisi dengan alamat KPPN berkenaan.
(8)	Diisi dengan nama <i>supplier</i> berkenaan.
(9)	Diisi dengan nomor register <i>supplier</i> berkenaan.
(10)	Diisi dengan nomor urut (1,2,3 dst).
(11)	Diisi dengan nama pegawai berkenaan.
(12)	Diisi dengan NIP pegawai berkenaan.
(13)	Diisi dengan nama bank dari pegawai berkenaan
(14)	Diisi dengan nomor rekening dari pegawai berkenaan
(15)	Diisi dengan alasan penonaktifan informasi rekening pegawai berkenaan
(16)	Diisi dengan tandatangan Pejabat Pembuat Komitmen.
(17)	Diisi dengan Nama Lengkap Pejabat Pembuat Komitmen.
(18)	Diisi dengan NIP Pejabat Pembuat Komitmen.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


1 MARWANTO HARJOWIRYONO 

FORMAT SURAT PERMINTAAN PENONAKTIFAN *SUPPLIER*
SELAIN TIPE PEGAWAI

<KOP SURAT>..... (1)

Nomor : (2)(5)
Hal : (3)
Lampiran : (4)

Yth. (6)
..... (7)

1. Dengan memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-/PB/2013 tentang Pengelolaan Data *Supplier* dan Data Kontrak Dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, dengan ini kami mengajukan permintaan **penonaktifan informasi pokok/informasi lokasi/informasi rekening*)** atas *supplier*.

- a. Nama *Supplier* : (8)
b. Nomor Register *Supplier* : (9)
c. NPWP : (10)
d. Alamat : (11)
e. Nama Bank : (12)
f. Nomor Rekening *Supplier* : (13)

2. Alasan permintaan penonaktifan informasi *supplier* tersebut adalah(14)

3. Apabila di kemudian hari terdapat konsekuensi atas data yang kami sampaikan, maka kami menyatakan siap menanggung segala akibat dan tanggung jawab yang ditimbulkan oleh data yang kami sampaikan.

4. Demikian atas kerjasama Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Pejabat Pembuat Komitmen,
(15)

..... (16)

..... (17)

*)Coret yang tidak perlu


PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN PENONAKTIFAN *SUPPLIER* SELAIN TIPE PEGAWAI

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan kop instansi berkenaan.
(2)	Diisi dengan nomor surat.
(3)	Diisi dengan hal surat.
(4)	Diisi dengan jumlah lampiran berkenaan.
(5)	Diisi dengan tanggal pembuatan surat.
(6)	Diisi dengan Kepala KPPN tempat satuan kerja melakukan pembayaran.
(7)	Diisi dengan alamat KPPN berkenaan.
(8)	Diisi dengan nama <i>supplier</i> berkenaan.
(9)	Diisi dengan nomor register <i>supplier</i> berkenaan.
(10)	Diisi dengan NPWP <i>supplier</i> berkenaan.
(11)	Diisi dengan alamat <i>supplier</i> berkenaan.
(12)	Diisi dengan nama bank <i>supplier</i> berkenaan.
(13)	Diisi dengan nomor rekening <i>supplier</i> berkenaan.
(14)	Diisi dengan alasan penonaktifan informasi pokok <i>supplier</i> berkenaan.
(15)	Diisi dengan tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen.
(16)	Diisi dengan Nama Lengkap Pejabat Pembuat Komitmen.
(17)	Diisi dengan NIP Pejabat Pembuat Komitmen.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


1 MARWANTO HARJOWIRYONO 

LAPORAN INFORMASI SUPPLIER
 YANG MEMUAT INFORMASI REKENING PEGAWAI YANG TIDAK AKTIF

 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (1)										
Informasi Laporan Dilaporkan Oleh : (2) Tanggal dan Jam : (3)										
SUPPLIER DATA	KPPN (4) (5)									
SUPPLIER HEADER										
SPAN No. Suppier : (6) SPAN Nama Suppier : (7) Nama Supplier : (8) NPWP : (9) Tanggal Non-Aktif : (10)										
SUPPLIER SITE										
Nama Site : (11) Alamat1 : (12) Alamat2 : (13) Kota : (14) Provinsi : (15) Negara : (16) Nomor Telepon : (17) Email : (18) Kode Pos : (19) Tipe : (20) Tanggal Non-Aktif : (21)										
BANK ACCOUNT										
No.	Kode Bank	No. Rekening	Nama Bank	Nama Cabang	Kode SWIFT	Pemilik Rekening	Mata Uang	Negara		
(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)		
ADDITIONAL BANK INFORMATION										
No.	Nama	NPWP	NIP	Lokasi	Alamat	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Kode Pos	Negara	Tanggal Non-Aktif
(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)

KETERANGAN ISIAN
LAPORAN INFORMASI *SUPPLIER*
YANG MEMUAT INFORMASI REKENING PEGAWAI YANG TIDAK AKTIF

NO	KETERANGAN ISIAN
(1)	Berisi Identitas Instansi
(2)	Berisi pengguna (<i>user</i>) yang melaporkan data <i>supplier</i>
(3)	Berisi tanggal dan jam penayangan laporan
(4)	Berisi kode KPPN tempat pembayaran
(5)	Berisi nama KPPN tempat pembayaran
(6)	Berisi Nomor Register <i>Supplier</i> yang dikeluarkan oleh SPAN
(7)	Berisi Nama <i>Supplier</i> SPAN yang merupakan kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP
(8)	Berisi Nama <i>supplier</i>
(9)	Berisi NPWP <i>supplier</i>
(10)	Berisi tanggal tidak aktif dari informasi pokok <i>supplier</i>
(11)	Berisi nama informasi alamat <i>supplier</i> yang terdiri dari tipe <i>supplier</i> dan kode pos
(12)	Berisi Alamat dari <i>supplier</i>
(13)	Berisi kolom tambahan jika kolom alamat 1 belum mencukupi
(14)	Berisi kota dari alamat <i>supplier</i>
(15)	Berisi provinsi dari alamat <i>supplier</i>
(16)	Berisi negara dari <i>supplier</i>
(17)	Berisi nomor telepon <i>supplier</i>
(18)	Berisi alamat email <i>supplier</i>
(19)	Berisi kode pos <i>supplier</i>
(20)	Berisi jenis tipe <i>supplier</i> SPAN
(21)	Berisi tanggal tidak aktif dari informasi alamat <i>supplier</i>
(22)	Berisi nomor urut daftar rekening yang terkait dengan informasi pokok dan alamat <i>supplier</i>
(23)	Berisi Kode bank pada rekening tujuan pembayaran sesuai standar Bank Indonesia (untuk bank di Indonesia) atau tidak diisi (untuk bank di luar Indonesia)
(24)	Berisi nomor rekening tujuan pembayaran
(25)	Berisi nama bank pada rekening tujuan pembayaran sesuai standar Bank Indonesia (untuk bank di Indonesia) atau tidak diisi (untuk bank di luar Indonesia)
(26)	Berisi Nama Cabang Bank ("INDONESIA" untuk bank di Indonesia atau nama cabang (teks bebas) untuk bank di luar Indonesia)
(27)	Berisi kode cabang bank di luar Indonesia
(28)	Berisi nama rekening sesuai buku tabungan atau rekening koran yang dikeluarkan oleh bank
(29)	Berisi kode mata uang rekening bank

1

NO	KETERANGAN ISIAN
(30)	Berisi negara dimana bank tersebut berada
(31)	Berisi nomor urut informasi tambahan rekening
(32)	Berisi nama pegawai (transaksi gaji) atau nama pemda (transaksi transfer daerah) atau nama pihak ketiga (transaksi penerusan pinjaman/konsorsium/bantuan sosial/pihak ketiga banyak penerima)
(33)	Berisi NPWP dari isian nomor (32)
(34)	Berisi Nomor Induk Pegawai (jika nomor (32) adalah nama pegawai untuk transaksi gaji)
(35)	Berisi informasi lokasi pemerintah daerah (jika nomor (32) adalah nama pemda untuk transaksi transfer daerah)
(36)	Berisi alamat dari isian nomor (32)
(37)	Berisi kabupaten/kota dari isian nomor (32)
(38)	Berisi provinsi dari isian nomor (32)
(39)	Berisi kode pos dari isian nomor (32)
(40)	Berisi negara dari isian nomor (32)
(41)	Berisi tanggal tidak aktif dari informasi rekening

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


1 MARWANTO HARJOWIRYONO 

FORMAT SURAT PERMINTAAN
PENGgabUNGAN (*MERGE*) DATA SUPPLIER

<KOP SURAT>..... (1)

Nomor : (2) (5)

Hal : (3)

Lampiran : (4)

Yth. (6)
..... (7)

1. Dengan memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-/PB/2013 tentang Pengelolaan Data *Supplier* dan Data Kontrak Dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, dengan ini kami mengajukan permintaan penggabungan data *supplier*.

- a. Nomor Register *Supplier*: (8)
- b. Nama *Supplier* : (9)
- c. NPWP : (10)

Untuk digabungkan ke dalam data *supplier* yang benar sebagai berikut:

- a. Nomor Register *Supplier*: (11)
- b. Nama *Supplier* : (12)
- c. NPWP : (13)

2. Apabila di kemudian hari terdapat konsekuensi atas data yang kami sampaikan, maka kami menyatakan siap menanggung segala akibat dan tanggung jawab yang ditimbulkan oleh data yang kami sampaikan.

3. Demikian atas kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen,
(14)

..... (15)

..... (16)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN PENGGABUNGAN (*MERGER*) DATA SUPPLIER

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan kop instansi berkenaan.
(2)	Diisi dengan nomor surat.
(3)	Diisi dengan hal surat. (perubahan alamat supplier dan/atau nama pemilik rekening).
(4)	Diisi dengan jumlah lampiran berkenaan. (Lampiran berupa surat keterangan domisili <i>supplier</i> dan/atau fotokopi buku rekening <i>supplier</i>).
(5)	Diisi dengan tanggal pembuatan surat.
(6)	Diisi dengan Kepala KPPN tempat satuan kerja melakukan pembayaran.
(7)	Diisi dengan alamat KPPN berkenaan.
(8)	Diisi dengan nomor register <i>supplier</i> yang akan digabung.
(9)	Diisi dengan nama <i>supplier</i> yang akan digabung.
(10)	Diisi dengan NPWP <i>supplier</i> yang akan digabung.
(11)	Diisi dengan nomor register <i>supplier</i> yang benar.
(12)	Diisi dengan nama <i>supplier</i> yang benar.
(13)	Diisi dengan NPWP <i>supplier</i> yang benar.
(14)	Diisi dengan tandatangan Pejabat Pembuat Komitmen.
(15)	Diisi dengan nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen.
(16)	Diisi dengan NIP Pejabat Pembuat Komitmen.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO

1

CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGABUNGAN SUPPLIER

	Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan ①
---	---

LAPORAN PENGGABUNGAN SUPPLIER ②

Nama Supplier Lama : ③	Tanggal Laporan ⑦
Nama Site Lama : ④	
Nama Supplier Baru : ⑤	
Nama Site Baru : ⑥	

Duplikat	Kode Satker	Mata Uang	Nomor Resume Tagihan	Tanggal Resume Tagihan	Deskripsi	Nilai
⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭

Mata Uang	Nilai Total
⑮	⑯

Jumlah	Keterangan
⑰	Resume Tagihan Berhasil Digabung
⑱	Duplikasi Resume Tagihan
⑲	Recurring Resume Tagihan Berhasil Digabung
⑳	Duplikasi Recurring Resume Tagihan

PO Header Update							
CAN	Kode Satker	Mata Uang	Nomor PO	Tanggal Kontrak	Deskripsi Kontrak	Nilai Kontrak	Didaftarkan Oleh
⑳	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘

Jumlah	Keterangan
㉙	PO Berhasil Digabung
㉚	PO Yang Telah Diubah

a ㉛

a
NIP. ㉜

7

KETERANGAN ISIAN
LAPORAN PENGGABUNGAN *SUPPLIER*

NO	KETERANGAN ISIAN
(1)	Berisi identitas instansi
(2)	Berisi judul laporan yaitu Laporan Penggabungan <i>Supplier</i>
(3)	Berisi nama <i>supplier</i> yang lama (yang digabung)
(4)	Berisi nama <i>site</i> (kombinasi tipe <i>supplier</i> dan kode pos) <i>supplier</i> yang gabung
(5)	Berisi nama <i>supplier</i> yang baru (hasil penggabungan)
(6)	Berisi nama <i>site</i> (kombinasi tipe <i>supplier</i> dan kode pos) <i>supplier</i> hasil penggabungan
(7)	Berisi tanggal laporan dibuat
(8)	Berisi keterangan duplikasi resume tagihan
(9)	Berisi kode Satker
(10)	Berisi kode mata uang
(11)	Berisi Nomor Resume Tagihan
(12)	Berisi Tanggal Resume Tagihan
(13)	Berisi Deskripsi Pembayaran
(14)	Berisi Nilai Resume Tagihan
(15)	Berisi kode mata uang
(16)	Berisi Nilai Total Resume Tagihan
(17)	Berisi jumlah resume tagihan yang berhasil digabungkan
(18)	Berisi jumlah duplikasi resume tagihan
(19)	Berisi jumlah Recurring Resume Tagihan yang berhasil digabungkan
(20)	Berisi jumlah duplikasi Recurring Resume Tagihan
(21)	Berisi nomor register kontrak
(22)	Berisi kode Satker
(23)	Berisi kode mata uang
(24)	Berisi nomor <i>purchase order</i>
(25)	Berisi tanggal kontrak
(26)	Berisi deskripsi kontrak
(27)	Berisi nilai kontrak
(28)	Berisi NIP petugas yang mendaftarkan <i>purchase order</i>
(29)	Berisi jumlah <i>purchase order</i> yang berhasil digabung
(30)	Berisi jumlah <i>purchase order</i> yang telah diubah
(31)	Berisi jabatan pemberi persetujuan
(32)	Berisi nama pemberi persetujuan
(33)	Berisi NIP pemberi persetujuan

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


 1 MARWANTO HARJOWIRYO

CONTOH ISIAN DATA KONTRAK DENGAN BEBERAPA CARA TARIK DAN/ATAU RENCANA ANGSURAN

1. Kontrak dengan 1 cara tarik dan 1 rencana angsuran

Nilai Kontrak	No Line	Kategori	Nilai Line	No	Deskripsi Pembayaran	Tanggal Jadwal Pembayaran	Nilai	BAS
100.000.000	1	RK	100.000.000	1	Pembayaran ke-1	01-JUL-2013	100.000.000	692002.140.534131.0150412.1657002.B310784001.00000.1.0154.2.000000.000000

2. Kontrak dengan 1 cara tarik dan beberapa rencana angsuran

Nilai Kontrak	No Line	Kategori	Nilai Line	No	Deskripsi Pembayaran	Tanggal Jadwal Pembayaran	Nilai	BAS
100.000.000	1	RK	100.000.000	1	Pembayaran ke-1	01-JUL-2013	60.000.000	692002.140.534131.0150412.1657002.B310784001.00000.1.0154.2.000000.000000
100.000.000	1	RK	100.000.000	2	Pembayaran ke-2	01-DES-2013	40.000.000	692002.140.534131.0150412.1657002.B310784001.00000.1.0154.2.000000.000000

3. Kontrak dengan beberapa cara tarik dan beberapa rencana angsuran

Nilai Kontrak	No Line	Kategori	Nilai Line	No	Deskripsi Pembayaran	Tanggal Jadwal Pembayaran	Nilai	BAS
100.000.000	1	RK	80.000.000	1	Pembayaran ke-1	01-JUL-2013	50.000.000	692002.140.534131.0150412.1657002.B310784001.00000.1.0154.2.000000.000000

d

Nilai Kontrak	No Line	Kategori	Nilai Line	No	Deskripsi Pembayaran	Tanggal Jadwal Pembayaran	Nilai	BAS
100.000.000	1	RK	80.000.000	2	Pembayaran ke-2	01-DES-2013	30.000.000	692002.140.534131.0150412.1657002.B310784001.00000.1.0154.2.000000.000000
100.000.000	2	RM	20.000.000	1	Pembayaran ke-1	01-JUL-2013	15.000.000	692002.140.534131.0150412.1657002.C010784001.00000.1.0154.2.000000.000000
100.000.000	2	RM	20.000.000	2	Pembayaran ke-2	01-DES-2013	5.000.000	692002.140.534131.0150412.1657002.C010784001.00000.1.0154.2.000000.000000

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


1 MARWANTO HARJOWIRYONO 

LAMPIRAN XVII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
 NOMOR PER- 58 /PB/2013 TENTANG PENGELOLAAN DATA
 SUPPLIER DAN DATA KONTRAK DALAM SISTEM
 PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

RINCIAN STRUKTUR DAN ELEMEN DATA KONTRAK

A. Kontrak Tahunan

No	Nama Field	Keterangan	Contoh
INFORMASI UMUM			
1	tipe	tipe : new untuk kontrak baru	<i>New</i>
2	tipe_kontrak	tipe kontrak: Annual Year	<i>Annual Year</i>
3	tipe_komitmen	tipe komitmen : Kontrak	Kontrak
4	kode_kppn	kode KPPN harus sesuai dengan kewenangan KPPN pemroses	019
5	CAN <i>Multi Year</i>	untuk pendaftaran baru kontrak tahunan, <i>field CAN Multi Year</i> harus dikosongkan	N/A
6	CAN (<i>for addendum</i>)	<i>generate</i> nomor CAN mengacu pada Nomor PO yang dihasilkan oleh aplikasi SPAN	N/A
7	no_supplier	<ul style="list-style-type: none"> <i>default null</i>, akan terisi otomatis yang didapat dari hasil kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP; atau diisi Nomor Register <i>Supplier</i> (NRS) yang diperoleh dari pendaftaran <i>supplier</i> di KPPN. 	N/A
8	nama_supplier	<ul style="list-style-type: none"> berisi nama <i>supplier</i> dalam kontrak sesuai dengan tipe <i>supplier</i>-nya apabila <i>field no_supplier</i> kosong, maka penentuan <i>header supplier</i> bisa didapat dari kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP 	PT. Eagle X
9	kode_satker	kode satker (6 digit), <i>default</i> kosong untuk sementara <i>field</i> kode satker harus dikosongkan	N/A
10	npwp	<ul style="list-style-type: none"> NPWP <i>supplier</i> yang terdiri dari 15 digit, dengan digit ke-10 sampai dengan digit ke-12 merupakan kode KPP. Apabila <i>field no_supplier</i> kosong, maka penentuan <i>header supplier</i> bisa didapat dari kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP. 	000000000015000
11	nama_site	kombinasi kode tipe <i>supplier_kode</i> pos (Terisi otomatis oleh sistem)	2_10710
12	kode_tipe_supplier	tipe <i>supplier</i> SPAN sesuai jenis transaksi yang dilakukan	2
13	kode_pos	kode pos <i>supplier</i>	10710
14	nama_bank	nama bank <i>supplier</i>	PT. BANK MANDIRI
15	kode_bank	nomor Kode dari Bank dimana rekening <i>supplier</i> terdaftar	520008000990
16	kode_swift	kode cabang dari bank luar negeri	BMRIIDJA107
17	no_rekening	nomor rekening bank <i>supplier</i>	112233021360000
18	kode_mata_uang	kode mata uang dan nomor kontrak dijadikan <i>primary key</i> dalam validasi ADK kontrak	IDR

No	Nama Field	Keterangan	Contoh
19	tipe_rate	tipe rate: <ul style="list-style-type: none"> • kurs tengah BI, untuk di konversi oleh sitem dari nilai kurs yang sudah di <i>upload</i> di GL pada aplikasi SPAN; atau • user untuk entri nilai kurs yang sudah diketahui sesuai kebutuhan <i>user</i> 	N/A
20	nilai_rate	<ul style="list-style-type: none"> • tipe rate user: diisi nilai kurs untuk mata uang valas; atau • tipe rate kurs tengah BI: null/dikosongkan, secara otomatis akan terisi oleh sistem 	N/A
21	no_kontrak	<ul style="list-style-type: none"> • diisi nomor kontrak, dengan maksimal 150 karakter/ digit • kode mata uang dan nomor kontrak dijadikan <i>primary key</i> dalam validasi ADK kontrak 	001/DTP/2012
22	no_rfc	<i>generate</i> nomor RFC dihasilkan oleh aplikasi satker	001/DTP/2012
23	tanggal_kontrak	<ul style="list-style-type: none"> • format penulisan: DD-<i>MMM</i>-<i>YYY</i>; • tanggal kontrak harus lebih awal atau samadengan tanggal pendaftaran kontrak 	03-JAN-2012
24	tanggal_mulai_kontrak	format penulisan: DD- <i>MMM</i> - <i>YYY</i>	03-JAN-2012
25	tanggal_selesai_kontrak	<ul style="list-style-type: none"> • format penulisan: DD-<i>MMM</i>-<i>YYY</i> (misal: 01-JAN-2012) • tanggal selesai kontrak harus dalam tahun yang sama dengan tanggal kontrak 	03-DES-2012
26	jangka waktu_pemeliharaan	diisi lama jangka waktu pemeliharaan, maksimal 150 karakter	0
27	tanggal_addendum	untuk pendaftaran kontrak baru, tanggal addendum harus kosong	N/A
28	persentase_loan/goi	perhitungan porsentase secara manual dari nilai kontrak sesuai ketentuan yang berlaku (untuk <i>loan</i> /hibah: <i>netto</i> /bruto) dan tidak melebihi porsentase 100%	0/100
29	uang_muka	<i>free text</i> diisi keterangan yang berkaitan dengan uang muka	N/A
30	Catatan Tambahan	<i>free text</i> maksimum 150 karakter, diisi data yang belum tercantum dalam <i>field</i> data kontrak (nomor dan tanggal DIPA, <i>closing date</i> , nomor <i>loan</i> , nomor register <i>loan</i> , tgl efektif <i>loan</i> , surat keputusan menteri, dll)	DIPA Nomor : 0558/023-04.2.01/12/2012, tanggal : 09-DES-2011
31	kategori_pinjaman	diisi kategori dari PHLN, maksimal 30 karakter (2 <i>civil works</i> , 1 <i>goods</i> , etc)	N/A
32	No. Addendum	untuk pendaftaran kontrak baru, nomor addendum harus kosong	N/A
33	ketentuan_sanksi	diisi sanksi yang tertuang dalam kontrak, maksimal 150 karakter	denda keterlambatan satu permil perhari, maksimal 5% dari nilai kontrak
34	deskripsi_kontrak	uraian pekerjaan dalam kontrak, maksimal 240 karakter	Pembangunan Gedung Inovasi Teknologi Informasi
35	nilai_kontrak	nilai kontrak tidak boleh melampaui dana yang tersedia dalam pagu DIPA dan harus sama dengan total nilai baris/ <i>line</i>	12000000000

1

No	Nama Field	Keterangan	Contoh
INFORMASI KHUSUS			
36	no_line	nomor <i>line</i> bisa lebih dari satu apabila terdapat perbedaan cara tarik (<i>field</i> "kategori")	1
37	tipe_line	<i>default</i> berisi: Belanja/Biaya	Belanja/Biaya
38	deskripsi_line	uraian dari <i>line</i> (<i>free text</i>), maksimal 240 karakter	Pembangunan Gedung Inovasi Teknologi Informasi
39	kategori	diisikan kode cara tarik dalam pembayaran	RM
40	nilai_line	<ul style="list-style-type: none"> jumlah total nilai baris harus sama dengan nilai kontrak jumlah seluruh jadwal pembayaran yang berada dibawahnya harus sama dengan nilai baris 	12000000000
41	persentase_uang_muka	besaran persentase uang muka terhadap nilai baris	N/A
42	nilai_uang_muka	jumlah nominal nilai uang muka sesuai dengan persentase uang muka	N/A
43	persentase_retensi	besaran persentase retensi terhadap nilai baris	N/A
44	nilai_retensi	jumlah nominal nilai uang retensi sesuai persentase retensi	N/A
45	no_jadwal_pembayaran	nomor urut dari jadwal rencana pembayaran	1
46	deskripsi_pembayaran	uraian dari jadwal pembayaran (<i>free text</i>): termyn1, maksimal 240 karakter	Pembangunan Gedung Inovasi Teknologi Informasi
47	tanggal_pembayaran	<ul style="list-style-type: none"> tanggal rencana pembayaran akan dilakukan format penulisan: DD-MM-YYYY 	12-JUN-2012
48	nilai_pembayaran	jumlah nominal nilai uang tiap jadwal rencana pembayaran	12000000000
49	pengembalian_uang_muka	jumlah nominal angsuran pengembalian uang muka tiap jadwal rencana pembayaran	N/A
50	potongan_retensi	jumlah nominal potongan retensi tiap jadwal rencana pembayaran	N/A
51	no_distribusi	nomor distribusi default : 1	1
INFORMASI PEMBEBANAN			
52	tipe_akun	tipe akun <i>default</i> : Expense	Expense
53	kode_akun	kombinasi 12 segmen COA	189772.023.531111.0230405.1001998.A000000001.0000.2.0205.2.000000.000000
54	satker	kode satker : 6 digit	189772
55	kppn	kode KPPN: 3 digit	019
56	akun	kode Akun : 6 digit	531111
57	program	kode Program : 7 digit	0230405
58	output	kode output : 7 digit	1001998
59	dana	kode dana : 10 digit	A000000001
60	bank	kode bank : 5 digit	00000
61	kewenangan	kode kewenangan : 1 digit	2
62	lokasi	kode lokasi : 4 digit	0205
63	tipe budget	kode tipe budget : 1 digit	2
64	interco	kode interco : 5 digit	000000
65	cadangan	kode cadangan : 5 digit	000000
66	alamat_email	alamat email satker, maksimal 150 karakter	email@satker.co.id
67	kode_sandi	kode keamanan data	N/A

1

B. Addendum/Perubahan Kontrak Tahunan

No	Nama Field	Keterangan	Contoh
INFORMASI UMUM			
1	tipe	tipe : Addendum untuk perubahan/addendum kontrak	Addendum
2	tipe_kontrak	tipe kontrak: Annual Year	Annual Year
3	tipe_komitmen	tipe komitmen : Kontrak	Kontrak
4	kode_kppn	kode KPPN harus sesuai dengan kewenangan KPPN pemroses	019
5	CAN Multi Year	untuk pendaftaran kontrak tahunan, <i>field</i> CAN Multi Year harus dikosongkan	N/A
6	CAN (for addendum)	<ul style="list-style-type: none"> • default: kosong, atau • diisi nomor CAN dari kontrak yang akan di addendum 	N/A
7	no_supplier	<ul style="list-style-type: none"> • <i>default null</i>, akan terisi otomatis yang didapat dari hasil kombinasi nama supplier dan NPWP, atau • diisi Nomor Register Supplier (NRS) yang diperoleh dari pendaftaran supplier di KPPN, 	N/A
8	nama_supplier	<ul style="list-style-type: none"> • berisi nama <i>supplier</i> dalam kontrak sesuai dengan tipe <i>supplier</i>-nya • apabila <i>field</i> no_supplier kosong, maka penentuan header <i>supplier</i> bisa didapat dari kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP 	PT. Eagle X
9	kode_satker	kode satker (6 digit), <i>default</i> kosong untuk sementara <i>field</i> kode satker harus dikosongkan	N/A
10	NPWP	<ul style="list-style-type: none"> • NPWP <i>supplier</i> yang terdiri dari 15 digit, dengan digit ke-10 sampai dengan digit ke-12 merupakan kode KPP • apabila <i>field</i> no_supplier kosong, maka penentuan header <i>supplier</i> bisa didapat dari kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP 	00000000015000
11	nama_site	kombinasi kode tipe <i>supplier_kode</i> pos (Terisi otomatis oleh sistem)	2_10710
12	kode_tipe_supplier	tipe <i>supplier</i> SPAN sesuai jenis transaksi yang dilakukan	2
13	kode_pos	kode pos <i>supplier</i>	10710
14	nama_bank	nama bank <i>supplier</i>	PT. BANK MANDIRI
15	kode_bank	nomor kode dari bank dimana rekening <i>supplier</i> terdaftar	520008000990
16	kode_swift	kode cabang dari bank luar negeri	BMRIIDJA107
17	no_rekening	nomor rekening bank <i>supplier</i>	112233021360000
18	kode_mata_uang	kode mata uang dan nomor kontrak dijadikan <i>primary key</i> dalam validasi ADK kontrak	IDR
19	tipe_rate	tipe rate: <ul style="list-style-type: none"> • kurs tengah BI, untuk di konversi oleh sitem dari nilai kurs yang sudah di <i>upload</i> di GL pada aplikasi SPAN; atau • user untuk entri nilai kurs yang sudah diketahui sesuai kebutuhan <i>user</i> 	N/A

No	Nama Field	Keterangan	Contoh
20	nilai_rate	<ul style="list-style-type: none"> • tipe rate user: diisi nilai kurs untuk mata uang valas; atau • tipe rate kurs tengah BI: null/dikosongkan, secara otomatis akan terisi oleh sistem 	N/A
21	no_kontrak	<ul style="list-style-type: none"> • diisi nomor kontrak, dengan maksimal 150 karakter/ digit. • kode mata uang dan nomor kontrak dijadikan <i>primary key</i> dalam validasi ADK kontrak 	001/DTP/2012
22	no_rfc	<i>generate</i> nomor RFC dihasilkan oleh aplikasi satker	001/DTP/2012
23	tanggal_kontrak	<ul style="list-style-type: none"> • format penulisan: DD-MM-YYYY; • tanggal kontrak harus lebih awal atau sama dengan tanggal pendaftaran kontrak 	03-JAN-2012
24	tanggal_mulai_kontrak	format penulisan: DD-MM-YYYY	03-JAN-2012
25	tanggal_selesai_kontrak	<ul style="list-style-type: none"> • format penulisan: DD-MM-YYYY (misal: 01-JAN-2012) • tanggal selesai kontrak harus dalam tahun yang sama dengan tanggal kontrak 	03-DES-2012
26	jangka waktu_pemeliharaan	diisi lama jangka waktu pemeliharaan, maksimal 150 karakter	0
27	tanggal_addendum	tanggal addendum kontrak format penulisan: DD-MM-YYYY	03-MEI-2012
28	persentase_loan/goi	perhitungan persentase secara manual dari nilai kontrak sesuai ketentuan yang berlaku (untuk <i>loan/hibah : netto/bruto</i>) dan tidak melebihi persentase 100%	0/100
29	uang_muka	<i>free text</i> diisi keterangan - keterangan yang berkaitan dengan uang muka	N/A
30	Catatan Tambahan	<i>free text</i> maksimum 150 karakter, diisi data yang belum tercantum dalam field data kontrak (nomor dan tanggal DIPA, <i>closing date</i> , nomor <i>loan</i> , nomor register <i>loan</i> , tgl efektif <i>loan</i> , surat keputusan menteri, dll)	DIPA Nomor : 0558/023-04.2.01/ 12/2012, tanggal : 09-DES-2011
31	kategori_pinjaman	diisi kategori kategori dari PHLN, maksimal 30 karakter (2 <i>civil works</i> , 1 <i>goods</i> , etc)	N/A
32	No. Addendum	diisi nomor addendum, maksimal 150 karakter	001/add-01/DTP/2012
33	ketentuan_sanksi	diisi sanksi yang tertuang dalam kontrak, maksimal 150 karakter	denda keterlambatan satu permil perhari, maksimal 5% dari nilai kontrak
34	deskripsi_kontrak	uraian pekerjaan dalam kontrak, maksimal 240 karakter	Pembangunan Gedung Inovasi Teknologi Informasi
35	nilai_kontrak	nilai kontrak tidak boleh melampaui dana yang tersedia dalam pagu DIPA dan harus sama dengan total nilai baris/ <i>line</i>	12000000000
INFORMASI KHUSUS			
36	no_line	nomor line bisa lebih dari satu apabila terdapat perbedaan cara tarik (<i>field "kategori"</i>)	1
37	tipe_line	default berisi: Belanja/Biaya	Belanja/Biaya
38	deskripsi_line	uraian dari <i>line (free text)</i> , maksimal 240 karakter	Pembangunan Gedung Inovasi Teknologi Informasi
39	kategori	diisikan kode cara tarik dalam pembayaran	RM

1

No	Nama Field	Keterangan	Contoh
40	nilai_line	<ul style="list-style-type: none"> jumlah total nilai baris harus sama dengan nilai kontrak jumlah seluruh jadwal pembayaran yang berada dibawahnya harus sama dengan nilai baris 	12000000000
41	persentase_uang_muka	besaran persentase uang muka terhadap nilai baris	N/A
42	nilai_uang_muka	jumlah nominal nilai uang muka sesuai dengan persentase uang muka	N/A
43	persentase_retensi	besaran persentase retensi terhadap nilai baris	N/A
44	nilai_retensi	jumlah nominal nilai uang retensi sesuai persentase retensi	N/A
45	no_jadwal_pembayaran	nomor urut dari jadwal rencana pembayaran	1
46	dekripsi_pembayaran	uraian dari jadwal pembayaran (<i>free text</i>) : termyn1, maksimal 240 karakter	Pembangunan Gedung Inovasi Teknologi Informasi
47	tanggal_pembayaran	<ul style="list-style-type: none"> tanggal rencana pembayaran akan dilakukan format penulisan: DD-MM-YYYY 	12-JUN-2012
48	nilai_pembayaran	jumlah nominal nilai uang tiap jadwal rencana pembayaran	12000000000
49	pengembalian_uang_muka	jumlah nominal angsuran pengembalian uang muka tiap jadwal rencana pembayaran	N/A
50	potongan_retensi	jumlah nominal potongan retensi tiap jadwal rencana pembayaran	N/A
51	no_distribusi	nomor distribusi default : 1	1
INFORMASI PEMBEBANAN			
52	tipe_akun	tipe akun default : Expense	Expense
53	kode_akun	kombinasi 12 segmen COA	189772.023.531111.0230405.1001998.A000000001.0000.2.0205.2.000000.000000
54	satker	kode satker : 6 digit	189772
55	kppn	kode KPPN: 3 digit	019
56	akun	kode Akun : 6 digit	531111
57	program	kode Program : 7 digit	0230405
58	output	kode output : 7 digit	1001998
59	dana	kode dana : 10 digit	A000000001
60	bank	kode bank : 5 digit	00000
61	kewenangan	kode kewenangan : 1 digit	2
62	lokasi	kode lokasi : 4 digit	0205
63	tipe budget	kode tipe budget : 1 digit	2
64	interco	kode interco : 5 digit	000000
65	cadangan	kode cadangan : 5 digit	000000
66	alamat_email	alamat email satker, maksimal 150 karakter	email@satker.co.id
67	kode_sandi	kode keamanan data	N/A

C. Kontrak Tahun Jamak

No	Nama Field	Keterangan	Contoh
INFORMASI UMUM			
1	Tipe	tipe : new untuk kontrak baru	<i>New</i>
2	tipe_kontrak	tipe kontrak: Multi Year	<i>Annual Year</i>
3	tipe_komitmen	tipe komitmen : Kontrak	Kontrak
4	kode_kppn	kode KPPN harus sesuai dengan kewenangan KPPN pemroses	019
5	CAN <i>Multi Year</i>	untuk pendaftaran baru kontrak tahun Jamak, <i>field</i> CAN <i>Multi Year</i> harus dikosongkan	N/A

No	Nama Field	Keterangan	Contoh
6	CAN (<i>for addendum</i>)	<i>generate</i> nomor CAN mengacu pada nomor PO yang dihasilkan oleh aplikasi SPAN	N/A
7	no_supplier	<ul style="list-style-type: none"> • <i>default null</i>, akan terisi otomatis yang didapat dari hasil kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP, atau • diisi Nomor Register <i>Supplier</i> (NRS) yang diperoleh dari pendaftaran <i>supplier</i> di KPPN, 	N/A
8	nama_supplier	<ul style="list-style-type: none"> • berisi nama <i>supplier</i> dalam kontrak sesuai dengan tipe <i>suppliernya</i> • apabila field no_supplier kosong, maka penentuan <i>header supplier</i> bisa didapat dari kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP 	PT. Eagle X
9	kode_satker	kode satker (6 digit), <i>default</i> kosong untuk sementara <i>field</i> kode satker harus dikosongkan	N/A
10	Npwp	<ul style="list-style-type: none"> • NPWP <i>supplier</i> yang terdiri dari 15 digit, dengan digit ke-10 sampai dengan digit ke-12 merupakan kode KPP • Apabila <i>field</i> no_supplier kosong, maka penentuan <i>header supplier</i> bisa didapat dari kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP 	000000000015000
11	nama_site	kombinasi kode tipe <i>supplier_kode</i> pos (Terisi otomatis oleh sistem)	2_10710
12	kode_tipe_supplier	tipe <i>supplier</i> SPAN sesuai jenis transaksi yang dilakukan	2
13	kode_pos	kode pos <i>supplier</i>	10710
14	nama_bank	nama bank <i>supplier</i>	PT. BANK MANDIRI
15	kode_bank	nomor kode dari bank dimana rekening <i>supplier</i> terdaftar	520008000990
16	kode_swift	kode cabang dari bank luar negeri	BMRIIDJA107
17	no_rekening	nomor rekening bank <i>supplier</i>	112233021360000
18	kode_mata_uang	kode mata uang dan nomor kontrak dijadikan <i>primary key</i> dalam validasi ADK kontrak	IDR
19	tipe_rate	tipe rate: <ul style="list-style-type: none"> • kurs tengah BI, untuk di konversi oleh sitem dari nilai kurs yang sudah di <i>upload</i> di GL pada aplikasi SPAN , atau • user untuk <i>entry</i> nilai kurs yang sudah diketahui sesuai kebutuhan user 	N/A
20	nilai_rate	<ul style="list-style-type: none"> • tipe rate user : diisi nilai kurs untuk mata uang valas, atau • tipe rate kurs tengah BI : <i>null</i>/dikosongkan, secara otomatis akan terisi oleh sistem 	N/A
21	no_kontrak	<ul style="list-style-type: none"> • diisi nomor kontrak, dengan maksimal 150 karakter/digit. • kode mata uang dan nomor kontrak dijadikan <i>primary key</i> dalam validasi ADK kontrak 	001/DTP/2012
22	no_rfc	<i>generate</i> Nomor RFC dihasilkan oleh aplikasi Satker	001/DTP/2012

No	Nama Field	Keterangan	Contoh
23	tanggal_kontrak	<ul style="list-style-type: none"> • format penulisan : DD-MMM-YYY, • Tanggal Kontrak harus lebih awal atau sama dengan tanggal pendaftaran kontrak 	03-JAN-2012
24	tanggal_mulai_kontrak	format penulisan : DD-MMM-YYY	03-JAN-2012
25	tanggal_selesai_kontrak	<ul style="list-style-type: none"> • format penulisan : DD-MMM-YYY, Misal : 01-JAN-2012 • tanggal selesai kontrak harus berbeda tahun dengan tanggal kontrak 	03-DES-2014
26	jangka waktu_pemeliharaan	diisi lama jangka waktu pemeliharaan, maksimal 150 karakter	0
27	tanggal_addendum	untuk pendaftaran kontrak baru, tanggal addendum harus kosong	N/A
28	persentase_loan/goi	perhitungan persentase secara manual dari nilai kontrak sesuai ketentuan yang berlaku (untuk <i>loan</i> /hibah : <i>netto/bruto</i>) dan tidak melebihi persentase 100%	0/100
29	uang_muka	<i>free text</i> diisi keterangan - keterangan yang berkaitan dengan uang muka	N/A
30	Catatan Tambahan	<i>free text</i> maksimum 150 karakter, diisi data yang belum tercantum dalam <i>field</i> data kontrak (nomor dan tanggal DIPA, <i>closing date</i> , nomor <i>loan</i> , Nomor register <i>loan</i> , tgl efektif <i>loan</i> , surat keputusan menteri, dll)	DIPA Nomor : 0558/023-04.2.01/12/2012, tanggal : 09-DES-2011
31	kategori_pinjaman	diisi kategori kategori dari PHLN, maksimal 30 karakter : 2 <i>civil works</i> , 1 <i>goods</i> , etc	N/A
32	No. Addendum	untuk pendaftaran kontrak baru, nomor addendum harus kosong	N/A
33	ketentuan_sanksi	diisi sanksi yang tertuang dalam kontrak, maksimal 150 karakter	denda keterlambatan satu permil perhari, maksimal 5% dari nilai kontrak
34	deskripsi_kontrak	uraian pekerjaan dalam kontrak, maksimal 240 karakter	Pembangunan Gedung Inovasi Teknologi Informasi
35	nilai_kontrak	nilai kontrak tidak boleh melampaui dana yang tersedia dalam pagu DIPA dan harus sama dengan total nilai baris/ <i>line</i>	12000000000
INFORMASI KHUSUS			
36	no_line	N/A	N/A
37	tipe_line	N/A	N/A
38	deskripsi_line	N/A	N/A
39	kategori	N/A	N/A
40	nilai_line	N/A	N/A
41	persentase_uang_muka	N/A	N/A
42	nilai_uang_muka	N/A	N/A
43	persentase_retensi	N/A	N/A
44	nilai_retensi	N/A	N/A
45	no_jadwal_pembayaran	N/A	N/A
46	deskripsi_pembayaran	N/A	N/A
47	tanggal_pembayaran	N/A	N/A
48	nilai_pembayaran	N/A	N/A
49	pengembalian_uang_muka	N/A	N/A
50	potongan_retensi	N/A	N/A
51	no_distribusi	N/A	N/A
INFORMASI PEMBEBANAN			
52	tipe_akun	N/A	N/A
53	kode_akun	N/A	N/A
54	satker	N/A	N/A

M

No	Nama Field	Keterangan	Contoh
55	kppn	N/A	N/A
56	akun	N/A	N/A
57	program	N/A	N/A
58	output	N/A	N/A
59	dana	N/A	N/A
60	bank	N/A	N/A
61	kewenangan	N/A	N/A
62	lokasi	N/A	N/A
63	tipe budget	N/A	N/A
64	interco	N/A	N/A
65	cadangan	N/A	N/A
66	alamat_email	N/A	email@satker.co.id
67	kode_sandi	N/A	N/A

D. Addendum/Perubahan Kontrak Tahun Jamak

No	Nama Field	Keterangan	Contoh
INFORMASI UMUM			
1	tipe	tipe: Addendum untuk perubahan/addendum kontrak	Addendum
2	tipe_kontrak	tipe kontrak: Multi Year	Multi Year
3	tipe_komitmen	tipe komitmen : Kontrak	Kontrak
4	kode_kppn	kode KPPN harus sesuai dengan kewenangan KPPN pemroses	019
5	CAN Multi Year	<ul style="list-style-type: none"> default : kosong, atau diisi nomor CAN Multi Year dari kontrak yang akan di addendum 	N/A
6	CAN (for addendum)	generate nomor CAN mengacu pada nomor PO yang dihasilkan oleh aplikasi SPAN	N/A
7	no_supplier	<ul style="list-style-type: none"> default null, akan terisi otomatis yang didapat dari hasil kombinasi nama supplier dan NPWP, atau diisi Nomor Register Supplier (NRS) yang diperoleh dari pendaftaran supplier di KPPN, 	N/A
8	nama_supplier	<ul style="list-style-type: none"> berisi nama supplier dalam kontrak sesuai dengan tipe supplier-nya apabila field no_supplier kosong, maka penentuan header supplier bisa didapat dari kombinasi nama supplier dan NPWP 	PT. Eagle X
9	kode_satker	kode satker (6 digit), default kosong untuk sementara field kode satker harus dikosongkan	N/A
10	npwp	<ul style="list-style-type: none"> NPWP supplier yang terdiri dari 15 digit, dengan digit ke-10 sampai dengan digit ke-12 merupakan kode KPP apabila field no_supplier kosong, maka penentuan header supplier bisa didapat dari kombinasi nama supplier dan NPWP 	000000000015000
11	nama_site	kombinasi kode tipe supplier_kode pos (Terisi otomatis oleh sistem)	2_10710
12	kode_tipe_supplier	tipe supplier SPAN sesuai jenis transaksi yang dilakukan	2
13	kode_pos	Kode pos supplier	10710
14	nama_bank	nama bank supplier r	PT. BANK MANDIRI
15	kode_bank	nomor kode dari bank dimana	520008000990

4

No	Nama Field	Keterangan	Contoh
		rekening <i>supplier</i> terdaftar	
16	kode_swift	kode cabang dari bank luar negeri	BMRIIDJA107
17	no_rekening	nomor rekening bank <i>supplier</i>	112233021360000
18	kode_mata_uang	kode mata uang dan nomor kontrak dijadikan <i>primary key</i> dalam validasi ADK kontrak	IDR
19	tipe_rate	tipe rate : <ul style="list-style-type: none"> • kurs tengah BI, untuk di konversi oleh sistem dari nilai kurs yang sudah di <i>upload</i> di GL pada aplikasi SPAN , atau • user untuk entri nilai kurs yang sudah diketahui sesuai kebutuhan <i>user</i> 	N/A
20	nilai_rate	<ul style="list-style-type: none"> • tipe rate user : diisi nilai kurs untuk mata uang valas, atau • tipe rate kurs tengah BI : <i>null</i>/dikosongkan, secara otomatis akan terisi oleh sistem 	N/A
21	no_kontrak	<ul style="list-style-type: none"> • diisi nomor kontrak, dengan maksimal 150 karakter / digit. • kode mata uang dan nomor kontrak dijadikan <i>primary key</i> dalam validasi ADK kontrak 	001/DTP/2012
22	no_rfc	<i>generate</i> nomor RFC dihasilkan oleh aplikasi satker	001/DTP/2012
23	tanggal_kontrak	<ul style="list-style-type: none"> • format penulisan : DD-<i>MMM</i>-<i>YYY</i>, • tanggal Kontrak harus lebih awal atau sama dengan tanggal pendaftaran kontrak 	03-JAN-2012
24	tanggal_mulai_kontrak	format penulisan : DD- <i>MMM</i> - <i>YYY</i>	03-JAN-2012
25	tanggal_selesai_kontrak	<ul style="list-style-type: none"> • format penulisan : DD-<i>MMM</i>-<i>YYY</i>, Misal : 01-JAN-2012 • tanggal selesai kontrak harus berbeda tahun dengan tanggal kontrak 	03-DES-2012
26	jangka waktu_pemeliharaan	diisi lama jangka waktu pemeliharaan, maksimal 150 karakter	0
27	tanggal_addendum	tanggal addendum kontrak format penulisan : DD- <i>MMM</i> - <i>YYY</i>	03-MEI-2012
28	persentase_loan/goi	perhitungan persentase secara manual dari nilai kontrak sesuai ketentuan yang berlaku (untuk <i>loan</i> /hibah : <i>netto/bruto</i>) dan tidak melebihi persentase 100%	0/100
29	uang_muka	<i>free text</i> diisi keterangan - keterangan yang berkaitan dengan uang muka	N/A
30	Catatan Tambahan	<i>free text</i> maksimum 150 karakter, diisi data yang belum tercantum dalam field data kontrak (nomor dan tanggal DIPA, <i>closing date</i> , nomor <i>loan</i> , nomor register <i>loan</i> , tgl efektif <i>loan</i> , surat keputusan menteri, dll)	DIPA Nomor : 0558/023-04.2.01/12/2012, tanggal : 09-DES-2011
31	kategori_pinjaman	diisi kategori kategori dari PHLN, maksimal 30 karakter : 2 <i>civil works</i> , 1 <i>goods</i> , etc	N/A
32	No. Addendum	diisi nomor addendum, maksimal 150 karakter	001/add-01/DTP/2012
33	ketentuan_sanksi	diisi sanksi yang tertuang dalam kontrak, maksimal 150 karakter	denda keterlambatan satu permil perhari, maksimal 5% dari nilai kontrak

4

No	Nama Field	Keterangan	Contoh
34	deskripsi_kontrak	uraian pekerjaan dalam kontrak, maksimal 240 karakter	Pembangunan Gedung Inovasi Teknologi Informasi
35	nilai_kontrak	nilai kontrak tidak boleh melampaui dana yang tersedia dalam pagu DIPA dan harus sama dengan total nilai baris / line	12000000000
INFORMASI KHUSUS			
36	no_line	N/A	N/A
37	tipe_line	N/A	N/A
38	deskripsi_line	N/A	N/A
39	kategori	N/A	N/A
40	nilai_line	N/A	N/A
41	persentase_uang_muka	N/A	N/A
42	nilai_uang_muka	N/A	N/A
43	persentase_retensi	N/A	N/A
44	nilai_retensi	N/A	N/A
45	no_jadwal_pembayaran	N/A	N/A
46	deskripsi_pembayaran	N/A	N/A
47	tanggal_pembayaran	N/A	N/A
48	nilai_pembayaran	N/A	N/A
49	pengembalian_uang_muka	N/A	N/A
50	potongan_retensi	N/A	N/A
51	no_distribusi	N/A	N/A
INFORMASI PEMBEBANAN			
52	tipe_akun	N/A	N/A
53	kode_akun	N/A	N/A
54	satker	N/A	N/A
55	kppn	N/A	N/A
56	akun	N/A	N/A
57	program	N/A	N/A
58	output	N/A	N/A
59	dana	N/A	N/A
60	bank	N/A	N/A
61	kewenangan	N/A	N/A
62	lokasi	N/A	N/A
63	tipe budget	N/A	N/A
64	interco	N/A	N/A
65	cadangan	N/A	N/A
66	alamat_email	N/A	email@satker.co.id
67	kode_sandi	N/A	N/A

E. Komitmen Tahunan Kontrak Tahun Jamak

No	Nama Field	Keterangan	Contoh
INFORMASI UMUM			
1	tipe	tipe : new untuk kontrak baru	<i>New</i>
2	tipe_kontrak	tipe kontrak: Annual Year	<i>Annual Year</i>
3	tipe_komitmen	tipe komitmen: Release Multi Year	<i>Release Multi Year</i>
4	kode_kppn	kode KPPN harus sesuai dengan kewenangan KPPN pemroses	019
5	CAN Multi Year	<ul style="list-style-type: none"> • default : kosong, atau • diisi nomor CAN Multi Year dari kontrak Multi Year yang akan di Release 	N/A
6	CAN (for addendum)	generate nomor CAN mengacu pada nomor PO yang dihasilkan oleh aplikasi SPAN	N/A
7	no_supplier	<ul style="list-style-type: none"> • default null, akan terisi otomatis yang didapat dari hasil kombinasi nama supplier dan NPWP, atau 	N/A

No	Nama Field	Keterangan	Contoh
		<ul style="list-style-type: none"> • diisi Nomor Register <i>Supplier</i> (NRS) yang diperoleh dari pendaftaran supplier di KPPN, 	
8	nama_supplier	<ul style="list-style-type: none"> • berisi nama <i>supplier</i> dalam kontrak sesuai dengan tipe <i>supplier</i>-nya • apabila <i>field no_supplier</i> kosong, maka penentuan <i>header supplier</i> bisa didapat dari kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP 	PT. Eagle X
9	kode_satker	kode satker (6 digit), <i>default</i> kosong untuk sementara field kode satker harus dikosongkan	N/A
10	npwp	<ul style="list-style-type: none"> • NPWP <i>supplier</i> yang terdiri dari 15 digit, dengan digit ke-10 sampai dengan digit ke-12 merupakan kode KPP • apabila <i>field no_supplier</i> kosong, maka penentuan <i>header supplier</i> bisa didapat dari kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP 	000000000015000
11	nama_site	kombinasi kode tipe <i>supplier_kode pos</i> (terisi otomatis oleh sistem)	2_10710
12	kode_tipe_supplier	tipe <i>supplier</i> SPAN sesuai jenis transaksi yang dilakukan	2
13	kode_pos	kode pos <i>supplier</i>	10710
14	nama_bank	nama bank <i>supplier</i>	PT. BANK MANDIRI
15	kode_bank	nomor kode dari bank dimana rekening <i>supplier</i> terdaftar	520008000990
16	kode_swift	kode cabang dari bank luar negeri	BMRIIDJA107
17	no_rekening	nomor rekening bank <i>supplier</i>	112233021360000
18	kode_mata_uang	kode mata uang dan nomor kontrak dijadikan <i>primary key</i> dalam validasi adk kontrak	IDR
19	tipe_rate	Tipe rate : <ul style="list-style-type: none"> • kurs tengah BI, untuk di konversi oleh sistem dari nilai kurs yang sudah di <i>upload</i> di GL pada aplikasi SPAN , atau • user untuk entri nilai kurs yang sudah diketahui sesuai kebutuhan <i>user</i> 	N/A
20	nilai_rate	<ul style="list-style-type: none"> • tipe rate user : diisi nilai kurs untuk mata uang valas, atau • tipe rate kurs tengah BI : <i>null</i>/dikosongkan, secara otomatis akan terisi oleh sistem 	N/A
21	no_kontrak	<ul style="list-style-type: none"> • diisi nomor kontrak yang sama dengan nomor kontrak <i>Multi Year</i>-nya, dengan maksimal 150 karakter/digit. • kode mata uang dan nomor kontrak dijadikan <i>primary key</i> dalam validasi adk kontrak 	001/DTP/2012
22	no_rfc	<i>generate</i> nomor RFC dihasilkan oleh aplikasi satker	001/DTP/2012
23	tanggal_kontrak	<ul style="list-style-type: none"> • format penulisan : DD-<i>MMM</i>-<i>YYY</i>, • diisi sama dengan tanggal kontrak <i>Multi Year</i> 	03-JAN-2012
24	tanggal_mulai_kontrak	format penulisan : DD- <i>MMM</i> - <i>YYY</i>	N/A
25	tanggal_selesai_kontrak	<ul style="list-style-type: none"> • format penulisan : DD-<i>MMM</i>-<i>YYY</i>, Misal : 01-JAN-2012 • tanggal selesai kontrak harus 	N/A

A

No	Nama Field	Keterangan	Contoh
		dalam tahun yang sama dengan tanggal kontrak	
26	jangka waktu_pemeliharaan	diisi lama jangka waktu pemeliharaan, maksimal 150 karakter	N/A
27	tanggal_addendum	untuk pendaftaran kontrak baru, tanggal addendum harus kosong	N/A
28	persentase_loan/goi	perhitungan persentase secara manual dari nilai kontrak sesuai ketentuan yang berlaku (untuk loan/hibah : <i>netto/bruto</i>) dan tidak melebihi persentase 100%	N/A
29	uang_muka	<i>free text</i> diisi keterangan-keterangan yang berkaitan dengan uang muka	N/A
30	Catatan Tambahan	<i>free text</i> maksimum 150 karakter, diisi data yang belum tercantum dalam field data kontrak (nomor dan tanggal DIPA, <i>closing date</i> , nomor <i>loan</i> , nomor register <i>loan</i> , tgl efektif <i>loan</i> , surat keputusan menteri, dll)	DIPA Nomor : 0558/023-04.2.01/12/2012, tanggal : 09-DES-2011
31	kategori_pinjaman	diisi kategori kategori dari PHLN, maksimal 30 karakter: 2 <i>civil works</i> , 1 <i>goods</i> , <i>etc</i>	N/A
32	No. Addendum	untuk pendaftaran kontrak baru, nomor addendum harus kosong	N/A
33	ketentuan_sanksi	diisi sanksi yang tertuang dalam kontrak, maksimal 150 karakter	N/A
34	deskripsi_kontrak	uraian pekerjaan dalam kontrak, maksimal 240 karakter	Pembangunan Gedung Inovasi Teknologi Informasi
35	nilai_kontrak	<ul style="list-style-type: none"> • nilai kontrak tidak boleh melampaui dana yang tersedia dalam pagu DIPA dan harus sama dengan total nilai baris/line • nilai kontrak <i>release</i> harus lebih kecil atau sama dengan nilai kontrak <i>Multi Year</i> 	12000000000
INFORMASI KHUSUS			
36	no_line	nomor <i>line</i> bisa lebih dari satu apabila terdapat perbedaan cara tarik (<i>field</i> "kategori")	1
37	tipe_line	<i>default</i> berisi : Belanja/Biaya	Belanja/Biaya
38	deskripsi_line	uraian dari <i>line</i> (<i>free text</i>), maksimal 240 karakter	Pembangunan Gedung Inovasi Teknologi Informasi
39	kategori	diisikan kode cara tarik dalam pembayaran	RM
40	nilai_line	<ul style="list-style-type: none"> • jumlah total nilai baris harus sama dengan nilai kontrak • jumlah seluruh jadwal pembayaran yang berada dibawahnya harus sama dengan nilai baris 	12000000000
41	persentase_uang_muka	besaran persentase uang muka terhadap nilai baris	N/A
42	nilai_uang_muka	jumlah nominal nilai uang muka sesuai dengan persentase uang muka	N/A
43	persentase_retensi	besaran persentase retensi terhadap nilai baris	N/A
44	nilai_retensi	jumlah nominal nilai uang retensi sesuai persentase retensi	N/A
45	no_jadwal_pembayaran	nomor urut dari jadwal rencana pembayaran	1

1

No	Nama Field	Keterangan	Contoh
46	dekripsi_pembayaran	uraian dari jadwal pembayaran (<i>free text</i>): <i>termyn1</i> , maksimal 240 karakter	Pembangunan Gedung Inovasi Teknologi Informasi
47	tanggal_pembayaran	<ul style="list-style-type: none"> tanggal rencana pembayaran akan dilakukan format penulisan : DD-MMM-YYY 	12-JUN-2012
48	nilai_pembayaran	jumlah nominal nilai uang tiap jadwal rencana pembayaran	12000000000
49	pengembalian_uang_muka	jumlah nominal angsuran pengembalian uang muka tiap jadwal rencana pembayaran	N/A
50	potongan_retensi	jumlah nominal potongan retensi tiap jadwal rencana pembayaran	N/A
51	no_distribusi	nomor distribusi <i>default</i> : 1	1
INFORMASI PEMBEBANAN			
52	tipe_akun	tipe akun <i>default</i> : <i>Expense</i>	Expense
53	kode_akun	kombinasi 12 segmen COA	189772.023.531111.023040 5.1001998.A000000001.00 00.2.0205.2.000000.000000
54	satker	kode satker : 6 digit	189772
55	kppn	kode KPPN: 3 digit	019
56	akun	kode Akun : 6 digit	531111
57	program	kode Program : 7 digit	0230405
58	output	kode output : 7 digit	1001998
59	dana	kode dana : 10 digit	A0000000001
60	bank	kode bank : 5 digit	00000
61	kewenangan	kode kewenangan : 1 digit	2
62	lokasi	kode lokasi : 4 digit	0205
63	tipe budget	kode tipe budget : 1 digit	2
64	interco	kode interco : 5 digit	000000
65	cadangan	kode cadangan : 5 digit	000000
66	alamat_email	alamat email satker, maksimal 150 karakter	email@satker.co.id
67	kode_sandi	kode keamanan data	N/A

F. Addendum/Perubahan Komitmen Tahunan Kontrak Tahun Jamak

No	Nama Field	Keterangan	Contoh
INFORMASI UMUM			
1	tipe	tipe: Addendum untuk perubahan/addendum kontrak	Addendum
2	tipe_kontrak	tipe kontrak: Annual Year	<i>Annual Year</i>
3	tipe_komitmen	tipe komitmen: Release Multi Year	<i>Release Multi Year</i>
4	kode_kppn	kode KPPN harus sesuai dengan kewenangan KPPN pemroses	019
5	CAN <i>Multi Year</i>	<ul style="list-style-type: none"> <i>default</i> : kosong, atau diisi nomor CAN Multi Year dari kontrak Multi Year yang akan di Release 	N/A
6	CAN (<i>for addendum</i>)	<ul style="list-style-type: none"> <i>default</i> : kosong, atau diisi nomor CAN kontrak <i>release</i> yang akan di addendum 	N/A
7	no_supplier	<ul style="list-style-type: none"> <i>default null</i>, akan terisi otomatis yang didapat dari hasil kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP, atau diisi Nomor Register <i>Supplier</i> (NRS) yang diperoleh dari pendaftaran <i>supplier</i> di KPPN, 	N/A
8	nama_supplier	<ul style="list-style-type: none"> berisi nama <i>supplier</i> dalam kontrak sesuai dengan tipe suppliernya 	PT. Eagle X

af

No	Nama Field	Keterangan	Contoh
		<ul style="list-style-type: none"> apabila <i>field no_supplier</i> kosong, maka penentuan <i>header supplier</i> bisa didapat dari kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP 	
9	kode_satker	kode satker (6 digit), <i>default</i> kosong untuk sementara <i>field</i> kode satker harus dikosongkan	N/A
10	npwp	<ul style="list-style-type: none"> NPWP <i>supplier</i> yang terdiri dari 15 digit, dengan digit ke-10 sampai dengan digit ke-12 merupakan kode KPP apabila <i>field no_supplier</i> kosong, maka penentuan <i>header supplier</i> bisa didapat dari kombinasi nama <i>supplier</i> dan NPWP 	000000000015000
11	nama_site	kombinasi kode tipe <i>supplier_kode</i> pos (terisi otomatis oleh sistem)	2_10710
12	kode_tipe_supplier	tipe <i>supplier</i> SPAN sesuai jenis transaksi yang dilakukan	2
13	kode_pos	kode pos <i>supplier</i>	10710
14	nama_bank	nama bank <i>supplier</i>	PT. BANK MANDIRI
15	kode_bank	nomor kode dari bank dimana rekening <i>supplier</i> terdaftar	520008000990
16	kode_swift	kode cabang dari bank luar negeri	BMRIIDJA107
17	no_rekening	nomor rekening bank <i>supplier</i>	112233021360000
18	kode_mata_uang	kode mata uang dan nomor kontrak dijadikan <i>primary key</i> dalam validasi ADK kontrak	IDR
19	tipe_rate	tipe rate : <ul style="list-style-type: none"> kurs tengah BI, untuk di konversi oleh sitem dari nilai kurs yang sudah di <i>upload</i> di GL pada aplikasi SPAN , atau user untuk <i>entry</i> nilai kurs yang sudah diketahui sesuai kebutuhan <i>user</i> 	N/A
20	nilai_rate	<ul style="list-style-type: none"> tipe rate user : diisi nilai kurs untuk mata uang valas, atau tipe rate kurs tengah BI : <i>null</i>/dikosongkan, secara otomatis akan terisi oleh sistem 	N/A
21	no_kontrak	<ul style="list-style-type: none"> diisi nomor kontrak yang sama dengan nomor kontrak <i>Multi Year</i>-nya, dengan maksimal 150 karakter/digit. kode mata uang dan nomor kontrak dijadikan <i>primary key</i> dalam validasi ADK kontrak 	001/DTP/2012
22	no_rfc	<i>generate</i> nomor RFC dihasilkan oleh aplikasi satker	001/DTP/2012
23	tanggal_kontrak	<ul style="list-style-type: none"> format penulisan : DD-MMM-YYY, diisi sama dengan tanggal kontrak <i>Multi Year</i> 	03-JAN-2012
24	tanggal_mulai_kontrak	format penulisan : DD-MMM-YYY	N/A
25	tanggal_selesai_kontrak	<ul style="list-style-type: none"> format penulisan : DD-MMM-YYY, Misal : 01-JAN-2012 Tanggal selesai kontrak harus dalam tahun yang sama dengan tanggal kontrak 	N/A
26	jangka_waktu_pemeliharaan	diisi lama jangka waktu pemeliharaan, maksimal 150 karakter	N/A

No	Nama Field	Keterangan	Contoh
27	tanggal_addendum	tanggal addendum kontrak format penulisan : DD-MMM-YYY	03-MEI-2012
28	persentase_loan/goi	perhitungan persentase secara manual dari nilai kontrak sesuai ketentuan yang berlaku (untuk loan/hibah : <i>netto/bruto</i>) dan tidak melebihi persentase 100%	N/A
29	uang_muka	<i>free text</i> diisi keterangan-keterangan yang berkaitan dengan uang muka	N/A
30	Catatan Tambahan	<i>free text</i> maksimum 150 karakter, diisi data yang belum tercantum dalam <i>field</i> data kontrak (nomor dan tanggal DIPA, <i>closing date</i> , nomor <i>loan</i> , nomor register <i>loan</i> , tgl efektif <i>loan</i> , surat keputusan menteri, dll)	DIPA Nomor : 0558/023-04.2.01/12/2012, tanggal : 09-DES-2011
31	kategori_pinjaman	diisi kategori kategori dari PHLN, maksimal 30 karakter: 2 <i>civil works</i> , 1 <i>goods</i> , etc	N/A
32	No. Addendum	diisi nomor addendum, maksimal 150 karakter	001/add-01/DTP/2012
33	ketentuan_sanksi	diisi sanksi yang tertuang dalam kontrak, maksimal 150 karakter	N/A
34	deskripsi_kontrak	uraian pekerjaan dalam kontrak, maksimal 240 karakter	Pembangunan Gedung Inovasi Teknologi Informasi
35	nilai_kontrak	<ul style="list-style-type: none"> • nilai kontrak tidak boleh melampaui dana yang tersedia dalam pagu DIPA dan harus sama dengan total nilai baris/line • nilai kontrak <i>release</i> harus lebih kecil atau sama dengan nilai kontrak <i>Multi Year</i> 	12000000000
INFORMASI KHUSUS			
36	no_line	nomor <i>line</i> bisa lebih dari satu apabila terdapat perbedaan cara tarik (<i>field</i> "kategori")	1
37	tipe_line	<i>default</i> berisi : belanja/biaya	Belanja/Biaya
38	deskripsi_line	uraian dari <i>line</i> (<i>free text</i>), maksimal 240 karakter	Pembangunan Gedung Inovasi Teknologi Informasi
39	kategori	diisikan kode cara tarik dalam pembayaran	RM
40	nilai_line	<ul style="list-style-type: none"> • jumlah total nilai baris harus sama dengan nilai kontrak • jumlah seluruh jadwal pembayaran yang berada dibawahnya harus sama dengan nilai baris 	12000000000
41	persentase_uang_muka	besaran persentase uang muka terhadap nilai baris	N/A
42	nilai_uang_muka	jumlah nominal nilai uang muka sesuai dengan persentase uang muka	N/A
43	persentase_retensi	besaran persentase retensi terhadap nilai baris	N/A
44	nilai_retensi	jumlah nominal nilai uang retensi sesuai persentase retensi	N/A
45	no_jadwal_pembayaran	nomor urut dari jadwal rencana pembayaran	1
46	dekripsi_pembayaran	uraian dari jadwal pembayaran (<i>free text</i>) : <i>termyn1</i> , maksimal 240 karakter	Pembangunan Gedung Inovasi Teknologi Informasi
47	tanggal_pembayaran	<ul style="list-style-type: none"> • tanggal rencana pembayaran akan dilakukan 	12-JUN-2012

No	Nama Field	Keterangan	Contoh
		• format penulisan : DD- <i>MMM</i> - <i>YYY</i>	
48	nilai_pembayaran	jumlah nominal nilai uang tiap jadwal rencana pembayaran	12000000000
49	pengembalian_uang_muka	jumlah nominal angsuran pengembalian uang muka tiap jadwal rencana pembayaran	N/A
50	potongan_retensi	jumlah nominal potongan retensi tiap jadwal rencana pembayaran	N/A
51	no_distribusi	nomor distribusi <i>default</i> : 1	1
INFORMASI PEMBEBANAN			
52	tipe_akun	tipe akun <i>default</i> : <i>Expense</i>	<i>Expense</i>
53	kode_akun	kombinasi 12 segmen COA	189772.023.531111.023040 5.1001998.A000000001.00 00.2.0205.2.000000.000000
54	satker	kode satker : 6 digit	189772
55	kppn	kode KPPN: 3 digit	019
56	akun	kode Akun : 6 digit	531111
57	program	kode Program : 7 digit	0230405
58	output	kode output : 7 digit	1001998
59	dana	kode dana : 10 digit	A000000001
60	bank	kode bank : 5 digit	00000
61	kewenangan	kode kewenangan : 1 digit	2
62	lokasi	kode lokasi : 4 digit	0205
63	tipe budget	kode tipe budget : 1 digit	2
64	interco	kode interco : 5 digit	000000
65	cadangan	kode cadangan : 5 digit	000000
66	alamat_email	alamat email satker, maksimal 150 karakter	email@satker.co.id
67	kode_sandi	kode keamanan data	N/A

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


 1 MARWANTO HARJOWIRYONO 7

LAMPIRAN XVIII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-58/PB/2013 TENTANG PENGELOLAAN DATA SUPPLIER DAN DATA KONTRAK DALAM SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

CONTOH PENCANTUMAN NILAI RENCANA PEMBAYARAN TERKAIT SUMBER PEMBIAYAAN

I. Contoh pencantuman Nilai Kontrak dalam SPAN

A. Perhitungan Nilai Kontrak dengan cara Netto

1. Contoh Kontrak dibiayai oleh 2 sumber pembiayaan PHLN dan Rupiah Murni, dengan porsi perhitungan = PHLN : Pendamping = 80% : 20%

Nilai Kontrak	:	110.000.000,00	
Nilai Fisik	:	100.000.000,00	
Terdiri dari :			
• Porsi PHLN	:	80.000.000,00	
• Porsi Pendamping	:	20.000.000,00	
PPN			
Terdiri dari :			
• Porsi PHLN "Tidak dipungut"	:	8.000.000,00	
• Porsi Pendamping "dipungut"	:	2.000.000,00	

2. Nilai Kontrak yang harus di Cantumkan dalam SPAN

• Porsi PHLN	:	Nilai Fisik		= 80.000.000,00
• Porsi Pendamping	:	Nilai Fisik + PPN		= 22.000.000,00
				102.000.000,00

3. Cara Menghitung

Nilai Fisik	:	100/110 x Nilai Kontrak		
		100/110 x 110.000.000,00	=	100.000.000,00
Terdiri dari :				
• Porsi PHLN	:	Porsentase PHLN x Nilai Fisik		
		80% x 100.000.000,00	=	80.000.000,00
• Porsi Pendamping	:	Porsentase Pendamping x Nilai Fisik		
		20% x 100.000.000,00	=	20.000.000,00
PPN				
		PPN x Nilai Fisik		
		10% x 100.000.000,00	=	10.000.000,00
Terdiri dari :				
• Porsi PHLN	:	PPN x Porsi PHLN		
		10% x 80.000.000,00	=	8.000.000,00
• Porsi Pendamping	:	PPN x Porsi Pendamping		
		10% x 20.000.000,00	=	2.000.000,00

B. Perhitungan Nilai Kontrak dengan cara Bruto

1. Contoh Kontrak dibiayai oleh 2 sumber pembiayaan PHLN dan Rupiah Murni, dengan porsi perhitungan = PHLN : Pendamping = 80% : 20%

Nilai Kontrak	:	110.000.000,00	
Nilai Fisik	:	100.000.000,00	
Terdiri dari :			
• Porsi PHLN	:	88.000.000,00	
• Porsi Pendamping	:	12.000.000,00	

PPN :
 Terdiri dari :
 • Porsi PHLN "Tidak dipungut" : 8.800.000,00
 • Porsi Pendamping "dipungut" : 1.200.000,00

2. Nilai Kontrak yang harus di Cantumkan dalam SPAN

• Porsi PHLN : Nilai Fisik = 88.000.000,00
 • Porsi Pendamping : Nilai Fisik + PPN = 13.200.000,00
 101.200.000,00

3. Cara Menghitung

Nilai Fisik : $100/110 \times \text{Nilai Kontrak}$
 $100/110 \times 110.000.000,00 = 100.000.000,00$

Terdiri dari :
 • Porsi PHLN : Porsentase PHLN x Nilai Kontrak
 $80\% \times 110.000.000,00 = 88.000.000,00$
 • Porsi Pendamping : (Porsentase Pendamping x Nilai Kontrak) - PPN
 $(20\% \times 110.000.000,00) - 10.000.000,00 = 12.000.000,00$

PPN : PPN x Nilai Fisik
 $10\% \times 100.000.000,00 = 10.000.000,00$

Terdiri dari :
 • Porsi PHLN : PPN x Porsi PHLN
 $10\% \times 88.000.000,00 = 8.800.000,00$
 • Porsi Pendamping : PPN x Porsi Pendamping
 $10\% \times 12.000.000,00 = 1.200.000,00$

II. Contoh Pencantuman dalam Struktur Data Kontrak Terkait Rencana Pembayaran dan perbedaan sumber pembiayaan

Nilai Kontrak	No Baris	Kategori	Nilai Baris	No Jadwal Pembayaran	Tanggal Jadwal Pembayaran	Nilai Pembayaran
102.000.000	1	RK	80.000.000	1	01-Mar-2012	50.000.000
				2	01-Jun-2012	30.000.000
	2	RM	22.000.000	1	01-Mar-2012	13.750.000
				2	01-Jun-2012	8.250.000

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


 MARWANTO HARJOWIRYONO

**CONTOH PENCATATAN KONTRAK YANG DIPERLAKUKAN
SEBAGAI KONTRAK KONSORSIUM**

A. Pendaftaran *Supplier* Konsorsium

- Nama *Supplier/ Header* : “KONSORSIUM/Nomor Kontrak”
- *Site Address* : 1 *Site Supplier - tipe supplier* : 6_XXXXX
- *Site Bank/ Pemegang Rekening*:

Nama Pemegang Rekening	Nomor Rekening	NPWP
PT. A	12345678	000000000051081
PT. B	12345679	000000000051082
PT. C	12345670	000000000051083

- Menghasilkan Nama *Supplier* : Konsorsium/01/DTP/2013
- Nomor Register *Supplier/NRS* : 123

Contoh pengisian elemen data *Supplier* Konsorsium

SUPPLIER TIPE 6 (PENERUSAN PINJAMAN)

NO	NAMA KOLOM	DATA YANG DIISIKAN	CONTOH PENGISIAN
1.	nama supplier*	Nama konsorsium	Konsorsium/01/DTP/2013
2.	NPWP*	NPWP konsorsium	000000000015000
3.	no supplier	Tidak perlu diisi	
4.	kode satker	Tidak perlu diisi	
5.	nama site*	Kombinasi kode tipe <i>supplier</i> kode pos	6_10710
6.	kode negara*	Kode negara alamat penerima pembayaran	ID
7.	kode kppn*	Kode Kantor Bayar	019
8.	alamat1*	Alamat dari data pada “nama <i>supplier</i> ”	Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20
9.	alamat2	Kolom tambahan jika panjang karakter alamat1 belum mencukupi	
10.	Kota	Nama kota dari alamat <i>supplier</i>	Jakarta Barat
11.	Propinsi	Nama provinsi dari alamat <i>supplier</i>	DKI Jakarta
12.	Email	email milik “nama <i>supplier</i> ” pada informasi pokok <i>supplier</i>	email@domain.co.id
13.	no telpon	nomor telepon milik “nama <i>supplier</i> ” pada informasi pokok <i>supplier</i>	02156987423
14.	kode pos*	kode pos alamat <i>supplier</i>	10710
15.	kode tipe supplier*	tipe <i>supplier</i> SPAN sesuai jenis transaksi yang dilakukan	6
16.	kode negara asal bank *	kode negara sesuai referensi negara (2 digit)	ID
17.	kode bank*(hanya jika kode negara asal bank adalah Indonesia)	Kode negara bank dimana rekening terdaftar	
18.	nama bank*	nama bank sesuai dengan referensi kode bank	PT. BANK MANDIRI
19.	kode swift*(hanya jika kode negara bank selain Indonesia)	Diisikan jika ada (khusus bank luar negeri)	520008000990
20.	nama cabang bank*	isikan: INDONESIA	INDONESIA
21.	alamat bank	alamat dari bank dimana rekening pihak ketiga berada	Jl. Situ Gintung Utama1, Jakarta Selatan

NO	NAMA KOLOM	DATA YANG DIISI	CONTOH PENGISIAN
22.	nama rekening* pemilik	nama rekening sebagaimana dicatat oleh bank milik pihak ketiga/penerima penerusan pinjaman	PT. A
23.	no rekening*	nomor rekening yang menjadi tujuan pembayaran	12345678
24.	IBAN	Diisikan jika ada (khusus bank luar negeri)	
25.	mata uang*	mata uang rekening yang menjadi tujuan pembayaran	IDR
26.	detail nama cabang bank	nama cabang bank	
27.	nama pegawai/pemda/penerusan pinjaman*	Nama pihak ketiga penerima penerusan pinjaman	PT. A
28.	NPWP*	NPWP pihak ketiga penerima penerusan pinjaman	000000000051081
29.	NIP	Tidak perlu diisi	
30.	Lokasi	Tidak perlu diisi	
31.	alamat1*	Alamat dari data pada "nama supplier"	Jl.Pondok Cabe Timur 24, Jakarta Selatan
32.	alamat2	Kolom tambahan jika panjang karakter alamat1 belum mencukupi	
33.	Kota*	Nama kota dari alamat penerima penerusan pinjaman	Jakarta
34.	propinsi	Nama provinsi dari alamat penerima penerusan pinjaman	
35.	kode pos	Kode pos alamat penerima penerusan pinjaman	00000
36.	kode negara*	Kode negara alamat penerima penerusan pinjaman	ID

*= harus diisi

B. Pencatatan Kontrak Konsorsium

- No. Kontrak Konsorsium : 01/DTP/2013
- Nilai Kontrak Konsorsium : IDR. 1.000.000

Pencatatan kontrak untuk masing-masing anggota konsorsium:

1. Kontrak untuk PT. A

Nama *Supplier* : Konsorsium/01/DTP/2013
 NRS : 123
 Nomor Rekening : 12345678
 NPWP : 000000000051081
 Nomor Kontrak : 01/DTP/2013 –PT. A
 Nilai Kontrak : IDR. 500.000
 Nomor Register : A/019.001/0/0
 Kontrak/CAN

2. Kontrak untuk PT. B

Nama *Supplier* : Konsorsium/01/DTP/2013
 NRS : 123
 Nomor Rekening : 12345679
 NPWP : 000000000051082
 Nomor Kontrak : 01/DTP/2013 –PT. B
 Nilai Kontrak : IDR. 300.000
 Nomor Register : A/019.002/0/0
 Kontrak/CAN

3. Kontrak untuk PT. C

Nama *Supplier* : Konsorsium/01/DTP/2013
 NRS : 123
 Nomor Rekening : 12345670
 NPWP : 000000000051083
 Nomor Kontrak : 01/DTP/2013 –PT. C
 Nilai Kontrak : IDR. 200.000
 Nomor Register : A/019.003/0/0
 Kontrak/CAN

Contoh pengisian elemen data Kontrak Konsorsium dengan ilustrasi didaftarkan sebagai kontrak tahunan

No	Nama Field	Keterangan	Contoh	Divalidasi oleh Sistem
1	tipe	tipe : new untuk kontrak baru Addendum untuk perubahan data	New / Addendum	Ya
2	Tipe kontrak	tipe kontrak: Annual Year	Annual Year	Ya
3	Tipe komitmen	tipe komitmen : Kontrak	Kontrak	Ya
4	Nama Organisasi	Berisi kode KPPN yang harus sesuai dengan kewenangan KPPN pemroses	019	Ya
5	CAN Multi Year	Untuk pendaftaran kontrak tahunan, kolom CAN <i>Multi Year</i> ini kosong	Kosong	Ya
6	CAN Annual	<ul style="list-style-type: none"> Pada saat pendaftaran Addendum Kontrak Tahunan, kolom ini berisi nomor CAN Kontrak Tahunan sebelum addendum berkenaan Pada saat pendaftaran kontrak tahunan baru, kolom CAN Annual ini kosong 	A/019.001/0/0	Ya
7	No supplier	<ul style="list-style-type: none"> Berisi Nomor Register <i>Supplier</i> (NRS) yang sesuai dengan pihak ketiga yang tertera pada kontrak Jika supplier tersebut belum didaftarkan/ belum mendapatkan NRS maka data kontrak tidak dapat dilanjutkan 	123	Ya
8	Nama supplier	Berisi nama <i>supplier</i> (pihak ketiga) yang tertera dalam kontrak	Konsorsium/01/DT P/2013	Ya
9	NPWP	Berisi NPWP <i>supplier</i> (pihak ketiga) yang tertera dalam kontrak	000000000015000	Ya
10	Site	Berisi gabungan tipe <i>supplier</i> dan kode pos	6_10710	Ya
11	Tipe Supplier	Berisi kode tipe <i>supplier</i> , untuk kontrak hanya menggunakan tipe 2 dan 6	6	Ya
12	Kode pos	Berisi Kode Pos <i>Supplier</i>	10710	Ya
13	Mata Uang	Berisi kode mata uang dalam kontrak	IDR	Ya
14	Tanggal Rate	<ul style="list-style-type: none"> Tanggal rate akan terisi secara otomatis hanya untuk kontrak dengan mata uang asing yang tipe ratenya menggunakan kurs tengah BI. Untuk kontrak dengan mata uang rupiah maka tanggal rate adalah kosong 	Kosong	Tidak

No	Nama Field	Keterangan	Contoh	Divalidasi oleh Sistem
15	Rate	<p>Rate/tipe rate akan terisi untuk kontrak dengan mata uang asing yang terdiri dari 2 tipe sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurs tengah BI, jika user tidak mengisikan nilai rate/kurs pada saat perekaman data kontrak dan nilainya akan ditentukan berdasarkan referensi dari BI yang ada pada sistem SPAN • User, jika user menentukan nilai rate/kurs pada saat perekaman data kontrak 	Kosong	Tidak
16	Deskripsi Pekerjaan	Berisi Uraian pekerjaan yang dikontrakkan dengan maksimal 240 karakter	Pembangunan Gedung Inovasi Teknologi Informasi	Tidak
17	No kontrak	<ul style="list-style-type: none"> • Berisi nomor kontrak, dengan maksimal 150 karakter / digit. • Nomor Kontrak yang sama dapat didaftarkan lebih dari satu kali apabila terdapat perbedaan mata uang dalam kontrak 	01/DTP/2013	Ya
18	No RCF	Berisi nomor yang dibentuk oleh sistem aplikasi satker dan tidak perlu diperiksa	01/DTP/2013	Tidak
19	Tanggal Pembuatan Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> • Berisi tanggal penandatanganan dokumen kontrak • Format penulisan : DD-MMM-YYYY, dan nama bulan menggunakan singkatan dalam Bahasa Indonesia • Tanggal Pembuatan Kontrak harus lebih awal atau sama dengan tanggal pendaftaran kontrak di KPPN, jika tidak maka data kontrak tidak dapat dilanjutkan 	03-JAN-2013	Ya
20	Tanggal Mulai Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> • Berisi tanggal mulainya pekerjaan sesuai dokumen kontrak • Format penulisan : DD-MMM-YYYY, dan nama bulan menggunakan singkatan dalam Bahasa Indonesia • Tanggal Mulai Kontrak minimal harus sama atau setelah Tanggal Pembuatan Kontrak, jika tidak maka data kontrak tidak dapat dilanjutkan 	03-JAN-2013	Ya
21	Jaminan Waktu Pemeliharaan	Berisi lamanya jangka waktu pemeliharaan pekerjaan	30 Hari	Tidak
22	Tanggal Addendum	Berisi tanggal perubahan data kontrak (Tidak harus dengan adanya perubahan dokumen kontrak) namun untuk pendaftaran data kontrak baru, tanggal addendum harus kosong	09-JAN-2013	Ya

No	Nama Field	Keterangan	Contoh	Divalidasi oleh Sistem
23	Persentase LOAN/GOI	Berisi persentase porsi pinjaman/hibah dan persentase porsi rupiah murni untuk kontrak yang sumber dananya berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Kosong	Ya
24	Uang Muka	Berisi uraian nilai uang muka kontrak dalam bentuk <i>free text</i> dengan maksimal 50 karakter dan tidak digunakan untuk validasi	Uang muka sebesar 20%	Tidak
25	Catatan Tambahan	Berisi Nomor DIPA dan catatan penting lainnya seperti Closing date, Nomor <i>Loan</i> , Nomor Register <i>Loan</i> , tgl efektif loan, surat keputusan menteri, dll yang perlu diinformasikan dengan maksimal 150 karakter	DIPA Nomor : 0558/023-04.2.01/12/2013, tanggal : 09-DES-2012	Tidak
26	Kategori Pinjaman PHLN	Berisi kategori Pinjaman/Hibah	Kosong	Tidak
27	No Addendum	Berisi nomor perubahan data kontrak (Tidak harus selalu dengan adanya addendum dokumen kontrak) dan nomor addendum ini hanya terisi pada saat pendaftaran addendum kontrak sedangkan untuk pendaftaran kontrak tahunan baru tidak boleh terisi	01/DTP/2013 Add 1	Ya
28	No Rekening	Berisi nomor rekening yang akan digunakan sebagai tujuan pembayaran sesuai dokumen kontrak	12345678	Ya
29	Ketentuan Sanksi	Berisi uraian ketentuan sanksi sesuai yang tercantum dalam dokumen kontrak dengan maksimal 150 karakter	denda keterlambatan satu permil perhari, maksimal 5% dari nilai kontrak	Tidak
30	Nilai Kontrak	Berisi nilai kontrak sesuai yang tercantum pada dokumen kontrak, nilai kontrak tidak boleh melebihi ketersediaan dana dalam DIPA	500000	Ya
31	No Line	<ul style="list-style-type: none"> Berisi nomor line dengan membedakan line berdasarkan cara tarik Nomor line dapat lebih dari satu jika terdapat cara tarik yang berbeda dalam satu dokumen kontrak 	1, 2	Ya
32	Tipe Line	Selalu berisi "Belanja/Biaya" dan hanya digunakan untuk keperluan sistem	"Belanja/Biaya"	Ya
33	Keterangan	Berisi keterangan untuk tiap <i>line</i> , namun pada saat <i>piloting</i> akan berisi sama dengan uraian deskripsi kontrak	Pembangunan Gedung Inovasi Teknologi Informasi	Tidak
34	Jenis Pembayaran	Berisi kode cara tarik	RK	Ya
35	Nilai	Berisi nilai untuk tiap <i>line</i> , untuk kontrak yang terdiri hanya dari satu cara tarik maka nilai <i>line</i> harus sama dengan nilai kontrak dan jika kontrak terdiri lebih dari satu cara tarik maka total nilai <i>line</i> harus sama dengan nilai kontrak	500000	Ya

No	Nama Field	Keterangan	Contoh	Divalidasi oleh Sistem
36	% Uang muka	<ul style="list-style-type: none"> Berisi persentase uang muka untuk setiap cara tarik Pada saat <i>piloting</i> SPAN kolom ini tidak diisi 	Kosong	Ya
37	Nilai Uang Muka	<ul style="list-style-type: none"> Berisi nominal uang muka untuk setiap cara tarik Pada saat <i>piloting</i> SPAN kolom ini tidak diisi 	Kosong	Ya
38	% Retensi	<ul style="list-style-type: none"> Berisi persentase retensi untuk setiap cara tarik Pada saat <i>piloting</i> SPAN kolom ini tidak diisi 	Kosong	
40	Nilai Retensi	<ul style="list-style-type: none"> Berisi nominal retensi untuk setiap cara tarik Pada saat <i>piloting</i> SPAN kolom ini tidak diisi 	Kosong	Ya
41	No Payment	<ul style="list-style-type: none"> Berisi nomor urut rencana angsuran termin Pada saat <i>piloting</i>, uang muka dan retensi masuk kedalam bagian payment sehingga masing-masing akan mendapatkan nomor <i>payment</i> 	1, 2, 3	Ya
42	Nilai Payment	<ul style="list-style-type: none"> Berisi nilai/nominal untuk tiap rencana angsuran/termin Pada saat <i>piloting</i>, uang muka dan retensi masuk kedalam bagian <i>payment</i> sehingga nilainya dicatat juga dalam nilai <i>payment</i> 	500000	Ya
43	Jadwal Pembayaran	<ul style="list-style-type: none"> Berisi tanggal untuk tiap rencana angsuran/termin Format penulisan:DD-MMM-YYYY, dan nama bulan menggunakan singkatan dalam Bahasa Indonesia Untuk kontrak tahunan, tanggal jadwal pembayaran minimal harus sama dengan tanggal mulai kontrak dan maksimal sebelum melewati akhir tahun anggaran 	03-JUN-2013	Ya
44	Nilai Pengembalian Uang Muka	<ul style="list-style-type: none"> Berisi Nilai/nominal rencana pengembalian uang muka pada tiap rencana angsuran/termin untuk kontrak dengan uang muka yang dicatat secara bruto Pada saat <i>piloting</i> SPAN kolom ini tidak diisi 	Kosong	Ya
45	Potongan Retensi	<ul style="list-style-type: none"> Berisi Nilai/nominal rencana potongan retensi pada tiap rencana angsuran/termin untuk kontrak dengan retensi yang dicatat secara bruto Pada saat <i>piloting</i> SPAN kolom ini tidak diisi 	Kosong	Ya
46	No Distribution	Hanya digunakan untuk keperluan sistem dan diisi dengan angka 1	1	Ya
47	Nilai	Berisi nilai yang dibebankan pada suatu Bagan Akun Standar tertentu untuk setiap rencana angsuran / termin	500000	Ya

A

No	Nama Field	Keterangan	Contoh	Divalidasi oleh Sistem
48	COA	Berisi 12 segmen kombinasi Bagan Akun Standar untuk pembebanan kontrak	189772.023.53111 1.0230405.100199 8.A000000001.000 0.2.0205.2.000000. 000000	Ya

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONG

FORMAT SURAT PERMINTAAN PERUBAHAN DATA KONTRAK

<KOP SURAT>..... (1)

Nomor : (2) (5)

Hal : (3)

Lampiran : (4)

Yth.(6)

..... (7)

1. Dengan memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-/PB/2013 tentang Pengelolaan Data *Supplier* dan data kontrak Dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, dengan ini kami mengajukan permintaan perubahan data kontrak :

- a. Nomor Kontrak : (8)
- b. Nomor Register Kontrak : (9)
- c. Kode Satker : (10)
- d. Nama Satker : (11)

Alasan perubahan data kontrak: (12)

- Bertambah atau berkurangnya cara penarikan
- Bertambah atau berkurangnya frekuensi rencana angsuran/pembayaran
- Perubahan jumlah uang muka kontrak
- Perubahan persentase retensi

2. Substansi perubahan data kontrak dimaksud adalah sebagai berikut :

Uraian	Sebelum	Sesudah
Nilai Kontrak (13) (14)
Uang Muka Kontrak (15) (16)
Persentase Retensi (17) (18)
Jumlah <i>Line</i> (19) (20)
Detail perubahan <i>Line</i> (21) (22)
Jumlah termin (23) (24)
Detail perubahan termin (25) (26)

3. Sebagai bahan pertimbangan untuk melengkapi permintaan dimaksud, kami lampirkan kartu pengawasan kontrak terakhir.
4. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Pejabat Pembuat Komitmen,

(27)

..... (28)

..... (29)

1

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN PERUBAHAN DATA KONTRAK

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan kop instansi berkenaan
(2)	Diisi dengan nomor surat
(3)	Diisi dengan hal
(4)	Diisi dengan jumlah lampiran berkenaan
(5)	Diisi dengan tanggal pembuatan surat
(6)	Diisi dengan Kepala KPPN tempat satuan kerja melakukan pembayaran
(7)	Diisi dengan alamat KPPN berkenaan
(8)	Diisi dengan nomor kontrak berkenaan
(9)	Diisi dengan nomor register kontrak berkenaan
(10)	Diisi dengan nama supplier berkenaan
(11)	Diisi dengan nomor register supplier berkenaan
(12)	Diisi dengan pilihan alasan perubahan data, dengan memberikan <i>checklist</i> pada kotak yang telah disediakan (<i>checklist</i> dapat lebih dari satu)
(13)	Diisi dengan nilai kontrak sebelum perubahan
(14)	Diisi dengan nilai kontrak sesudah perubahan
(15)	Diisi dengan nilai uang muka kontrak sebelum perubahan (jika ada perubahan)
(16)	Diisi dengan nilai uang muka kontrak sesudah perubahan (jika ada perubahan)
(17)	Diisi dengan persentase retensi sebelum perubahan (jika ada perubahan)
(18)	Diisi dengan persentase retensi sesudah perubahan (jika ada perubahan)
(19)	Diisi dengan jumlah <i>Line</i> (cara tarik) sebelum perubahan (jika ada perubahan)
(20)	Diisi dengan jumlah <i>Line</i> (cara tarik) sesudah perubahan (jika ada perubahan)
(21)	Diisi dengan detail data pada <i>Line</i> sebelum perubahan seperti cara tarik, nilai <i>Line</i> , deskripsi <i>Line</i> (dikosongi jika nomor 19 dan 20 kosong)
(22)	Diisi dengan detail data pada <i>Line</i> sesudah perubahan seperti cara tarik, nilai <i>Line</i> , deskripsi <i>Line</i> (dikosongi jika nomor 19 dan 20 kosong)
(23)	Diisi dengan jumlah termin/jadwal pembayaran sebelum perubahan (jika ada perubahan)
(24)	Diisi dengan jumlah termin/jadwal pembayaran sesudah perubahan (jika ada perubahan)
(25)	Diisi dengan detail data pada termin/jadwal pembayaran sebelum perubahan seperti deskripsi pembayaran, tanggal jadwal pembayaran, nilai pembayaran, potongan uang muka dan potongan retensi jika ada, serta kombinasi Bagan Akun Standar (dikosongi jika nomor 22 dan 23 kosong)

1

NO	URAIAN ISIAN
(26)	Diisi dengan detail data pada termin/jadwal pembayaran sesudah perubahan seperti deskripsi pembayaran, tanggal jadwal pembayaran, nilai pembayaran, potongan uang muka dan potongan retensi jika ada, serta kombinasi Bagan Akun Standar (dikosongi jika nomor 22 dan 23 kosong)
(27)	Diisi dengan tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen
(28)	Diisi dengan Nama Lengkap Pejabat Pembuat Komitmen
(29)	Diisi dengan NIP Pejabat Pembuat Komitmen

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO 

FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBATALAN DATA KONTRAK

<KOP SURAT>..... (1)	
Nomor	: (2) (5)
Hal	: (3)
Lampiran	: (4)
Yth. (6)
 (7)
1. Dengan memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-PB/2013 tentang Pengelolaan Data <i>Supplier</i> dan data kontrak Dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, dengan ini kami mengajukan permintaan pembatalan kontrak :	
a. Nomor Kontrak	: (8)
b. Nomor Register Kontrak	: (9)
c. Nama <i>Supplier</i>	: (10)
d. Nomor Register <i>Supplier</i>	: (11)
e. Kode dan Nama Satker	: (12)
f. Nilai Kontrak	: (13)
g. Nilai Kontrak yang dibatalkan	: (14)
Alasan pembatalan kontrak: (15)	
<input type="checkbox"/> Pemutusan Kontrak oleh PPK;	
<input type="checkbox"/> Alasan lain yaitu (16)	
2. Sebagai bahan pertimbangan untuk melengkapi permintaan dimaksud, kami lampirkan kartu pengawasan kontrak terakhir.	
3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.	
Pejabat Pembuat Komitmen,	
(17)	
..... (18)	
..... (19)	

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN PEMBATALAN KONTRAK

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan kop instansi berkenaan.
(2)	Diisi dengan nomor surat.
(3)	Diisi dengan hal.
(4)	Diisi dengan jumlah lampiran berkenaan.
(5)	Diisi dengan tanggal pembuatan surat.
(6)	Diisi dengan Kepala KPPN tempat satuan kerja melakukan pembayaran.
(7)	Diisi dengan alamat KPPN berkenaan.
(8)	Diisi dengan nomor kontrak berkenaan.
(9)	Diisi dengan nomor register kontrak berkenaan.
(10)	Diisi dengan nama <i>supplier</i> berkenaan
(11)	Diisi dengan nomor register <i>supplier</i> berkenaan.
(12)	Diisi dengan kode dan nama satker yang bersangkutan
(13)	Diisi dengan nilai kontrak yang masih aktif
(14)	Diisi dengan nilai kontrak yang akan dibatalkan
(15)	Diisi dengan pilihan alasan perubahan data, dengan mengisi kotak checklist yang telah disediakan.
(16)	Diisi dengan alasan lain selain alasan yang sudah disebutkan.
(17)	Diisi dengan tandatangan Pejabat Pembuat Komitmen.
(18)	Diisi dengan Nama Lengkap Pejabat Pembuat Komitmen
(19)	Diisi dengan NIP Pejabat Pembuat Komitmen

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


M MARWANTO HARJOWIRYONO 

M

I. CONTOH FORMAT KARWAS KONTRAK TAHUNAN



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

1

Informasi Laporan			
Didaftarkan Oleh :		Tanggal Pendaftaran :	
Diubah Oleh :	3	Tanggal Perubahan :	6
Dilaporkan Oleh :	4	Tanggal dan Jam :	7
	5		8

KARTU PENGAWASAN KONTRAK TAHUNAN

KPPN

10

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Informasi Supplier	Informasi Bank/Pihak Ketiga
SPAN No Supplier : 11	Nama Pihak Ketiga : 32
SPAN Nama Supplier : 12	Nama Bank : 33
Nama Supplier : 13	No Rekening : 34
NPWP : 14	Nama Pemilik Rekening : 35
Nama Site : 15	Mata Uang : 36
Status : 16	
Type Komitmen : 17	
CAN Tahunan : 18	
Nilai Kontrak Tahunan : 19	
Satker : 20	
No Kontrak : 21	
No RFC : 22	
Tanggal Kontrak : 23	Tanggal Selesai Kontrak : 37
Tanggal Mulai Kontrak : 24	Tanggal Addendum : 38
Jangka Waktu Pemeliharaan : 25	
Uang Muka : 26	
Porsi Pembayaran LOAN/GOI : 27	Kategori PHLN : 39
Catatan Tambahan : 28	Mata Uang : 40
No. Addendum : 29	
Ketentuan Sangsi : 30	
Keterangan : 31	

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	Nomor SPM	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				Nilai	%	Nilai									
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	

NO	No. SPM	Tanggal SPM	No. SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan					Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)	
						PPN	PPn. BM	PPH	Denda	Retensi			Potongan UM
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69

Total Uang Muka	70	Total Pembayaran Kotor (SP2D)	76
Total Pengembalian UM (SP2D)	71	Total Realisasi Kontrak	74
Sisa Uang Muka	72	Kontrak Yang Belum Terealisasi	75
		Total Potongan (SP2D)	77
		Total Pembayaran Bersih (SP2D)	78
			79
			80

KETERANGAN ISIAN
KARTU PENGAWASAN KONTRAK TAHUNAN

NO	KETERANGAN ISIAN
(1)	Berisi Identitas Instansi
(2)	Berisi judul laporan yaitu Kartu Pengawasan Kontrak Tahunan
(3)	Berisi pengguna (<i>user</i>) yang pertama kali mendaftarkan data kontrak
(4)	Berisi pengguna (<i>user</i>) yang terakhir kali melakukan perubahan pada data kontrak
(5)	Berisi pengguna (<i>user</i>) yang mencetak Kartu Pengawasan Kontrak Tahunan
(6)	Berisi tanggal pertama kali dilakukan pendaftaran data kontrak
(7)	Berisi tanggal terakhir kali dilakukan perubahan pada data kontrak
(8)	Berisi tanggal dan jam pencetakan Kartu Pengawasan Kontrak Tahunan
(9)	Berisi kode KPPN tempat pembayaran
(10)	Berisi nama KPPN tempat pembayaran
(11)	Berisi Nomor Register <i>Supplier</i>
(12)	Berisi kombinasi nama dan <i>NPWP supplier</i>
(13)	Berisi nama <i>supplier</i>
(14)	Berisi <i>NPWP supplier</i>
(15)	Berisi kombinasi kode tipe <i>supplier</i> dan kode pos <i>supplier</i>
(16)	Berisi status kontrak pada saat dilaporkan (<i>approved/cancel/close</i>)
(17)	Berisi "Kontrak"
(18)	Berisi Nomor Register Kontrak tahunan (CAN Tahunan)
(19)	Berisi nilai kontrak tahunan
(20)	Berisi kode dan nama satker
(21)	Berisi nomor kontrak
(22)	Berisi nomor <i>Request for Commitment</i>
(23)	Berisi tanggal kontrak (Tanggal penandatanganan kontrak)
(24)	Berisi tanggal mulai kontrak
(25)	Berisi jangka waktu pemeliharaan
(26)	Berisi nilai uang muka
(27)	Berisi porsi pembayaran PHLN dan GOI
(28)	Berisi nomor DIPA dan informasi penting lainnya yang perlu ditampilkan
(29)	Berisi nomor addendum kontrak
(30)	Berisi ketentuan sanksi
(31)	Berisi deskripsi kontrak
(32)	Berisi nama pihak ketiga penerima pembayaran (akan terisi untuk kontrak penerusan pinjaman dan konsorsium)
(33)	Berisi nama Bank pihak ketiga (penerima pembayaran)
(34)	Berisi nomor rekening pihak ketiga (penerima pembayaran)
(35)	Berisi nama rekening pihak ketiga (penerima pembayaran)
(36)	Berisi jenis mata uang yang digunakan pada rekening pihak ketiga (penerima pembayaran)
(37)	Berisi tanggal selesai kontrak
(38)	Berisi tanggal addendum
(39)	Berisi kategori Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)
(40)	Berisi jenis mata uang yang digunakan pada kontrak
(41)	Berisi nomor <i>Line</i>

1

NO	KETERANGAN ISIAN
(42)	Berisi deskripsi <i>Line</i>
(43)	Berisi kode cara penarikan
(44)	Berisi nilai <i>Line</i>
(45)	Berisi nilai uang muka untuk tiap <i>Line</i>
(46)	Berisi persentase retensi untuk tiap <i>Line</i>
(47)	Berisi nilai retensi untuk tiap <i>Line</i>
(48)	Berisi nomor termin/jadwal pembayaran
(49)	Berisi deskripsi termin/jadwal pembayaran
(50)	Berisi tanggal termin/jadwal termin pembayaran
(51)	Berisi nilai termin/jadwal pembayaran
(52)	Berisi nomor SPM
(53)	Berisi rencana pengembalian uang muka
(54)	Berisi rencana potongan retensi
(55)	Berisi Bagan Akun Standar (BAS)
(56)	Berisi nomor urut
(57)	Berisi nomor SPM
(58)	Berisi tanggal SPM
(59)	Berisi nomor SP2D
(60)	Berisi tanggal SP2D
(61)	Berisi nilai kotor SPM
(62)	Berisi nilai potongan PPN pada SPM
(63)	Berisi nilai potongan PPn BM pada SPM
(64)	Berisi nilai potongan PPh pada SPM
(65)	Berisi nilai potongan denda pada SPM
(66)	Berisi nilai potongan retensi
(67)	Berisi nilai potongan uang muka
(68)	Berisi nilai jumlah potongan pada SPM
(69)	Berisi nilai SP2D
(70)	Berisi nilai total uang muka yang diberikan
(71)	Berisi nilai total pengembalian uang muka yang sudah dilakukan
(72)	Berisi nilai sisa uang muka yang belum dikembalikan
(73)	Berisi nilai kontrak tahunan
(74)	Berisi nilai kontrak tahunan yang sudah direalisasikan
(75)	Berisi nilai kontrak tahunan yang belum direalisasikan
(76)	Berisi nilai total pembayaran kotor SPM
(77)	Berisi nilai total potongan SPM
(78)	Berisi nilai total SP2D/SPM bersih
(79)	Berisi jabatan penandatanganan Kartu Pengawasan Kontrak Tahunan
(80)	Berisi nama penandatanganan Kartu Pengawasan Kontrak Tahunan
(81)	Berisi NIP penandatanganan Kartu Pengawasan Kontrak Tahunan

M

II. CONTOH FORMAT KARWAS KONTRAK TAHUN JAMAK

	Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Lampiran VIB	
	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan	
	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 1	Nomor PER- /PB/2013 Tentang Pengelolaan Data Kontrak Dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara	

Informasi Laboran			
Ditentukan Oleh 3	Tanggal Pendaftaran 6	Diurus Oleh 4	Tanggal Perubahan 7
Diaparkan Oleh 5	Tanggal dan Jam 8		

KARTU PENGAWASAN KONTRAK TAHUN JAMAK 2	KPPN	9
		10

INFORMASI KONTRAK TAHUN JAMAK	
<p><u>Informasi Supplier</u></p> <p>Span No Supplier 11</p> <p>Span Nama Supplier 12</p> <p>Nama Supplier 13</p> <p>NPKP 14</p> <p>Nama Site 15</p> <p>Status 16</p> <p>Tipe Komitmen 17</p> <p>Cat Tahun Jamak 18</p> <p>Nilai Tahun Jamak 19</p> <p>Cover 20</p> <p>No Kontrak 21</p> <p>No RFC 22</p> <p>Tanggal Kontrak Dibuat 23</p> <p>Tanggal Mulai Kontrak 24</p> <p>Jangka Waktu Pemeliharaan 25</p> <p>Uang Muka 26</p> <p>Porto Pembayaran LDAN/GDI 27</p> <p>Catatan Tambahan 28</p> <p>No Addendum 29</p> <p>Keterangan Sanksi 30</p> <p>Keterangan 31</p>	<p><u>Informasi Pihak Ketiga</u></p> <p>Nama Pihak Ketiga 32</p> <p>Nama Bank 33</p> <p>No Rekening 34</p> <p>Nama Pemilik Rekening 35</p> <p>Mata Uang 36</p> <p>Tanggal Selesai Kontrak 37</p> <p>Tanggal Addendum 38</p> <p>Kategori PHLN 39</p> <p>Mata Uang 40</p>

<p>Cat Tahunan 41</p> <p>Nilai Kontrak Tahunan 42</p> <p>No RFC 43</p> <p>Tanggal Addendum 44</p>	<p>Release Tahun 45</p> <p>Status 46</p>	<p>Ditentukan Oleh 47</p> <p>Diubah Oleh 48</p> <p>Tanggal Pendaftaran 49</p> <p>Tanggal Perubahan 50</p>
---	--	---

No	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	Nomor DPM	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				Nilai	%	Nilai	%								
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	

No	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Rupiah)	Potongan						Nilai SP2D (Bersih)		
						PPS	PHS/M	PPS	Potongan Lainnya	Dienda	Retensi		Potongan UM	Jumlah Potongan
66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

<p>Total Uang Muka 81</p> <p>Total Pengembalian UM (SP2D) 82</p> <p>Sisa Uang Muka 83</p>	<p>Nilai Kontrak Tahunan 84</p> <p>Total Realisasi Kontrak 85</p> <p>Kontrak Yang Belum Terealisasi 86</p>	<p>Total Pembayaran Kotor (SP2D) 87</p> <p>Total Potongan (SP2D) 88</p> <p>Total Pembayaran Bersih (SP2D) 89</p>
---	--	--

<u>Ringkasan Realisasi Kontrak Tahun Jamak</u>		
<p>Total Uang Muka 90</p> <p>Total Pengembalian UM (SP2D) 91</p> <p>Sisa Uang Muka 92</p>	<p>Nilai Kontrak Tahun Jamak 93</p> <p>Total Realisasi Kontrak 94</p> <p>Kontrak Yang Belum Terealisasi 95</p>	<p>Total Pembayaran Kotor (SP2D) 96</p> <p>Total Potongan (SP2D) 97</p> <p>Total Pembayaran Bersih (SP2D) 98</p> <p>JABATAN 99</p> <p>NAMA 100</p> <p>NIP 101</p>

M

KETERANGAN ISIAN
KARTU PENGAWASAN KONTRAK TAHUN JAMAK

NO	KETERANGAN ISIAN
(1)	Berisi Identitas Instansi
(2)	Berisi judul laporan yaitu Kartu Pengawasan Kontrak Tahun Jamak
(3)	Berisi pengguna (<i>user</i>) yang pertama kali mendaftarkan data kontrak tahun jamak
(4)	Berisi pengguna (<i>user</i>) yang terakhir kali melakukan perubahan pada data kontrak tahun jamak
(5)	Berisi pengguna (<i>user</i>) yang mencetak Kartu Pengawasan Tahun Jamak
(6)	Berisi tanggal pertama kali dilakukan pendaftaran data kontrak tahun jamak
(7)	Berisi tanggal terakhir kali dilakukan perubahan pada data kontrak tahun jamak
(8)	Berisi tanggal dan jam pencetakan Kartu Pengawasan Kontrak Tahun Jamak
(9)	Berisi kode KPPN tempat pembayaran
(10)	Berisi nama KPPN tempat pembayaran
(11)	Berisi Nomor Register <i>Supplier</i>
(12)	Berisi kombinasi nama dan NPWP <i>supplier</i>
(13)	Berisi nama <i>supplier</i>
(14)	Berisi NPWP <i>supplier</i>
(15)	Berisi kombinasi kode tipe <i>supplier</i> dan kode pos <i>supplier</i>
(16)	Berisi status kontrak tahun jamak pada saat dilaporkan (<i>approved/cancel/close</i>)
(17)	Berisi "Kontrak"
(18)	Berisi Nomor Register Kontrak Tahun Jamak (CAN Tahun Jamak)
(19)	Berisi nilai kontrak Tahun Jamak
(20)	Berisi kode dan nama satker
(21)	Berisi nomor kontrak tahun jamak
(22)	Berisi nomor <i>Request for Commitment</i>
(23)	Berisi tanggal kontrak (Tanggal penandatanganan kontrak)
(24)	Berisi tanggal mulai kontrak
(25)	Berisi jangka waktu pemeliharaan
(26)	Berisi nilai uang muka
(27)	Berisi porsi pembayaran PHLN dan GOI
(28)	Berisi nomor DIPA dan informasi penting lainnya yang perlu ditampilkan
(29)	Berisi nomor addendum kontrak
(30)	Berisi ketentuan sanksi
(31)	Berisi deskripsi kontrak
(32)	Berisi nama pihak ketiga penerima pembayaran (akan terisi untuk kontrak penerusan pinjaman dan konsorsium)
(33)	Berisi nama Bank pihak ketiga (penerima pembayaran)
(34)	Berisi nomor rekening pihak ketiga (penerima pembayaran)
(35)	Berisi nama rekening pihak ketiga (penerima pembayaran)
(36)	Berisi jenis mata uang yang digunakan pada rekening pihak ketiga (penerima pembayaran)
(37)	Berisi tanggal selesai kontrak
(38)	Berisi tanggal addendum
(39)	Berisi kategori Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)
(40)	Berisi jenis mata uang yang digunakan pada kontrak
(41)	Berisi Nomor Register Kontrak <i>Release</i> (CAN <i>Release</i>)
(42)	Berisi nilai kontrak <i>release</i>
(43)	Berisi nomor <i>Request for Commitment release</i>
(44)	Berisi tanggal addendum kontrak <i>release</i>

NO	KETERANGAN ISIAN
(45)	Berisi <i>release</i> ke-
(46)	Berisi status kontrak <i>release</i> pada saat dilaporkan (<i>Approved/cancel/close</i>)
(47)	Berisi pengguna (<i>user</i>) yang pertama kali mendaftarkan data kontrak <i>release</i>
(48)	Berisi pengguna (<i>user</i>) yang terakhir kali melakukan perubahan pada data kontrak <i>release</i>
(49)	Berisi tanggal pertama kali dilakukan pendaftaran data kontrak <i>release</i>
(50)	Berisi tanggal terakhir kali dilakukan perubahan pada data kontrak <i>release</i>
(51)	Berisi nomor <i>Line</i>
(52)	Berisi deskripsi <i>Line</i>
(53)	Berisi kode cara penarikan
(54)	Berisi nilai <i>Line</i>
(55)	Berisi nilai uang muka untuk tiap <i>Line</i>
(56)	Berisi persentase retensi untuk tiap <i>Line</i>
(57)	Berisi nilai retensi untuk tiap <i>Line</i>
(58)	Berisi nomor termin/jadwal pembayaran
(59)	Berisi deskripsi termin/jadwal pembayaran
(60)	Berisi tanggal termin/jadwal termin pembayaran
(61)	Berisi nilai termin/jadwal pembayaran
(62)	Berisi nomor SPM
(63)	Berisi rencana pengembalian uang muka
(64)	Berisi rencana potongan retensi
(65)	Berisi Bagan Akun Standar (BAS)
(66)	Berisi nomor urut
(67)	Berisi nomor SPM
(68)	Berisi tanggal SPM
(69)	Berisi nomor SP2D
(70)	Berisi tanggal SP2D
(71)	Berisi nilai kotor SPM
(72)	Berisi nilai potongan PPN pada SPM
(73)	Berisi nilai potongan PPn BM pada SPM
(74)	Berisi nilai potongan PPh pada SPM
(75)	Berisi nilai potongan lainnya
(76)	Berisi nilai potongan denda pada SPM
(77)	Berisi nilai potongan retensi
(78)	Berisi nilai potongan uang muka
(79)	Berisi nilai jumlah potongan pada SPM
(80)	Berisi nilai SP2D
(81)	Berisi nilai total uang muka yang diberikan pada saat <i>release</i> berkenaan
(82)	Berisi nilai total pengembalian uang muka yang sudah dilakukan pada saat <i>release</i> berkenaan
(83)	Berisi nilai sisa uang muka yang belum dikembalikan pada saat <i>release</i> berkenaan
(84)	Berisi nilai kontrak <i>release</i>
(85)	Berisi nilai kontrak <i>release</i> yang sudah direalisasikan
(86)	Berisi nilai kontrak <i>release</i> yang belum direalisasikan
(87)	Berisi nilai total pembayaran kotor SPM pada saat <i>release</i> berkenaan
(88)	Berisi nilai total potongan SPM pada saat <i>release</i> berkenaan
(89)	Berisi nilai total SP2D / SPM bersih pada saat <i>release</i> berkenaan

NO	KETERANGAN ISIAN
(90)	Berisi nilai total uang muka kontrak tahun jamak yang diberikan
(91)	Berisi nilai total pengembalian uang muka kontrak tahun jamak yang sudah dilakukan
(92)	Berisi nilai sisa uang muka kontrak tahun jamak yang belum dikembalikan
(93)	Berisi nilai kontrak tahun jamak
(94)	Berisi nilai kontrak tahun jamak yang sudah direalisasikan
(95)	Berisi nilai kontrak tahun jamak yang belum direalisasikan
(96)	Berisi nilai total pembayaran kotor SPM kontrak tahun jamak
(97)	Berisi nilai total potongan SPM kontrak tahun jamak
(98)	Berisi nilai total SP2D/SPM bersih kontrak tahun jamak
(99)	Berisi jabatan penandatangan Kartu Pengawasan Kontrak Tahun Jamak
(100)	Berisi nama penandatangan Kartu Pengawasan Kontrak Tahun Jamak
(101)	Berisi NIP penandatangan Kartu Pengawasan Kontrak Tahun Jamak

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


1 MARWANTO HARJOWIRYONG 